Tim Matrikulasi UNJ 2016

LANDASAN PENDIDIKAN

Sebuah Kompilasi Materi Perkuliahan

Editor:
Abidin Khusaeni
Pilda Nugraha Firdaus

LANDASAN PENDIDIKAN

SEBUAH KOMPILASI MATERI PERKULIAHAN

LANDASAN PENDIDIKAN

Sebuah Kompilasi Materi Perkuliahan

Tim Matrikulasi UNJ 2016

Program Pascasarjana

Universitas Negeri Jakarta

LANDASAN PENDIDIKAN

Sebuah Kompilasi Materi Perkuliahan

Tim Penyusun:

Abidin Khusaeni

Arie Wibowo

Ayu Fitria

Dede Rahayu S

Dyah Asri M

Fadlilah Fahmi

Fathiannisa Sabila

Ida Royani

Khafid Nurrochman

Noviani Astuti

Ona Rahmawati

Pilda Nugraha Firdaus

Ria Natalia M. Sihombing

Rizki Putra

Rosalina Judianti S

Sayekti Dewi Anggraeni

Usman Riyadi

Editor:

Abidin Khusaeni

Pilda Nugraha Firdaus

Design Cover:

Rizki Putra

Layout:

Fadlilah Fahmi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah…

Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan penyusunan buku *Landasan Pendidikan Sebuah Kompilasi Materi Perkuliahan* tanpa ada kendala satu hal pun. Buku ini merupakan kompilasi materi perkuliahan Matriklasi tahun 2016 pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakara. Kemudian melalui ini kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Karnadi, M.Si selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendididkan, yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan akan pentingnya pendidikan dalam konteks kekinian yang diejawantahkan dalam proses perkuliahan beliau. Juga, kami berterima kasih kepada teman-teman matrikulasi yang telah memberikan kontribusi banyak untuk penyusunan buku ini.

Besar harapan kami, buku ini bisa menjadi salah satu media untuk memperkaya khazanah intelektual pembaca. Kami tentu tidak menafikan akan kekhilafan dan kesalahan dalam penyusunan buku ini. Maka dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf jika dalam penyusunan buku ini terdapat kesalahan tulis (*typo*) atau bahkan lemah dan kurang secara teori. Untuk itu, kritik dan saran pembaca sangat kami nantikan sebagai bekal memperbaiki karya-karya selanjutnya.

Terima kasih.

Wassalam.

Jakarta, September 2016

Tim Penyusun

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

BAGIAN 1

LANDASAN FILOSOFIS DALAM PENDIDIKAN

Terdapat banyak alasan untuk mempelajari filsafat pendidikan, khususnya apabila ada pertanyaan rasional yang seyogyanya tidak dapat dijawab oleh ilmu atau cabang ilmu-ilmu pendidikan. Pakar dan praktisi pendidikan memandang filsafat yang membahas konsep dan praktik pendidikan secara komprehensif sebagai bagian yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Terlebih lagi, di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang melaju sangat pesat, pendidikan harus diberi inovasi agar tidak ketinggalan perkembangan serta memiliki arah tujuan yang jelas. Di sinilah perlunya konstruksi filosofis yang mampu melandasi teori dan praktek pendidikan untuk mencapai keberhasilan substantif.

Teori dan praktek pendidikan memiliki spektrum yang sangat luas mencakup seluruh pemikiran dan pengalaman tentang tujuan, proses, serta hasil pendidikan. Pendidikan dapat dipelajari secara empirik berdasarkan pengalaman maupun melalui perenungan dengan melihat makna pendidikan dalam konteks yang lebih luas. Praktek pendidikan memerlukan teori pendidikan, karena teori pendidikan akan memberikan manfaat antara lain: (1) Sebagai pedoman untuk mengetahui arah dan tujuan yang akan dicapai; (2) Mengurangi kesalahan-kesalahan dalam praktek pendidikan karena dengan memahami teori dapat dipilih mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan; (3) Sebagai tolok ukur untuk mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan pendidikan.

Teori pendidikan yang berisikan konsep-konsep dapat dipelajari dengan menggunakan berbagai pendekatan, antara lain pendekatan filosofi yang akan melahirkan pemahaman tentang filsafat pendidikan. Pendekatan filosofis terhadap pendidikan merupakan suatu pendekatan untuk menelaah dan memecahkan masalah pendidikan menggunakan metode filsafat. Pendidikan membutuhkan filsafat, karena masalah pendidikan tidak hanya menyangkut pelaksanaan pendidikan semata, yang terbatas pada pengalaman.

Landasan filosofis pendidikan perlu dikuasai oleh para pendidik, adapun alasannya antara lain: *Pertama*, karena pendidikan bersifat normatif, maka dalam rangka pendidikan diperlukan asumsi yang bersifat normatif pula. Asumsi-asumsi pendidikan yang bersifat normatif itu antara lain dapat bersumber dari filsafat. Landasan filosofis pendidikan yang bersifat preskriptif dan normatif akan memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya di dalam pendidikan atau apa yang dicita-citakan dalam pendidikan. *Kedua*, bahwa pendidikan tidak cukup dipahami hanya melalui pendekatan ilmiah yang bersifat parsial dan deskriptif saja, melainkan perlu dipandang pula secara holistik. Adapun kajian pendidikan secara holistik dapat diwujudkan melalui pendekatan filosofis. Ada berbagai aliran filsafat pendidikan, antara lain Idealisme, Realisme, Pragmatisme, dsb. Namun demikian, bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki filsafat pendidikan nasional tersendiri, yaitu filsafat pendidikan yang berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan hal ini berbagai aliran filsafat pendidikan perlu kita pelajari, namun demikian bahwa pendidikan yang kita selenggarakan hendaknya tetap berlandaskan Pancasila. Pemahaman atas berbagai aliran filsafat pendidikan akan dapat membantu Anda untuk tidak terjerumus ke dalam aliran filsafat lain.

Di samping itu, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, kita pun dapat mengambil hikmah dari berbagai aliran filsafat pendidikan lainnya, dalam rangka memperkokoh landasan filosofis pendidikan kita. Dengan memahami landasan filosofis pendidikan diharapkan tidak terjadi kesalahan konsep tentang pendidikan yang akan mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam praktek pendidikan.

Dalam kegiatan pendidikan akan muncul masalah yang lebih luas, kompleks, dan mendalam serta tidak terbatas oleh pengalaman indrawi maupun fakta-fakta sehingga tidak dapat dijangkau oleh ilmu pendidikan (*science of education*). Masalah-masalah tersebut antara lain adalah tujuan pendidikan yang bersumber dari tujuan hidup manusia dan nilai sebagai pandangan hidup manusia. Nilai dan tujuan hidup memang merupakan suatu fakta, namun pembahasannya tidak dapat dikaji hanya dengan menggunakan pendekatan sains, melainkan diperlukan suatu perenungan yang lebih mendalam melalui filsafat.

Kiranya kegiatan pendidikan tidak sekedar dipandang sebagai gejala sosial yang bersifat rasional semata akan tetapi ada sesuatu yang mendasarinya. Peranan filsafat dalam mendasari teori ataupun praktek pendidikan merupakan salah satu sumbangan berharga bagi pengembangan pendidikan. Dengan memperhatikan uraian di atas, salah satu pertanyaan yang muncul adalah: “Bagaimana aliran-aliran filsafat melandasi teori pendidikan?” Pertanyaan tersebut akan dijawab dengan mengkaji pemikiran tentang teori pendidikan menurut aliran-aliran filsafat.

A. Definisi Filsafat

Filsafat berasal dari bahasa Yunani, taitu *filare* yang artinya cinta dan *Sophia* yang artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, filsafat artinya cinta akan kebijaksanaan atau kebenaran. Filsafat berarti pula pendirian hidup atau pandangan hidup. Secara ilmiah definisi filsafat yaitu usaha berpikir radikal dan hasil yang diperoleh dari menggambarkan dan menyatakan suatu pandangan yang menyeluruh secara sistematis tentang alam semesta serta tempat dilahirkannya manusia.

Filsafat mencakup keseluruhan pengetahuan manusia, filsafat merupakan sumber ide paling dalam bagi segala macam ilmu pengetahuan, sehingga filsafat disebut juga induk pengetahuan.

Berfilsafat adalah berpikir, tapi tidak semua berpikir dikatakan berfilsafat, berpikir yang berfilsafat mengandung tiga ciri, yaitu :

1. Radika : berpikir sampai keakar akarnya.
2. Sistematis : berpikir logis setahap demi setahap dengan penuh kesadaran dengan urutan yang bertanggungjawab dan saling berhubungan secara teratur.
3. Universal : berpikir menyeluruh.

Menurut Cohen bahwa terdapat 3 (tiga) cabang-cabang Filosofi (Filsafat) yang masing-masing memiliki sub cabang. Ketiga cabang-cabang tersebut adalah Metaphysic (Metafisika), Ephistemology (Epistemologi), dan Axiology (Aksiologi).[1]

1. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas hakikat realitas (segala sesuatu yang ada) secara menyeluruh (komprehensif). Mempelajari hakekat realita, perkembangan kosmos, alam semesta, hakekat dunia, hakekat manusia termasuk hakekat anak.
2. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas tentang hakikat pengetahuan. Persoalan yang dibahas dalam epistemology antara lain mengenai sumber-sumber pengetahuan, cara-cara memperoleh pengetahuan, kriteria kebenaran pengetahuan, dsb.
3. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas tentang hakikat nilai. Aksiologi terdiri dari *Etika* adalah cabang filsafat (bagian aksiologi) yang mempelajari atau membahas tentang hakikat baik jahatnya perbuatan manusia; dan

[1] L.N.M. Cohen. 1999. *Module One: History and Philosophy of Education. School of education*. Oregon: Oregon State University, Hal. 78.

Estetika adalah cabang filsafat (bagian aksiologi) yang mempelajari atau membahas tentang hakikat seni (*art*) dan keindahan (*beauty*).

B. Landasan Filosofis Pendidikan

Menurut KBBI, landasan dapat diartikan sebagai alas, dasar atau tumpuan. Istilah landasan dapat diartikan juga sebagai fundasi. Dengan mengacu arti dari istialah tersebut, dapat dipahami bahwa landasan adalah suatu pijakan, titik tumpu atau titik tolak, suatu fundasi tempat berdirinya sesuatu hal.[2]

Kata filosofis terbentuk dari 2 kata bahasa yunani, yaitu philo yang artinya cinta dan shopos yang artinya kebijaksaan. Dengan demikian filosofis diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Secara maknawi filsafat dimaknai sebagai suatu pengetahuan yang mencoba untuk memahami hakikat segala sesuatu untuk mencapai kebenaran atau kebijaksanaan. Untuk mencapai dan menemukan kebenaran tersebut, filosof memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Demikian pula kajian yang dijadikan obyek telaan akan berbeda selaras dengan cara pandang terhadap hakikat segala sesuatu.[3]

Hakikat pendidikan adalah humanisasi. Tujuan pendidikan adalah terwujudnya manusia ideal atau manusia yang dicita-citakan sesuai nilai-nilai dan norma-norma yang dianut. Pendidikan bersifat normatif dan dapat dipertanggungjawabkan, pendidikan tidak boleh dilaksanakan secara sembarang, melainkan harus dilaksanakan secara bijaksana. Maksudnya, pendidikan harus dilaksanakan dengan mengacu kepada suatu landasan yang kokoh, sehingga tujuannya dan kurikulumnya menjadi jelas, efisien dan efektif.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa landasan filosofi pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Dalam pendidikan terdapat momen studi pendidikan dan momen praktek pendidikan. Melalui studi pendidikan akan diperoleh pemahaman tentang landasan-landasan pendidikan,yang akan dijadikan titik tolak praktek pendidikan. Dengan demikian, landasan filosofis pendidikan sebagai hasil studi pendidikan tersebut, dapat dijadikan titik tolak dalam rangka studi pendidikan yang bersifat filsafiah.

Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan.

---

[2] Depdikbud. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, hal.260
[3] Suyitno. 2009. *Landsan Filosofi Pendidikan*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, hal. 67.

Struktur Landasan Filosofis Pendidikan. Landasan filosofis pendidikan sesungguhnya merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan yang dideduksi atau dijabarkan dari suatu sistem gagasan filsafat umum (Metafisika, Epistemologi, Aksiologi) yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Hal ini dapat dipahami sebagaimana disajikan oleh Callahan and Clark (1983) dalam karyanya "Foundations of Education", dan sebagaimana disajikan Edward J. Power (1982) dalam karyanya *Philosophy of Education, Studies in Philosophies, Schooling and Educational Policies.*

Berdasarkan kedua sumber di atas dapat Anda pahami bahwa terdapat hubungan implikasi antara gagasan-gagasan dalam cabang-cabang filsafat umum terhadap gagasan-gagasan pendidikan. Hubungan implikasi antara gagasan-gagasan dalam cabang-cabang filsafat umum terhadap gagasan pendidikan tersebut dapat divisualisasikan seperti berikut ini:

Gambar 1. Implikasi Konsep Filsafat Umum Terhadap Konsep Pendidikan

Konsep Filsafat Umum		**Konsep Pendidikan**
Hakikat relitas		Tujuan pendidikan
Hakikat manusia	→	Kurikulum pendidikan
Hakikat pengetahuan		Metode pendidikan
Hakikat nilai		Peranan pendidikan dan peserta didik
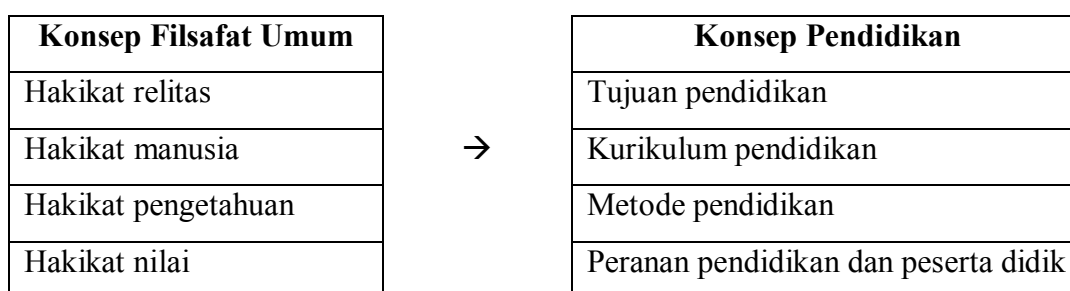
Karakteristik Landasan Filosofis Pendidikan. Landasan filosofis pendidikan berisi tentang gagasan-gagasan atau konsep-konsep yang bersifat *normatif* atau *preskriptif.* Landasan filosofis pendidikan dikatakan bersifat normatif atau preskriptif, sebab landasan filosofis pendidikan tidak berisi konsep-konsep tentang pendidikan apa adanya (faktual), melainkan berisi tentang konsep-konsep pendidikan yang seharusnya atau yang dicita-citakan (ideal), yang disarankan oleh filsuf tertentu untuk dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan/atau studi pendidikan.

Aliran dalam Landasan Filosofis Pendidikan. Sebagaimana halnya di dalam filsafat umum, di dalam landasan filsafat pendidikan juga terdapat berbagai aliran. Sehubungan dengan ini dikenal adanya landasan filosofis pendidikan Idealisme, landasan filosofis pendidikan Realisme, landasan filosofis pendidikan Pragmatisme, dsb.

C. Aliran-aliran filosofis pendidikan

Secara umum ada beberapa aliran filsafat pendidikan yang menjadi dasar filosofis pendidikan diantaranya ialah: idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme, progresivisme, esensialisme, perenilisme, rekonstruksionisme, dan behaviorisme. Namun dalam makalah ini akan dibahas tiga diantaranya yang sering menjadi acuan yakni idealism, realism, dan pragmatism. Kemudian ditambah dengan pembahasan filosofis pendidikan nasional Negara .

1. Landasan filosofis pendidikan Idealisme

Plato adalah tokoh pertama yang mencetuskan ide idealisme. Tokoh-tokoh yang mendukung aliran idealisme yaitu Georg W. F. Hegel yang berasal dari Jerman pada abad 19, Ralph Waldo Emerson (1803-1882), Henry David T. (1817-1862) dan Friedrich Froebel. Penganut Idealisme selanjutnya disebut sebagai Idealis.

Ornstein menyatakan bahwa idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Idealisme memandang realitas sebagai hal yang ada dalam kehidupan alam bukanlah suatu kebenaran yang hakiki, melainkan hanya sebatas gambaran dari ide-ide yang ada didalam jiwa manusia. Idealisme merupakan aliran filsafat yang berpendapat bahwa objek pengetahuan yang sebenarnya adalah ide (idea) bahwa ide-ide ada sebelum keberadaan sesuatu yang lain, bahwa ide-ide merupakan dasar dari keadaan sesuatu. Idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri dari ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau jiwa dan bukan benda material dan kekuatan. Idealisme juga mengatakan bahwa akal itulah yang riil.[4]

a. Konsep Filsafat Umum

1) *Metafisika (Hakikat Realitas)*. Di alam semesta dapat kita temukan berbagai hal, seperti batu, air, tumbuhan, khewan, manusia, gunung, lautan, speda motor, buku, kursi, tata surya, dsb. Selain itu, kita juga mengenal apa yang disebut jiwa, spirit, ide, dsb. Segala hal yang ada di alam semesta itu disebut realitas *(reality)*. Sesuai dengan sifat berpikirnya yang radikal, para filsuf mempertanyakan apakah sesungguhnya (hakikat) realitas itu? Jawaban mereka berbeda-beda sesuai dengan titik tolak berpikir, cara berpikir dan tafsirnya masing-masing.

   Menurut para filsuf Idealisme, hakikat realitas bersifat spiritual daripada bersifat fisik, atau bersifat mental daripada bersifat material. Hal

[4] Ornstein,. Et al. 2011. *The Philosophy of Education and Work*. New York: McGraw Hill Education, hal.170.

ini sebagaimana dikemukakan Plato, bahwa dunia yang kita lihat, kita sentuh dan kita alami melalui indera bukanlah dunia yang sesungguhnya, melainkan suatu dunia bayangan *(a copy world);* dunia yang sesungguhnya adalah dunia idea-idea *(the world of "ideas").* Karena itu Plato disebut sebagai seorang Idealist (S.E. Frost Jr., 1957).

Menurut penganut Idealisme, realitas diturunkan dari suatu substansi fundamental, yaitu pikiran/spirit/roh. Benda-benda yang bersifat material yang tampak nyata, sesungguhnya diturunkan dari pikiran/jiwa/roh. Contoh: Kursi yang sesungguhnya bukanlah bersifat material, sekalipun Anda menemukan kursi yang tampak bersifat material, namun hakikat kursi adalah spiritual/ideal, yaitu ide tentang kursi. Pada tingkat universal (alam semesta), pikiran-pikiran yang terbatas hidup dalam suatu dunia yang bertujuan yang dihasilkan oleh suatu pikiran yang tak terbatas atau yang Absolut. Seluruh alam semesta diciptakan oleh suatu pikiran atau roh yang tak terbatas. Karena itu, segala sesuatu dan kita (manusia) merupakan bagian kecil dari pikiran atau roh yang tak terbatas (Callahan and Clark, 1983). Pandangan metafisika Idealisme diekspresikan Parmenides dengan kalimat: *"What cannot be thought cannot be real"/ Apa yang tidak dapat dipikirkan tidaklah nyata.* Schoupenhauer mengekspresikannya dengan pernyataan *"The world is my idea"* / Dunia adalah ideku (G.F. Kneller, 1971). Sebab itu, keberadaan (eksistensi) sesuatu tergantung kepada pikiran/jiwa/spirit/roh.

Hakikat Manusia. Sejalan dengan gagasan di atas, menurut para filsuf Idealisme bahwa manusia hakikatnya bersifat spiritual atau kejiwaan. Pribadi manusia digambarkan dengan kemampuan kejiwaannya (seperti: kemampuan berpikir, kemampuan memilih, dsb). Manusia hidup dalam dunia dengan suatu aturan moral yang jelas – yang diturunkan dari Yang Absolut. Karena manusia merupakan bagian dari alam semesta yang bertujuan, maka manusia pun merupakan makhluk yang cerdas dan bertujuan. Selain itu, karena "pikiran manusia diberkahi kemampuan rasional, maka ia mempunyai kemampuan untuk menentukan pilihan, ia adalah makhluk yang bebas" (Edward J. Power, 1982).

Hakikat manusia bersifat spiritual atau kejiwaan. Berkenaan dengan ini setiap manusia memiliki bakat kemampuannya masing-masing

yang mengimplikasikan status atau kedudukan dan peranannya di dalam masyarakat/negara. Kita ambil contoh dari teori Plato tentang tiga bagian jiwa *(Plato's tripartite theory of the soul)*: Menurut Plato, setiap manusia memiliki tiga bagian jiwa, yaitu: *nous* (akal, fikiran) yang merupakan bagian rasional, *thumos* (semangat atau keberanian), dan *epithumia* (keinginan, kebutuhan atau nafsu). Pada setiap orang, dari ketiga bagian jiwa tersebut akan muncul salah satunya yang dominan. Sehingga: pertama, ada orang yang dominan bakat kemampuan berpikirnya; kedua, ada yang dominan keberaniannya, dan ketiga ada yang dominan keinginan/nafsunya. Atas dasar ini, Plato mengklasifikasi manusia di dalam negara berdasarkan bakat kemampuannya tersebut, yaitu: pertama, kelas *counselors* (kelas penasihat atau pembimbing / pemimpin), yaitu para cendekiawan atau para filsuf; kedua, kelas *the state-assistants* / *guardians* (kelas pembantu/penjaga) yaitu kelompok militer; dan ketiga, kelas *money makers* (kelas karya/penghasil) yaitu para petani, pengusaha, industrialis, dsb. Namun demikian klasifikasi manusia tersebut bukanlah kasta yang secara turun temurun tidak dapat berubah. Apabila seseorang dari kelas tertentu - misalnya: dari kelas karya - ternyata memiliki bakat yang sesuai dengan bakat dalam kelas penjaga atau pembimbing, maka ia harus segera pindah ke kelas yang sesuai dengan bakatnya itu, demikian pula sebaliknya. Selain itu, Plato menghubungkan ketiga bagian jiwa manusia dengan empat kebajikan pokok *(cardinal virtues)* sebagai moralitas jiwa *(soul's morality)*, yaitu: kebijaksanaan/kearifan, keperkasaan, pengendalian diri, dan keadilan. Pikiran/akal dihubungkan dengan kebijaksanaan/kearifan yang harus menjadi moralitas jiwa kelas counselor/ pembimbing/ pemimpin; keberanian dihubungkan dengan keperkasaan yang harus menjadi moralitas jiwa kelas militer / penjaga *(guardians)*, nafsu dihubungkan dengan pengendalian diri yang harus menjadi moralitas jiwa kelas karya/penghasil.Adapun keadilan harus menjadi moralitas jiwa semua orang dari kelas manapun agar keselarasan dan kesimbangan tetap terpelihara dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas dapat Anda simpulkan bahwa hakikat manusia bukanlah badannya, melainkan jiwa/spiritnya, manusia adalah

makhluk berpikir, mampu memilih atau bebas, hidup dengan suatu aturan moral yang jelas dan bertujuan. Tugas dan tujuan hidup manusia adalah hidup sesuai dengan bakatnya serta nilai dan norma moral yang diturunkan oleh Yang Absolut.

2) *Epistimologi (Hakikat Pengetahuan).* Proses mengetahui terjadi dalam pikiran, manusia memperoleh pengetahuan melalui *berpikir.* Di samping itu, manusia dapat pula memperoleh pengetahuan melalui *intuisi.* Bahkan beberapa filsuf Idealisme percaya bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara *mengingat kembali* (semua pengetahuan adalah sesuatu yang diingat kembali). Plato adalah salah seorang penganut pandangan ini. Ia sampai pada kesimpulan tersebut berdasarkan asumsi bahwa spirit/jiwa manusia bersifat abadi, yang mana pengetahuan sudah ada di dalam spirit/jiwa sejak manusia dilahirkan.

Bagi penganut *Idealisme Objective* seperti Plato, ide-ide merupakan esensi yang keberadaannya bebas dari pendirian. Sedangkan bagi penganut *Idealisme Subjective* seperti George Barkeley, bahwa manusia hanya dapat mengetahui dengan apa yang ia persepsi. Karena itu, pengetahuan manusia hanyalah merupakan keadaan dari pikirannya atau idenya. Adapun setiap rangsangan yang diterima oleh pikiran hakikatnya diturunkan atau bersumber dari Tuhan, Tuhan adalah Spirit Yang Tak Terbatas (Callahan and Clark, 1983).

Sehubungan dengan hal di atas, kebenaran (pengetahuan yang benar) hanya mungkin didapat oleh orang-orang tertentu yang memiliki pikiran yang baik saja, sedangkan kebanyakan orang hanya sampai pada tingkat pendapat" (Edward J. Power, 1982). Adapun uji kebenaran pengetahuan dilakukan melalui uji konsistensi atau koherensi dari ide-idenya. Sebab itu teori uji keberanannya dikenal sebagai *Teori Konsistensi/Teori Koherensi.* Contoh: "Semua makhluk bersifat fana (dapat rusak atau mati), Iqbal adalah makhluk, sebab itu Iqbal akan mati". Pengetahuan ini adalah benar, sebab ide-idenya koheren atau konsisten. "Jalan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat, Amin bunuh diri dengan jalan memutuskan urat nadinya, karena itu Amin telah membunuh jalannya perekonomian masyarakat". Pengetahuan ini adalah salah, sebab ide-idenya tidak konsisten/tidak koheren.

3) *Aksiologi (Hakikat Nilai)*. Para filsuf Idealisme sepakat bahwa nilai-nilai bersifat abadi. Menurut penganut *Idealisme Theistik* nilai-nilai abadi berada pada Tuhan. Baik dan jahat, indah dan jelek diketahui setingkat dengan ide baik dan ide indah konsisten dengan baik dan indah yang absolut dalam Tuhan. Penganut *Idealisme Pantheistik* mengidentikan Tuhan dengan alam. Nilai-nilai adalah absolut dan tidak berubah (abadi), sebab nilai-nilai merupakan bagian dari aturan-aturan yang sudah ditentukan alam (Callahan and Clark, 1983). Sebab itu dapat Anda simpulkan bahwa manusia diperintah oleh nilai-nilai moral imperatif dan abadi yang bersumber dari Realitas Yang Absolut.

b. Implikasi terhadap Pendidikan

1) *Tujuan Pendidikan*. Tujuan pendidikan adalah untuk membantu perkembangan pikiran dan diri pribadi *(self)* siswa. Sebab itu, sekolah hendaknya menekankan aktifitas-aktifitas intelektual, pertimbangan-pertimbangan moral, pertimbangan-pertimbangan estetis, realisasi diri, kebebasan, tanggung jawab, dan pengendalian diri demi mencapai perkembangan pikiran dan diri pibadi (Callahan and Clark, 1983). Dengan kata lain, pendidikan bertujuan untuk membantu pengembangan karakter serta mengembangkan bakat manusia dan kebajikan sosial" (Edward J. Power, 1982). Mengingat bakat manusia berbeda-beda maka pendidikan yang diberikan kepada setiap orang harus sesuai dengan bakatnya masing-masing sehingga kedudukan, jabatan, fungsi dan tangung jawab setiap orang di dalam masyarakat/negara menjadi teratur sesuai asas *"the right man on the right place"* , dan lebih jauh dari itu agar manusia hidup sesuai nilai dan norma yang diturunkan dari Yang Absolut.

2) Kurikulum Pendidikan. Demi mencapai tujuan pendidikan di atas, kurikulum pendidikan Idealisme berisikan *pendidikan liberal* dan *pendidikan vokasional/praktis*. Pendidikan liberal dimaksudkan untuk pengembangan kemampuan-kemampuan rasional dan moral, adapun pendidikan vokasional untuk pengebangan kemampuan suatu kehidupan/pekerjaan. Kurikulumnya diorganisasi menurut mata pelajaran dan berpusat pada materi pelajaran *(subject matter centered)*. Karena masyarakat dan Yang Absolut mempunyai peranan menentukan bagaimana seharusnya individu hidup, maka isi kurikulum tersebut harus

merupakan nilai-nilai kebudayaan yang esensial dalam segala zaman. Sebab, itu, mata pelajaran atau kurikulum pendidikan itu cenderung berlaku sama untuk semua siswa. Dengan demikian Callahan dan Clark (1983) menyatakan bahwa orientasi pendidikan Idealisme adalah *Essensialisme.*

3) *Metode Pendidikan.* Struktur dan atmosfir kelas hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir, dan untuk menggunakan kriteria penilaian moral dalam situasi-situasi kongkrit dalam konteks pelajaran. Namun demikian, tidak cukup mengajar siswa tentang bagaimana berpikir, adalah sangat penting bahwa apa yang siswa pikirkan menjadi kenyataan dalam perbuatan.

   Metode mengajar hendaknya mendorong siswa memperluas cakrawala; mendorong berpikir reflektif; mendorong pilihan-pilihan moral pribadi, memberikan keterampilan-keterampilan berpikir logis; memberikan kesempatan menggunakan pengetahuan untuk masalah-masalah moral dan sosial; meningkatkan minat terhadap isi mata pelajaran; dan mendorong siswa untuk menerima nilai-nilai peradaban manusia (Callahan and Clark, 1983). Sebagaimana dikemukakan Edward J. Power (1982), para filsuf Idealisme "lebih menyukai metode *dialektik*, tetapi beberapa metode yang efektif yang mendorong belajar dapat diterima. Metode pendidikan Idealisme cenderung mengabaikan dasar-dasar fisiologis dalam belajar".

4) *Peranan Guru dan Siswa.* Para filsuf Idealisme mempunyai harapan yang tinggi dari para guru. Guru harus unggul *(excellent)* agar menjadi teladan bagi para siswanya, baik secara moral maupun intelektual. Tidak ada satu unsur pun yang lebih penting di dalam sistem sekolah selain guru. Guru harus unggul dalam pengetahuan dan memahami kebutuhan-kebutuhan serta kemampuan-kemampuan para siswa; dan harus mendemonstrasikan keunggulan moral dalam keyakinan dan tingkah lakunya. Guru harus juga melatih berpikir kreatif dalam mengembangkan kesempatan bagi pikiran siswa untuk menemukan, menganalisis, memadukan, mensintesa, dan menciptakan aplikasi- aplikasi pengetahuan untuk hidup dan berbuat (Callahan and Clark, 1983). Karena itu guru hendaknya bertanggung jawab menciptakan lingkungan pendidikan bagi

para siswa. Adapun siswa berperan bebas mengembangkan kepribadian dan bakat-bakatnya (Edward J. Power, 1982).

2. Landasan filosofis pendidikan Realisme

Gagasan realisme terlacak dimulai sebelum periode abad masehi dimulai, yaitu dalam pemikiran murid Plato bernama Aristoteles (384-322 SM). Sebgai murid Plato, sedikit banyak Aristoteles tentu saja memiliki pemikiran yang sangat dipengaruhi Plato dalam berfilsafat. Dalam keterpengaruhanya, aristoteles memiliki suatu perbedaan pemikiran yang membuatnya menjadi berbeda dengan Plato.

Realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi diluar kesadaran ada sebagai suatu yang nyata dan penting untuk dikenal dengan mempergunakan kemampuan intelektual yang dimiliki manusia.Menurut realisme hakikat kebenaran itu barada pada kenyataan alam ini, bukan pada ide atau jiwa.

Dalam arti filsafat yang sempit, realisme berarti anggapan bahwa obyek indra kita adalah real, benda-benda ada, adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui, atau kita persepsikan atau ada hubungannya dengan pikiran kita.

Menurut realis alam itu hal utama, dan satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah: menjalin hubungan yang baik dengan alam. Kelompok realis berusaha untuk melakukan hal ini, bukan untuk menafsirkan berdasarkan keinginan atau kepercayaan yang belum diuji kebenarannya. Realisme adalah aliran yang menyatakan bahwa objek – objek yang diketahui adalah nyata dalam dirinya sendiri. Objek – objek tersebut tidak bergantung pada pikiran. Pikiran dan lingkungan sekitar saling berinteraksi.[5]

a. Konsep Filsafat Umum

Terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa Realisme merupakan aliran filsafat yang luas dan bervariasi. Di satu pihak, Realisme meliputi materialisme; di lain pihak, Realisme juga meliputi pandangan yang mendekati kepada idealisme. Titus dkk., (1979) antara lain mengidentifikasi tiga jenis Realisme, yaitu Realisme Mekanis, Realisme Objektif, dan Realisme Pluralistik. Tampak bahwa Realisme cukup rumit untuk bisa dijelaskan secara ringkas dengan harapan mencakup semua jenis Realisme yang ada.

---

[5] Tim dosen filsafat UGM. 2003. *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Liberty, hal.39.

Sehubungan dengan hal di atas, dalam rangka memahami filsafat pendidikan Realisme, uraian di bawah ini hanya akan menyajikan ide-ide umum filsuf Realisme sebagaimana telah diuraikan oleh Calahan and Clark dalam karyanya *"Foundations of Education"* .

1) Metafisika (*Hakikat Realitas)*. Jika filsuf Idealisme menekankan pikiran/jiwa/spirit/roh sebagai hakikat realitas, sebaliknya menurut para filsuf Realisme bahwa dunia terbuat dari sesuatu yang nyata, substansial dan material yang hadir dengan sendirinya *(entity)*. Di dunia atau di alam tersebut terdapat hukum-hukum alam yang menentukan keteraturan dan keberadaan setiap yang hadir dengan sendirinya dari alam itu sendiri (Callahan and Clark, 1983). Realitas hakikatnya bersifat objektif, artinya bahwa realitas berdiri sendiri, tidak tergantung atau tidak bersandar kepada pikiran/jiwa/spirit/roh. Namun demikian, mereka tetap mengakui keterbukaan realitas terhadap pikiran untuk dapat mengetahuinya. Hanya saja realitas atau dunia itu bukan/berbeda dengan pikiran atau keinginan manusia.

   Hakikat Manusia. Manusia adalah bagian dari alam, dan ia muncul di alam sebagai hasil puncak dari mata rantai evolusi yang terjadi di alam. Hakikat manusia didefinisikan sesuai dengan apa yang dapat dikerjakannya. Pikiran (jiwa) adalah suatu organisme yang sangat rumit yang mampu berpikir. Namun, sekalipun manusia mampu berpikir ia bisa bebas atau tidak bebas (Edward J. Power, 1982). Manusia dan masyarakat adalah bagian dari alam. Karena di alam semesta terdapat hukum alam yang mengatur dan mengorganisasikannya, maka untuk tetap survive dan bahagia tugas dan tujuan manusia adalah menyesuaikan diri terhadap hukum-hukum alam, masyarakatnya dan kebudayaannya.

2) Epistemologi: *Hakikat Pengetahuan*. Ketika lahir, jiwa atau pikiran manusia adalah kosong. Saat dilahirkan manusia tidak membawa pengetahuan atau ide-ide bawaan, John Locke mengibaratkan pikiran/jiwa manusia sebagai *tabula rasa* (meja lilin/kertas putih yang belum ditulisi). Pengetahuan diperoleh manusia bersumber dari pengalaman indra. Manusia dapat menggunakan pengetahuannya dalam berpikir untuk menemukan objek-objek serta hubungan-hubungannya yang tidak ia persepsi (Callahan and Clark, 1983). Mengingat realitas bersifat objektif, maka terdapat dualisme

antara orang yang mengetahui dengan realitas yang diketahui. Implikasinya, para filsuf Realisme menganut *"prinsip independensi"* yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia tentang realitas tidak dapat mengubah substansi atau esensi realitas.

Karena realitas bersifat material dan nyata, maka kebenaran pengetahuan diuji dalam kesesuaiannya dengan fakta di dalam dunia material atau pengalaman dunia. Teori uji kebenaran ini dikenal sebagai *Teori Korespondensi.* Contoh: Apabila seseorang mengatakan bahwa rasa gula adalah manis, untuk mengetahui kebenaran pengetahuan/pernyataan tersebut harus diuji melalui pengalaman, misalnya dengan mencicipi gula. Jika dari pengalaman mencicipi gula ternyata gula itu rasanya manis, maka pengetahuan itu benar. Atas dasar prinsip independensi dan teori korespondensi, maka pengetahuan mungkin saja berubah. Apa yang dulu dinyatakan benar mungkin saat ini dinyatakan salah, atau mungkin pula sebaliknya sesuai dengan hasil pengalaman empiris yang didapat. Sebab itu, epistemologi demikian dikenal pula sebagai *Empirisme* atau *Objektivisme.*

3) Aksiologi: *Hakikat Nilai*. Karena manusia adalah bagian dari alam, maka ia pun harus tunduk kepada hukum-hukum alam, demikian pula masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan Edward J. Power (1982) bahwa: "Tingkah laku manusia diatur oleh hukum alam, dan pada tingkat yang lebih rendah diuji melalui konvensi atau kebiasaan, dan adat istiadat di dalam masyarakat". "Nilai-nilai individual dapat diterima apabila sesuai dengan nilai-nilai umum masyarakatnya. Pendapat umum masyarakat merefleksikan status quo realitas masyarakat; dan karena realitas masyarakat merepresentasikan kebenaran yang adalah ke luar dari mereka sendiri, serta melebihi pikiran, maka hal itu berguna sebagai suatu standar untuk menguji validitas nilai-nilai individual" (Callahan and Clark, 1983).

b. Implikasi terhadap Pendidikan

1) *Tujuan Pendidikan*. Pendidikan pada dasarnya bertujuan agar para siswa dapat bertahan hidup di dunia yang bersifat alamiah, memperoleh keamanan dan hidup bahagia. Dengan jalan memberikan pengetahuan yang *esensial* kepada para siswa, maka mereka akan dapat bertahan hidup di dalam lingkungan alam dan sosialnya. Pengetahuan tersebut akan memberikan

keterampilan-keterampilan yang penting untuk memperoleh keamanan dan hidup bahagia. Edward J. Power (1982) menyimpulkan pandangan para filsuf Realisme bahwa tujuan pendidikan Realisme adalah untuk ”penyesuaian diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial”.

2) *Kurikulum Pendidikan.* Kurikulum sebaiknya meliputi: (1) sains/IPA dan matematika, (2) Ilmu-ilmu kemanusiaan dan ilmu-ilmu sosial, serta (3) nilai-nilai.

Sains dan matematika sangat dipentingkan. Keberadaan sains dan matematika dipertimbangkan sebagai lingkup yang sangat penting dalam belajar. Sebab, pengetahuan tentang alam memungkinkan umat manusia untuk dapat menyesuaikan diri serta tumbuh dan berkembang dalam lingkungan alamnya. Ilmu kemanusiaan tidak seharusnya diabaikan, sebab ilmu kemanusiaan diperlukan setiap individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Kurikulum hendaknya menekankan pengaruh lingkungan sosial terhadap kehidupan individu. Dengan mengetahui kekuatan yang menentukan kehidupan kita, kita berada dalam posisi untuk mengendalikan mereka (lingkugan sosial). Nilai-nilai dari objektifitas dan pengujian kritis yang bersifat ilmiah hendaknya ditekankan. Ketika mengajarkan nilai-nilai, sebaiknya tidak menggunakan satu metode yang normatif, tetapi menggunakan analisis kritis. Untuk mendorong kebiasaan-kebiasaan belajar yang diharapkan, ganjaran hendaknya diberikan ketika kebiasaan- kebiasaan yang diharapkan dicapai (Callahan and Clark, 1983).

Para filsuf Realisme percaya bahwa kurikulum yang baik diorganisasi menurut mata pelajaran dan berpusat pada materi pelajaran *(subject matter centered).* Materi pelajaran hendaknya diorganisasi menurut prinsip-prinsip psikologis tentang belajar, mengajarkan materi pelajaran hendaknya dimulai dari yang bersifat sederhana menuju yang lebih kompleks. Karena masyarakat dan alam (hukum-hukum alam) mempunyai peranan menentukan bagaimana seharusnya individu hidup untuk menyesuaikan diri dengannya, maka kurikulum direncanakan dan diorganisasikan oleh guru/orang dewasa *(society centered).* Adapun isi kurikulum (mata pelajaran-mata pelajaran) tersebut harus berisi pengetahuan dan nilai-nilai *esensial* agar siswa dapat menyesuaikan diri

baik dengan lingkungan alam, masyarakat dan kebudayaannya. Sebab itu Callahan dan Clark (1983) menyatakan bahwa orientasi pendidikan Realisme memiliki *kesamaan* dengan orientasi pendidikan Idealisme, yaitu *Essensialisme*.

3) *Metode Pendidikan*. "Semua belajar tergantung pada pengalaman, baik pengalaman langsung maupun tidak langsung (seperti melalui membaca buku mengenai hasil pengalaman orang lain), kedua-duanya perlu disajikan kepada siswa. Metode penyajian hendaknya bersifat logis dan psikologis. *Pembiasaan* merupakan metode utama yang diterima oleh para filsuf Realisme yang merupakan penganut *Behaviorisme*" (Edward J. Power, 1982). Metode mengajar yang disarankan para filosof Realisme bersifat *otoriter*. Guru mewajibkan para siswa untuk dapat menghafal, menjelaskan, dan membandingkan fakta-fakta; mengiterpretasi hubungan-hubungan, dan mengambil kesimpulan makna-makna baru.

   Evaluasi merupakan suatu aspek yang penting dalam mengajar. Guru harus mengunakan metode-metode objektif dengan mengevaluasi dan memberikan jenis-jenis tes yang memungkinkan untuk dapat mengukur secara tepat pemahaman para siswa tentang materi-materi yang dianggap esensial. Tes perlu sering dilakukan. Untuk tujuan memotivasi, para filsuf Realisme menekankan bahwa tes selalu penting bagi guru untuk memberikan ganjaran terhadap setiap siswa yang mencapai sukses. Ketika guru melaporkan prestasi para siswanya, ia menguatkan *(reinforces)* apa yang mesti dipelajari (Callahan and Clark, 1983).

4) *Peranan Guru dan Siswa*. Guru adalah pengelola kegiatan belajar-mengajar di dalam kelas *(classroom is teacher-centered);* guru adalah penentu materi pelajaran; guru harus menggunakan minat siswa yang berhubungan dengan mata pelajaran, dan membuat mata pelajaran sebagai sesuatu yang kongkrit untuk dialami siswa. Para siswa memperoleh disiplin melalui ganjaran dan prestasi, mengendalikan perhatian para siswa, dan membuat siswa aktif (Callahan and Clark, 1983). Dengan demikian guru harus berperan sebagai "penguasa pengetahuan; menguasai keterampilan teknik-teknik mengajar; dengan kewenangan *membentuk* prestasi siswa". Adapun siswa berperan untuk "menguasai pengetahuan yang diandalkan; siswa harus taat pada aturan dan berdisiplin, sebab aturan yang baik sangat diperlukan untuk

belajar, disiplin mental dan moral dibutuhkan untuk berbagai tingkatan keutamaan" (Edward J. Power, 1982).

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa orientasi pendidikan Realisme memiliki *kesamaan* dengan orientasi pendidikan Idealisme, yaitu *Essensialisme*. Pendidikan Idealisme dan Realisme sama-sama menekankan pentingnya memberikan pengetahuan dan nilai-nilai esensial bagi para siswa. Namun demikian, karena kedua aliran tersebut memiliki perbedaan konsep mengenai filsafat umumnya (hakikat: realitas, pengetahuan, manusia,dan nilai-nilai) yang menjadi landasan bagi konsep pendidikannya, maka dapat dipahami pula jika kedua aliran itu tetap berbeda dalam hal tujuan pendidikannya, kurikulum pendidikannya, metode pendidikan, serta peranan guru dan peranan siswanya.

3. Landasan Filosofis Pendidikan Pragmatisme

Pragmatisme adalah aliran filsafat modern yang lahir di Amerika akhir abad 19 hingga awal abad 20. Filsafat ini cendrung lebih banyak mengabaikan hal-hal yang bersifat metafisik tradisional dan lebih banyak terarah pada hal-hal yang pragmatis kehidupan. Pragmatisme lahir ditengah-tengah situasi sosial amerika yang dilanda berbagai problem terkait dengan kuat dan masifnya urbanisasi dan industrialisasi.

Pada dasarnya, pragmatisme merupakan suatu sikap hidup, suatu metode dan suatu filsafat yang digunakan dalam mempertimbangkan nilai sesuatu ide dan kebenaran sesuatu keyakinan secara praktis. Esensi diri pragmatisme ini terletak pada metodenya yang sangat empiris dimana sangat menekankan pada metode dan sikap lebih dari suatu doktrin filsafat yang sistematis dan menggunakan metode ilmu pengetahuan modern sebagai dasar dari suatu filsafat.

Tekanan utama pragmatisme dalam pendidikan selalu dilandaskan bahwa subjek didik bukanlah objek, melainkan subjek yang memiliki pengalaman. Setiap subjek didik tidak lain adalah individu yang mengalami sehingga mereka berkembang, serta memiliki inisiatif dalam mengatasi problem-problem hidup yang mereka miliki.

Dalam pelaksanaannya, pendidikan pragmatisme mengarahkan agar subjek didik saat belajar disekolah tak berbeda ketika ia berada diluar seolah. Oleh karenanya, kehidupan disekolah selalu disadari sebagai bagian dari pengalama hidup, bukan bagian dari persiapan untuk menjalani hidup.

Dalam pendidikan pragmatisme guru menjadi pendamping subjek didik yang dipandang jauh lebih memiliki pengalaman dalam menghadapi berbagai problem. Ia menjadi pengarah atau pemandu aktivitas-aktivitas subjek didik diluar hal-hal yang dibutuhkan mereka, dengan pertimbangan-pertimbangan dan pengalaman yang lebih luas.

a. Konsep Filsafat Umum

1) Metafisika (*Hakikat Realitas)*. Aliran filsafat Pragmatisme dikenal pula dengan sebutan Eksperimentalisme dan Instrumentalisme. Menurut penganut Pragmatisme hakikat realitas adalah segala sesuatu yang dialami manusia (pengalaman); bersifat plural *(pluralistic);* dan terus menerus berubah. Mereka berargumentasi bahwa realitas adalah sebagaimana dialami melalui pengalaman setiap individu (Callahan and Clark, 1983). Hal ini sebagaimana dikemukakan William James bahwa: "Dunia nyata adalah dunia pengalaman manusia" (S.E. Frost Jr., 1957). Sifat plural realitas antara lain tersurat dalam pernyataan John Dewey: "Dunia yang ada sekarang ini adalah dunia pria dan wanita, sawah-sawah, pabrik-pabrik, tumbuhan-tumbuhan dan binatang-binatang, kota yang hiruk pikuk, bangsa-bangsa yang sedang berjuang, dsb. …. adalah dunia pengalaman kita" (H.H. Titus et all, 1959). Mengingat realitas ini terus berubah, maka realitas tak pernah lengkap atau tak pernah selesai. Sebab itu, tujuan akhir realitas pun berada bersama perubahan tersebut. Jadi menurut penganut Pragmatisme, "hanya realitas fisik yang ada, teori umum tentang realitas tidak mungkin dan tidak diperlukan" (Edward J. Power, 1982).

   Hakikat Manusia. Kepribadian/manusia tidak terpisah dari realitas pada umumnya, sebab manusia adalah bagian daripadanya dan terus menerus bersamanya. Karena realitas terus berubah, manusia pun merupakan bagian dari perubahan tersebut. Beradanya manusia di dunia adalah suatu kreasi dari suatu proses yang bersifat evolusi (S.E. Frost Jr., 1957). "Manusia laki-laki dan perempuan – adalah hasil evolusi biologis, psikologis, dan sosial" (Edward J. Power, 1982). Sejalan dengan perubahan yang terus menerus terjadi tentunya akan muncul berbagai permasalahan dalam kehidupan pribadi dan masyarakatnya. Sebab itu , manusia yang ideal adalah manusia yang mampu memecahkan masalah baru baik dalam

kehidupan pribadi maupun masyarakatnya.

2) Epistemologi (*Hakikat Pengetahuan)*. Filsuf Pragmatisme menolak dualisme antara subjek (manusia) yang mempersepsi dengan objek yang dipersepsi. Manusia adalah kedua-duanya dalam dunia yang dipersepsinya dan dari dunia yang ia persepsi. Segala sesuatu dapat diketahui melalui pengalaman, adapun cara-cara memperoleh pengetahuan yang diandalkan adalah metode ilmiah atau metode sains sebagai mana disarankan oleh John Dewey. Pengalaman tentang fenomena menentukan pengetahuan. Karena fenomena terus menerus berubah, maka pengetahuan dan kebenaran tentang fenomena itu pun mungkin berubah. Bagaimanapun, kebenaran pada hari ini harus juga dipertimbangkan mungkin berubah esok hari (Callahan and Clark, 1983).

   Menurut filsuf Pragmatisme, suatu pengetahuan hendaknya dapat diverifikasi dan diaplikasikan dalam kehidupan. Adapun kriteria kebenarannya adalah *workability, satisfaction, and result*. Pengetahuan dinyatakan benar apabila dapat dipraktekkan, memberikan hasil dan memuaskan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa "pengetahuan bersifat relatif; pengetahuan dikatakan bermakna apabila dapat diaplikasikan. Sebab itu Pragmatisme dikenal pula sebagai *Instrumentalisme*" (Edward J. Power, 1982).

3) Aksiologi (*Hakikat Nilai)*. Nilai-nilai diturunkan dari kondisi manusia. Nilai tidak bersifat ekslusif, tidak berdiri sendiri, melainkan ada dalam suatu proses, yaitu dalam tindakan/perbuatan manusia itu sendiri. Karena manusia (idividual) merupakan bagian dari masyarakatnya, baik atau tidak baik tindakan-tindakannya dinilai berdasarkan hasil- hasilnya di dalam masyarakat. Jika akibat yang terjadi *berguna* bagi dirinya dan masyarakatnya, maka tindakan tersebut adalah *baik.* Nilai etika dan estetika tergantung pada keadaan relatif dari situasi yang terjadi. Nilai-nilai akhir (*ultimate values*) tidaklah ada, benar itu selalu *relatif* dan tergantung pada kondisi yang ada *(conditional).* Pertimbangan-pertimbangan nilai adalah berguna jika bermakna untuk kehidupan yang intelegen, yaitu hidup yang sukses, produktif, dan bahagia (Callahan and Clark, 1983). Karena itu alira ini dikenal sebagai *Pragmatisme* atau *Eksperimentalisme*.

b. Implikasi terhadap Pendidikan

1) *Tujuan Pendidikan*. Pendidikan harus mengajarkan seseorang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Sekolah harus bertujuan mengembangkan pengalaman-pengalaman tersebut yang akan memungkinkan seseorang terarah kepada kehidupan yang baik. Tujuan-tujuan tersebut meliputi:
   a) Kesehatan yang baik.
   b) Ketrampilan-keterampilan kejuruan (pekerjaan).
   c) Minat-minat dan hobi-hobi untuk kehidupan yang menyenangkan.
   d) Persiapan untuk menjadi orang tua.
   e) Kemampuan untuk bertransaksi secara efektif dengan masalah-masalah sosial (mampu memecahkan masalah-masalah sosial secara efektif).

   Tujuan-tujuan khusus pendidikan sebagai tambahan tujuan di atas, bahwa pendidikan harus meliputi *pemahaman tentang pentingnya demokrasi.* Pemerintahan yang demokratis memungkinkan setiap warga negara tumbuh dan hidup melalui interaksi sosial yang memberikan tempat bersama dengan warga negara yang lainnya. Pendidikan harus membantu siswa menjadi warga negara yang unggul dalam demokrasi atau menjadi warga negara yang demokratis (Callahan and Clark, 1983). Karena itu menurut Pragmatisme pendidikan hendaknya bertujuan menyediakan pengalaman untuk menemukan/memecahkan hal-hal baru dalam kehidupan pribadi dan sosialnya (Edward J. Power, 1982).

2) *Kurikulum Pendidikan*. Menurut para filsuf Pragmatisme, tradisi demokratis adalah tradisi memperbaiki diri sendiri *(a self-correcting tradition)*. Implikasinya warisan-warisan sosial budaya dari masa lalu tidak menjadi fokus perhatian pendidikan. Melainkan, pendidikan terfokus kepada kehidupan yang baik pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Standar kebaikan sosial diuji secara terus-menerus dan diverifikasi melalui pengalaman-pengalaman yang berubah. Pendidikan harus dilaksanakan untuk memelihara demokrasi. Sebab hakikat demokrasi adalah dinamika dan perubahan sebagai hasil rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus berlangsung. Namun demikian, rekonstruksi ini tidak menuntut atau tidak meliputi perubahan secara menyeluruh. Hanya masalah-masalah sosial yang serius dalam masyarakat yang diuji ulang agar diperoleh solusi-solusi baru.

Dalam pandangan Pragmatisme, kurikulum sekolah seharusnya tidak terpisahkan dari keadaan-keadaan masyarakat. Dalam pendidikan materi pelajaran adalah alat untuk memecahkan masalah-masalah individual, dan siswa secara perorangan ditingkatkan atau direkonstruksi, dan secara bersamaan masyarakat dikembangkan. Karena itu masalah-masalah masyarakat demokratis harus menjadi bentuk dasar kurikulum; dan makna pemecahan ulang masalah-masalah lembaga demokratis juga harus dimuat dalam kurikulum. Karena itu kurikulum harus menjadi:

a) Berbasis pada masyarakat.
b) Lahan praktek cita-cita demokratis.
c) Perencanaan demokratis pada setiap tingkat pendidikan.
d) Kelompok batasan tujuan-tujuan umum masyarakat.
e) Bermakna kreatif untuk pengembangan keterampilan-keterampilan baru.
f) Kurikulum berpusat pada siswa *(pupil/child centrered)* dan berpusat pada aktifitas *(activity centered).* Selain itu perlu dicatat bahwa kurikulum pendidikan Pragmatisme diorganisasi secara *interdisipliner*, dengan kata lain kurikulumnya bersifat terpadu, tidak merupakan mata pelajaran-mata pelajaran yang terpisah-pisah.

Sejalan dengan uraian di atas, Edward J. Power (1982) menyimpulkan bahwa kurikulum pendidikan Pragmatisme "berisi pengalaman-pengalaman yang telah teruji, yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Adapun kurikulum tersebut mungkin berubah".

3) *Metode Pendidikan*. Sebagaimana dikemukakan Callahan dan Clark (1983), penganut Eksperimentalisme atau Pragmatisme mengutamakan penggunaan metode pemecahan masalah *(Problem Solving Method)* serta metode penyelidikan dan penemuan *(Inquiry and Discovery Method).* Dalam prakteknya (mengajar), metode ini membutuhkan guru yang memiliki sifat sebagai berikut: *permissive* (pemberi kesempatan), *friendly* (bersahabat), a *guide* (seorang pembimbing), o*pen-minded* (berpandangan terbuka), e*nthusiastic* (bersifat antusias), c*reative* (kreatif), s*ocialy aware* (sadar bermasyarakat), *alert* (siap siaga), *patien* (sabar), *cooperative and sincere* (bekerjasama dan ikhlas atau bersungguh-sungguh).
4) *Peranan Guru dan Siswa*. Dalam Pragmatisme, belajar selalu

dipertimbangkan untuk menjadi seorang individu. Dalam pembelajaran peranan guru bukan "menuangkan" pengetahuannya kepada siswa, sebab ini merupakan upaya tak berbuah. Sewajarnya, setiap apa yang siswa pelajari sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan, minat- minat, dan masalah-masalah pribadinya. Dengan kata lain isi pengetahuan tidak bertujuan dalam dirinya sendiri, melainkan bermakna untuk suatu tujuan. Dengan demikian seorang siswa yang menghadapi suatu permasalahan akan mungkin untuk merekonstruksi lingkunganya untuk memecahkan kebutuhan yang dirasakannya. Untuk membantu siswa guru harus berperan:

a) Menyediakan berbagai pengalaman yang akan memunculkan motivasi. Field trips, film-film, catatan-catatan, dan tamu ahli merupakan contoh-contoh aktifitas yang dirancang untuk memunculkan minat siswa terhadap permasalahan penting.
b) Membimbing siswa untuk merumuskan batasan masalah secara spesifik.
c) Membimbing merencanakan tujuan-tujuan individual dan kelompok dalam kelas untuk digunakan dalam memecahkan masalah.
d) Membantu para siswa dalam mengumpulkan informasi berkenaan dengan masalah. Secara esensial, guru melayani para siswa sebagai pembimbing dengan memperkenalkan keterampilan, pemahaman-pemahaman, pengetahuan, dan penghayatan-penghayatan melaluipenggunaan buku-buku, komposisi- komposisi, surat-surat, nara sumber, film-film, field trips, televisi, atau segala sesuatu yang tepat digunakan.
e) Bersama-sama kelas mengevaluasi apa yang telah dipelajari; bagaimana mereka mempelajarinya; dan informasi baru apa yang setiap siswa temukan oleh dirinya (Callahan and Clark, 1983).

Edwrad J. Power (1982) menyimpulkan pandangan Pragmatisme bahwa "siswa merupakan organisme yang rumit yang mempunyai kemampuan luar biasa untuk tumbuh; sedangkan guru berperanan untuk memimpin dan membimbing pengalaman belajar tanpa ikut campur terlalu jauh atas minat dan kebutuhan siswa".

Prinsip bahwa segala sesuatu terus berubah, prinsip bahwa pengetahuan terbaik yang diperoleh melalui eksperimentasi ilmiah juga

selalu berubah dan bersifat relative, dan prinsip relitivisme nilai-nilai, maka Callahan dan Clark (1983) menyatakan bahwa orientasi pendidikan Pragmatisme adalah *Progresivisme.* Artinya, pendidikan Pragmatisme menolak segala bentuk formalisme yang berlebihan dan membosankan dari pendidikan sekolah yang tradisional. Anti terhadap otoritarianisme dan absolutisme dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam bidang kehidupan agama, moral, social, politik, dan ilmu pengetahuan. Sebaliknya pendidikan Pragmatisme dipandang memiliki kekuatan demi terjadinya perubahan social dan kebudayaan melalui penekanan perkembangan individual peserta didik. Selain itu, Callahan dan Clark (1983) memandang Rekonstruksionisme adalah variasi dari Progresivisme, yaitu suatu orientasi pendidikan yang ingin merombak tata susunan kebudayaan lama, dan membangun tata susunan kebudayaan baru melalui pendidikan/sekolah.. Perbedaannya dengan Progresivisme yaitu bahwa Rekonstrukionisme tidak menekankan perubahan masyarakat dan kebudayaan melalui perkembangan individual siswa *(child centered)*, melainkan melalui rekayasa sosial dengan jalan pendidikan/sekolah.

4. Landasan Filosofis Pendidikan Nasional (Pancasila)

Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila yang rumusannya termaktub dalam "Pembukaan" Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena Pancasila adalah dasar Negara Indonesia, implikasinya maka Pancasila juga adalah dasar pendidikan nasional. Sejalan dengan ini Pasal 2 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang "Sistem Pendidikan Nasional" menyatakan bahwa: *"Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".*

Sehubungan dengan hal di atas, bangsa Indonesia memiliki landasan filosofis pendidikan tersendiri dalam sistem pendidikan nasionalnya, yaitu Pancasila. Kita perlu mengkaji nilai-nilai Pancasila untuk dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan maupun studi pendidikan lebih lanjut.

Barangkali Anda bertanya: "jika demikian halnya, untuk apa kita mempelajari landasan filosofis pendidikan dari berbagai aliran (Idealisme, Konstruktivisme, Pragmatisme, dsb.) sebagaimana telah dipelajari melalui BBM sebelumnya?". Berbagai landasan filosofis pendidikan tersebut tetap perlu kita kaji dengan tujuan untuk memahaminya, memilah dan memilih gagasan-gagasannya yang positif yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila untuk diambil hikmahnya demi pengembangan dan memperkaya kebudayaan (pendidikan) kita.

a. Konsep Filsafat Umum

1) Metafisika (*Hakikat Realitas)*. Bangsa Indonesia meyakini bahwa realitas atau alam semesta tidaklah ada dengan sendirinya, melainkan sebagai ciptaan *(makhluk)* Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan adalah Sumber Pertama dari segala yang ada, Ia adalah Sebab Pertama dari segala sebab, tetapi Ia tidak disebabkan oleh sebab-sebab yang lainnya; dan Ia juga adalah tujuan akhir segala yang ada.

   Di alam semesta bukan hanya realitas fisik atau hanya realitas non fisik yang ada, realitas yang bersifat fisik dan/atau non fisik tampak dalam pluralitas fenomena alam semesta sebagai keseluruhan yang integral. Terdapat alam fana dengan segala isi, nilai, norma atau hukum di dalamnya. Alam tersebut adalah tempat/prasarana dan sarana bagi manusia dalam rangka hidup dan kehidupannya, dalam rangka melaksanakan tugas hidup untuk mencapai tujuan hidupnya. Di balik itu, terdapat alam akhir yang abadi dimana setelah mati manusia akan dimintai pertanggung jawaban dan menerima imbalan atas pelaksanaan tugas hidup dari Tuhan YME. Dalam uraian di atas tersurat dan tersirat makna adanya realitas yang bersifat absolut dan relatif, terdapat realitas yang bersifat abadi dan realitas yang bersifat fana.

   Termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa hakikat hidup bangsa Indonesia adalah berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan perjuangan yang didorong oleh keinginan luhur untuk mencapai dan mengisi kemerdekaan. Adapun yang menjadi keinginan luhur tersebut yaitu: a. negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur; b. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; c. memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan d. ikut

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa realitas juga tidak bersifat *given* (terberi) dan final, melainkan juga "mewujud" sebagaimana kita manusia dan semua anggota alam semesta berpartisipasi "mewujudkannya".

Hakikat Manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan YME. Manusia adalah kesatuan badani-rohani yang hidup dalam ruang dan waktu, memiliki kesadaran *(consciousness)* dan penyadaran diri *(self-awareness)*, mempunyai berbagai kebutuhan, dibekali naluri dan nafsu, serta memiliki tujuan hidup. Manusia dibekali potensi untuk mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan untuk berbuat baik, namun di samping itu karena hawa nafsunya manusia pun memiliki kemungkinan untuk berbuat jahat. Selain itu, manusia memiliki potensi untuk: mampu berpikir (cipta), berperasaan (rasa), berkemauan (karsa), dan berkarya. Adapun dalam eksistensinya manusia berdimensi individualitas/personalitas, sosialitas, kultural, moralitas, dan religius. Adapun semua itu menunjukkan dimensi interaksi atau komunikasi (vertikal maupun horisontal), historisitas, dan dinamika.

Pancasila mengajarkan bahwa eksistensi manusia bersifat *mono-pluralis* tetapi bersifat *integral, artinya* bahwa manusia yang serba dimensi itu hakikatnya adalah satu kesatuan utuh. Pancasila menganut *asas Ketuhanan Yang Maha Esa:* manusia diyakini sebagai makhluk Tuhan YME, mendapat panggilan tugas dariNya, dan harus mempertanggung jawabkan segala amal pelaksanaan tugasnya terhadap Tuhan YME (aspek religius); *asas mono dualisme:* manusia adalah kesatuan badani-ruhani, ia adalah pribadi atau individual tetapi sekaligus insan sosial; *asas mono-pluralisme:* meyakini keragaman manusia, baik suku bangsa, budaya, dsb., tetapi adalah satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia (*Bhineka tunggal Ika)*; *asas nasionalisme*: dalam eksistensinya manusia terikat oleh ruang dan waktu, maka ia mempunyai relasi dengan daerah, jaman, dan sejarahnya yang diungkapkan dengan sikapnya mencintai tanah air, nusa, dan bangsa;

asas internasionalisme: manusia Indonesia tidak meniadakan eksistensi manusia lain baik sebagai pribadi, kelompok, atau bangsa lain;

asas *demokrasi*: dalam mencapai tujuan kesejahteraan bersama, kesamaan hak dan kewajiban menjadi dasar hubungan antara warga negara, dan hubungan antara warga negara dan negara dan sebaliknya; *asas keadilan sosial:* dalam merealisasikan diri manusia harus senantiasa menjunjung tingi tujuan kepentingan bersama dalam membagi hasil pembudayaannya (BP-7 Pusat, 1995).

2) Epistemologi (*Hakikat Pengetahuan)*. Segala pengetahuan hakikatnya bersumber dari Sumber Pertama yaitu Tuhan YME. Tuhan telah menurunkan pengetahuan baik melalui utusanNya (berupa wahyu) maupun melalui berbagai hal yang digelarkanNya di alam semesta termasuk hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Manusia dapat memperoleh pengetahuan melalui keimanan/kepercayaan, berpikir, pengalaman empiris, penghayatan, dan intuisi.

   Kebenaran pengetahuan ada yang bersifat mutlak (seperti dalam pengetahuan keagamaan/*revealed knowledge* yang diimani), tetapi ada pula yang bersifat relatif (seperti dalam pengetahuan ilmiah sebagai hasil upaya manusia melalui riset, filsafat, dsb). Pengetahuan yang bersifat mutlak (ajaran agama/wahyu Tuhan) diyakini mutlak kebenarannya atas dasar keimanan kepada Tuhan YME. Pengetahuan yang bersifat relatif (filsafat, sains, dll) diuji kebenarannya melalui uji konsistensi logis ide-idenya, kesesuainya dengan data atau fakta empiris, dan nilai kegunaannya bagi kesejahteraan manusia dengan mengacu kepada kebenaran dan nilai-nilai yang bersifat mutlak.

3) Aksiologi: *Hakikat Nilai.* Sumber Pertama segala nilai hakikatnya adalah Tuhan YME. Karena manusia adalah makhluk Tuhan, pribadi/individual dan sekaligus insan sosial, maka hakikat nilai diturunkan dari Tuhan YME, masyarakat dan individu.

b. Implikasi terhadap Pendidikan

   1) *Pendidikan.* Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1 UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional).

Sebagai usaha sadar dan terencana, pendidikan tentunya harus mempunyai dasar dan tujuan yang jelas, sehingga dengan demikian baik isi pendidikan maupun cara-cara pembelajarannya dipilih, diturunkan dan dilaksanakan dengan mengacu kepada dasar dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selain itu, pendidikan *bukanlah proses pembentukan* peserta didik untuk menjadi orang tertentu sesuai kehendak sepihak dari pendidik. Karena manusia (peserta didik) hakikatnya adalah pribadi yang memiliki potensi dan memiliki keinginan untuk menjadi dirinya sendiri, maka upaya pendidikan harus dipandang sebagai upaya bantuan dan memfasilitasi peserta didik dalam rangka mengembangkan potensi dirinya. Upaya pendidikan adalah pemberdayaan peserta didik. Hal ini hendaknya tidak dipandang sebagai upaya dan tujuan yang bersifat individualistik semata, sebab sebagaimana telah dikemukakan bahwa kehidupan manusia itu multi dimensi dan merupakan kesatuan yang integral.

Selain hal di atas, dimensi hitorisitas, dinamika, perkembangan kebudayaan dan tugas hidup yang diemban manusia mengimplikasikan bahwa pendidikan harus diselenggarakan sepanjang hayat. Pendidikan hendaknya diselenggarakan sejak dini, pada setiap tahapan perkembangan hingga akhir hayat. Sebab itu, pendidikan hendaknya diselenggarakan baik pada jalur pendidikan informal, formal, maupun nonformal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

2) *Tujuan Pendidikan.* Pandangan Pancasila tentang hakikat realitas, manusia, pengetahuan dan hakikat nilai mengimplikasikan bahwa pendidikan seyogyanya bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertangung jawab. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan tersebut hendaknya kita sadari betul, sehingga pendidikan yang kita selenggarakan bukan hanya untuk mengembangkan salah satu potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berilmu saja, bukan hanya untuk terampil bekerja

saja, dsb., melainkan demi berkembangnya seluruh potensi peserta didik dalam konteks keseluruhan dimensi kehidupannya secara integral.

3) *Kurikulum Pendidikan*. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a) peningkatan iman dan takwa; b) peningkatan akhlak mulia; c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d) keragaman potensi daerah dan lingkungan; e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f) tuntutan dunia kerja; g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h) agama; I) dinamika perkembangan global; dan J) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 36 UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

4) *Metode Pendidikan.* Berbagai metode pendidikan yang ada merupakan alternatif untuk diaplikasikan. Sebab, tidak ada satu metode mengajar pun yang terbaik dibanding metode lainnya dalam segala konteks pendidikan. Pemilihan dan aplikasi metode pendidikan hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan yang hendak dicapai, hakikat manusia atau peserta didik, karakteristik isi/materi pendidikan, dan fasilitas alat bantu pendidikan yang tersedia. Penggunaan metode pendidikan diharapkan mengacu kepada pada prinsip cara belajar siswa aktif (CBSA) dan sebaiknya bersifat multi metode.

5) *Peranan Pendidik dan Peserta Didik*. ada berbagai peranan pendidik dan peserta didik yang haruis dilaksanaknya, namun pada dasarnya berbagai peranan tersebut tersurat dan tersirat dalam semboyan: *"ing ngarso sung tulodo"* artinya pendidik harus memberikan atau mejadi teladan bagi peserta didiknya; "*ing madya mangun karso",* artinya pendidik harus mampu membangun karsa pada diri peserta didiknya; dan*" tut wuri handayani"* artinya bahwa sepanjang tidak berbahaya pendidik harus memberi kebebasan atau kesempatan kepada peserta didik untuk belajar mandiri.

6) *Orientasi pendidikan*. Pendidikan memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi konservasi dan fungsi kreasi. Fungsi konservasi dilandasi asumsi bahwa terdapat nilai- nilai, pengetahuan, norma, kebiasaan-kebiasaan, dsb. yang

dijunjung tinggi dan dipandang berharga untuk tetap dipertahankan. Contoh: pengetahuan dan nilai-nilai yang bersifat mutlak tentunya tetap harus dipertahankan, demikian juga pengetahuan dan nilai- nilai budaya yang masih dipandang benar dan baik juga perlu dikonservasi. Adapun fungsi kreasi dilandasi asumsi bahwa realitas tidaklah bersifat terberi *(given)* dan telah selesai sebagaimana diajarkan oleh sains modern. Tetapi realitas "mewujud" sebagaimana kita manusia dan semua anggota alam semesta berpartisipasi "mewujudkannya". Semua anggota semesta ikut berpartisipasi dalam mewujudkan realitas. Sebab itu, peran manusia baik sebagai individu maupun kelompok adalah merajut realitas yang diinginkannya yang dapat diterima oleh lingkungannya. Dalam hal ini hakikat pendidikan seyogyanya diletakkan pada upaya-upaya untuk menggali dan mengembangkan potensi para pelajar agar mereka tidak saja mampu memahami perubahan tetapi mampu berperan sebagai agen perubahan atau perajut realitas (A. Mappadjantji Amien, 2005). Perubahan merupakan suatu keharusan atau kenyataan yang tidak dapat kita tolak, sehingga pelajar-pelajar harus kita didik untuk menguasainya dan bukan sebaliknya, mereka menjadi dikuasai oleh perubahan.

Sumber lain menyebutkan landasan filosofis pendidikan nasional berasumsi pada sebagai berikut:[6]

1. Segala sesuatu berasal dari Tuhan sebagai pencipta. Hakikat hidup bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan perjuangan yang didorong oleh keinginan luhur untuk mencapai dan mengisi kemerdekaan. Selanjutnya, keinginan luhur, yaitu (a). negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; (b). melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh bangsa tumpah darah Indonesia; (c). memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; (d). ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
2. Pancasila merupakan mazhab filsafat tersendiri yang dijadikan landasan pendidikan, bagi bangsa Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang

[6] M. Tatang, et al. 2010. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Pres, hal 36-37.

Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 2, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

3. Manusia adalah ciptaan Tuhan, bersifat mono-dualisme dan monopluralisme. Manusia yang dicita-citakan adalah manusia seutuhnya, yaitu manusia yang mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan spiritual dan keduniawian, individu dan sosial, fisik dan kejiwaan.
4. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman, pemikiran, dan penghayatan.
5. Perbuatan manusia diatur oleh nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan, kepentingan umum dan hati nurani.
6. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
7. Kurikulum berisi pendidikan umum, pendidikan akademik, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan profesional.
8. Mengutamakan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) dan penghayatan. Berbagai metode dapat dipilih dan dipergunakan dalam rangka mencapai tujuan.
9. Peranan pendidik dan anak didik pada dasarnya berpegang pada prinsip keteladanan *ing ngarso sung tulado, ing madya mangun karso*, dan *tut wuri handayani*.

BAGIAN 2

LANDASAN AGAMA DALAM PENDIDIKAN

Pendidikan pada dasarnya adalah proses komunikasi yang di dalamnya mengandung transformasi pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan, di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung sepanjang hayat dan generasi ke generasi. Konsep dasar pendidikan ini mencakup pengertian istialah tentang tarbiyah, ta'lim dan ta'dib. Yang mana ketiga konsep tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan, hanya saja berbeda konsep. Orang-orang yunani telah menyatakan bahwa pendidikan ialah usaha membantu manusia menjadi manusia.

Ada dua kata yang penting dalam kalimat itu yaitu membantu dan manusia. Manusia perlu dibantu agar ia berhasil menjadi manusia, seseorang dapat dikatakan telah menjadi manusia bila telah memiliki nilai kemanusiaan. Manusia yang menjadi tujuan pendidikan itu harus mampu berpikir benar.

Aspek pendidikan yang kedua ialah menolong atau membantu, kata "menolong" juga menegaskan bahwa perbuatan mendidik itu berarti menolong manusia untuk berhasil menjadi manusia.Kata menolong ini tidak bisa dipisahkan dari kata kasih sayang artinya pendidik itu harus menolong anak didiknya dengan rasa kasih sayang dan harus menolong dalam hal yang benar.Pendidikan juga dapat menolong manusia agar mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya karena manusia selalu menghadapi masalah maka selama itu pula ia memerlukan pendidikan.

Pendidikan di sini selalu ada kaitannya dengan nilai-nilai agama yang mengatakan bahwa pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan pada ajaran agama. Ajaran dalam setiap agama berdasarkan pada kitab masing-masing seperti Al-Qur'an dalam agama Islam, kitab taurad, injil dan lainnya. Pendidikan tidak bisa dilepaskan dari agama karena agama ini

bertugas untuk mengembangkan sumber daya insani secara individual, dan masyarakat untuk mengolah bumi.

A. Agama dan Pendidikan

1. Pengertian Agama

Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebhaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Kata "agama" berasal dari bahasa Sansekerta āgama yang berarti "tradisi". Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja re-ligare yang berarti "mengikat kembali" atau dapat berarti obligation atau kewajiban. Maksudnya dengan bereligi, seseorang mengikat dirinya dan melaksana.kan kewajibannya kepada Tuhan. Menurut James Martineau dalam Encyclopedia of Philosophy, agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang selalu hidup, yakni kepada jiwa dan kehendak Illahi yang mengatur alam semesta dan mempunyai hubungan moral dengan umat manusia. [7]

Agama bagi seseorang adalah ungkapan dari sikap akhirnya pada alam semesta, makna dan tujuan singkat dari seluruh kesadarannya pada segala sesuatu (Edward Caird). Agama adalah pengalaman dunia dalam seseorang tentang keTuhanan disertai keimanan dan peribadatan. Jadi agama pertama-tama harus dipandang sebagai pengalaman dunia dalam individu yang mensugestif esensi pengalaman semacam kesufian karena kata Tuhan berarti sesuatu yang dirasakan sebagai supernatural, supersensible atau kekuatan di atas manusia. Hal ini lebih bersifat personal/pribadi yang merupakan proses psikologis seseorang. Yang kedua adalah adanya keimanan yang sebenarnya instrinsik ada pada pengalaman dunia dalam seseorang. Kemudian efek dari adanya keimanan dan pengalaman dunia yaitu peribadatan. [8]

Manusia memiliki kemampuan yang terbatas, kesadaran dan pengakuan akan keterbatasannnya menjadikan keyakinan bahwa ada sesuatu yang luar biasa diluar dirinya. Sesuatu yang luar biasa itu tentu berasal dari sumber yang luar biasa juga.

---

[7] Muzayyin Arifin. 2012. *Filsafat Pendidikan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, Hal. 65.
[8] *Ibid.*, Hal. 65-67.

Dan sumber yang luar biasa itu ada bermacam-macam sesuai dengan bahasa manusianya sendiri. Misal Tuhan, Dewa, God, Syang-ti, Kami-Sama dan lain-lain atau hanya menyebut sifat-Nya saja seperti Yang Maha Kuasa, Ingkang Murbeng Dumadi, De Weldadige dll. Keyakinan ini membawa manusia untuk mencari kedekatan diri kepada Tuhan dengan cara menghambakan diri, yaitu :

a. menerima segala kepastian yang menimpa diri dan sekitarnya dan yakin berasal dari Tuhan
b. menaati segenap ketetapan, aturan, hokum, dan lain-lain yang diyakini berasal dari Tuhan

Dengan demikian diperoleh keterangan yang jelas, bahwa agama itu penghambaan manusia kepada Tuhannya. Dalam pengertian agama terdapat 3 unsur, ialah manusia, penghambaan dan Tuhan. Maka suatu paham atau ajaran yang mengandung ketiga unsur pokok pengertian tersebut dapat disebut agama. Setiap agama memiliki sistem nilai dan norma yang berbeda sehingga tidak bisa dikatakan semua agama adalah sama. Faham yang dikenal dengan pluralisme ini tidak bisa diterima oleh semua kalangan. Contohnya, Islam memadang pluralisme sebagai sikap menghargai dan toleransi kepada pemeluk agama lain adalah merupakan hal yang mutlak untuk dijalankan. Namun bukan berarti beranggapan bahwa semua agama adalah sama (plurasime), artinya tidak menganggap bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang kalian sembah.

2. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan prilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik.[9] Menurut Hamka pendidikan adalah proses ta'lim dan menyampaikan sebuah misi (tarbiyah) tertentu. Tarbiyah mengandung arti yang lebih komprehensif dalam memaknai pendidikan terutama pendidikan Islam baik secara vertikal maupun horizontal. Prosesnya merujuk pada pemeliharaan dan pengembangan seluruh potensi (fitrah) peserta didik baik jasmaniah maupun rohaniah. Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah proses pembudayaan yakni suatu usaha memberikan nilai-nilai luhur kepada generasi baru dalam masyarakat yang tidak hanya bersifat pemeliharaan tetapi juga dengan maksud

[9] Ramayulis. 2015. *Dasar-Dasar Kependidikan.* Jakarta: Kalam Mulia, Hlm. 43.

memajukan serta memperkembangkan kebudayaan menuju ke arah keluhuran hidup kemanusiaan. [10]

Pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

B. Landasan Agama Terhadap Pendidikan

Agama mengatur seluruh aspek kehidupan pemeluknya sebagai individu, anggota masyarakat serta lingkungannya. Agama merupakan penghambaan manusia terhadap Tuhannya. Agama bersifat dogmatis, otoriter serta imperatif sehingga setiap pemeluknya harus mentaati aturan, nilai serta norma yang ada di dalammnya. Aturan-aturan tersebut bersifat mengikat dan berfungsi sebagai pedoman bagi pemeluknya untuk mencapai kebahagian yang diidamkannya. Bila aturan tersebut dilanggar maka dampaknya bukan hanya pada individual saja tetapi juga lingkungan sekitar.

Agama dalam konsep-konsep di atas bersifat universal dan sederhana. Konsep-konsep tersebut diharapkan dapat dikenakan kepada semua agama yang dikenal selama ini. Bila konsep-konsep tersebut dilaksakan sama untuk semua agama, maka konsekuensi yang diterima adalah adanya pluralisme agama. Padahal tidak semua agama menyepakati adanya pluralisme. Bila berbicara tentang agama maka tidak akan pernah lepas dari pendidikan. Agama selalu bersifat mendidik, karena di dalamnya ada transfer ilmu dan pengetahuan yang bersifat dogmatis. Lain halnya bila berbicara tentang pendidikan maka tidak selalu berkaitan dengan agama. Namun dalam proses pendidikan maka pendidikan harus sejalan dengan agama dan saling melengkapi sehingga output yang dihasilkan oleh pendidikan bersifat syamil/menyeluruh/paripurna. Hal ini sesuai dengan Visi Kementrian Pendidikan Nasional tahun 2005 yaitu menghasilkan insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (insan kamil/insan paripurna). Yang dimaksud dengan insan Indonesia

[10] Hasbullah. 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan.* Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 73.

Cerdas adalah cerdas komprehensif yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual dan cerdas kinestetis. [11]

Pembentukan manusia yang Cerdas dan Kompetitif tidak semata dilakukan hanya dengan transfer ilmu dan pengetahuan saja tetapi juga penanaman nilai-nilai moral yang sesuai dengan nilai dan norma yang terdapat di dalam agama. Hal ini dilakukan agar output pendidikan yang dihasilkan tidak hanya cerdas secara ilmu dan pengetahuan tetapi juga memiliki akhlak dan moral yang baik. Akhlak dan moral inilah yang menjadi penyeimbang dan penggerak output pendidikan sehingga tidak lepas control dan tidak menjadi sombong dengan hasil yang dicapainya. “Science without religion is blind, and religion without science is lame”. (Albert Einstein)

Negara indonesia memiliki 5 Agama, dimana setiap agama memiliki penganut ajaran masing-masing. Adapun ke 5 agama tersebut antara lain, Hindu, Buda, Protestan, Katolik dan Islam. Maka setiap agama memiliki landasan agamis terhadap pendidikan. Karena landasan agama terhadap pendidikan merupakan landasan yang paling mendasari dari landasan-landasan pendidikan lainnya. Sebagai contoh ialah Agama islam, landasan tersebut diciptakan oleh Allah SWT. Landasan agama berupa firman Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur’an dan Al-Hadist berupa risalah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW untuk umat manusia yang berisi tentang tuntutan-tuntutan atau pedoman hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun akhirat, serta merupakan rahmat untuk seluruh alam.

Menurut Sa’id Ismail Ali, sebagaimana yang dikutip oleh Hasan Langgulung (1980:35) landasan agama terhadap pendidikan terdiri atas enam macam yaitu, Al-Qur’an, As-Sunnah, madzhab shahabi, mashalih al-mursalah, ‘uruf dan ijtihad. [12]

1. Al-Qur’an

   Secara etimologi Al-Qur’an berasal dari kata *qaraa-yaqra’u-qira’atan*, atau *qur’anan*, yang berarti mengumpulkan (*al-jam’u*) dan menghimpun (*adh-dhamwu*) huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian kebagian yang lain secara teratur. Muhammad Salim Muhsin mendefinisikan Al-Qur’an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam mushaf-mushaf dan dinukil/diriwayatkan kepada kita dengan jalan yang mutawatir dan membacanya dipandang ibadah serta sebagai penentang bagi yang tidak percaya.

[11] Umar Bukhari. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam.* Jakarta : Amzah, Hlm. 82-84
[12] Abudin Nata. 2005. *Filsafat Pendidikan Islam.* Jakarta: Gaya Media Pratama, Hlm. 102-105.

Nilai esensi dalam Al-Qur’an selamanya abadi dan selalu relevan pada setiap zaman, tanpa ada perubahan sama sekali. Kehujjahan Al-Qur’an dapat dibenarkan karena ia merupakan sumber segala macam aturan tentang hukum, sosial, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, moral, dan sebagainya, yang harus dijadikan pandangan hidup bagi seluruh umat islam dalam memecahkan seluruh persoalan.Pendidikan yang ideal harus sepenuhnya mengacu pada pada nilai dasar Al-Qur’an karena Al-Qur’an diantaranya memuat tentang sejarah pendidikan. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perintah tentang membaca dan hal tersebut sangat jelas kaitannya dengan pendidikan yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5.

اِقْرَاءْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اِقْرَاءْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. اَلَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (العلق: 1-5)

Artinya:

Bacalah dengan menyebut nama Tuhan-Mu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan-Mulah yang Maha Pemurah. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (QS. Al-‘Alaq: 1-5)

2. As-Sunnah

As-Sunnah menurut pengertian bahasa berarti tradisi yang bisa dilakukan, atau jalan yang dilalui (*Ath-thariqah al-maslukah*), baik yang terpuji maupun yang tercela. Sedangkan menurut istilah As-Sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, taqrir ataupun selain dari itu. [13] As-Sunnah merupakan sumber kedua dari ilmu pendidikan yang mengajarkan beberapa unsur penting dalam dunia pendidikan. Ada beberapa Hadits Nabi yang menjelaskan tentang pentingya pendidikan bagi manusia, salah satunya ialah

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya:

Mencari ilmu hukumnya wajib bagi orang islam (laki-laki dan perempuan)

Robert L.Gullick dalam bukunya *Muhammad the Educator* menyatakan, “Muhammad betul-betul seorang pendidik yang membimbing manusia menuju kemerdekaan dan kebahagiaan yang lebih besar serta melahirkan ketertiban dan

[13] *Ibid,*. Hlm 105-109.

stabilitas yang mendorong perkembangan budaya islam, serta revolusi sesuatu yang mempunyai tempo yang tidak tertandingi dan gairah yang menantang".

Corak pendidikan yang diturunkan dari sunnah Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut;

a. Disampaikan sebagai *rahmat li al-alamin* (rahamat bagi semua alam), yang ruang lingkupnya tidak species manusia, tetapi juga pada makhluk biotik dan abiotik lainnya.
b. Disampaikan secara utuh dan lengkap yang memuat berita gembira dan peringatan pada umatnya.
c. Apa yang disampaikan merupakan kebenaran mutlak.
d. Perilaku Nabi tercermin sebagai *uswah hasanah* yang dapat dijadikan figure atau suri tauladan karena perilakunya dijaga oleh Allah.
e. Dalam masalah teknik operasional dalam pelaksanaan pendidikan islam diserahkan penuh pada umatnya, baik yang berkaitan dengan strategi, metode, pendekatan dan teknik pembelajaran diserahkan penuh pada ijtihad umatnya selama hal itu tidak menyalahi aturan dalam islam.

3. Madzhab Shahabi

Sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman juga. [14] Para sahabat Nabi memiliki karakteristik yang unik dibanding kebanyakan orang. Fazlur Rahman berpendapat bahwa karakteristik sahabat Nabi antara lain;

a. Tradisi yang dilakukan para sahabat secara konsepsional tidak terpisah dengan sunnah Nabi Muhammad SAW.
b. Kandungan yang khusus dan aktual dari tradisi sahabat sebagian besar produk sendiri.
c. Praktik amaliah sahabat identik dengan ijma'.

Upaya sahabat Nabi SAW dalam pendidikan sangat menentukan bagi perkembangan pemikiran pendidikan dewasa ini.Upaya yang dilakukan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq misalnya, mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushhaf yang dijadikan sebagai sumber utama pendidikan Islam; meluruskan keimanan masyarakat dari pemurtadan dan memerangi yang membangkang zakat.

---

[14] *Ibid., H*lm 110-113..

Sedangkan upaya yang dilakukan Umar Bin Khathab adalah perannya sebagai bapak revolusioner terhadap ajaran islam. Tindakannya dalam memperluas agama islam dan memerangi kezaliman menjadi salah satu model dalam membangun strategi dan perluasan pendidikan agama islam dalam dewasa ini. Adapun ustman bin affan berusaha untuk menyatukan sistematika berpikir ilmiah dalam menyatukan susunan Alquran dalam satu *mushaf* lainnya, yang semua berbeda antara *mushaf* satu dengan *mushaf* yang lainnya. Sementara ali bin abi thalib banyak merumuskan konsep-konsep kependidikan seperti bagaimana sebagianya etika peserta didik pada pendidikannya,bagaimana *ghirah* pemuda dalam belajar dan demikian sebaliknya.

4. Mashalih Al-Mursalah

Mashalih al-Mursalah adalah menetapkan undang-undang peraturan dan hukum tentang pendidikan dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan di dalam nash, dengan pertimbangan kemaslahatan hidup bersama, dengan bersendikan asas menarik kemaslahatan dan menolak kemudaratan. [15] Mashalih Al-Mursalah dapat diterapkan jika ia benar-benar dapat menarik maslahat dan menolak mudarat melalui penyelidikan terlebih dahulu. Ketetapannya bersifat umum, bukan untuk kepentingan perseorangan serta tidak bertentangan dengan nash.

Para ahli pendidikan berhak menentukan undang-undang atau peraturan pendidikan islam sesuai dengan kondisi lingkungan dimana ia berada. Ketentuan yang dicetuskan berdasarkan mashalih al mursalah paling tidak memiliki tiga kiteria, yaitu:

a. Apa yang dicetuskan benar-benar membawa kemaslahatan dan menolak kerusakan setelah melalui tahapan observasi dan analisis misalnya pembuatan tanda tamat (ijazah) dengan foto pemiliknya.
b. Kemasalahatan yang di ambil merupakan kemaslahatan yang bersifat universal, yang mencakup seluruh lapisan masyarakat, tanpa adanya diskriminasi misalnya perumusan undang-undang system pendidikan nasional di negara islam atau di negara yang penduduknya mayoritas muslim.

[15] Muzayyin Arifin. *Op Cit*, Hal. 64 -65.

c. Keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan nilai dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya, perumusan tujuan pendidikan tidak menyalahi fungsi kehambaan dan kekhalifaan manusia dibumi.

5. Uruf

Yang dimaksud dengan tradisi atau adat ('uruf) adalah kebiasaan masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara kontinu dan seakan-akan merupakan hukum tersendiri sehingga jiwa merasa tenang dalam melakukannya karena sejalan dengan akal dan diterima oleh tabiat yang sejahtera.[16] Nilai tradisi setiap masyarakat merupakan realitas yang multi kompleks dan dialektis.Nilai- nilai itu mencerminkan ke khasan masayarakat sekaligus sebagai pengejauantahan nilai-nilai universal manusia.nilai-nilai tradisi dapat mempertahankan diri individu sejauh didalam diri mereka terdapat nilai-nilai kemanusiaan, apabila nilai-nilai tradisi tidak lagi mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, maka manusia akan kehilangan martabatnya.[17]

Kesepakatan bersama dalam tradisi dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pendidikan. Penerimaan tradisi ini tentunya memiliki syarat yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik Al-Quran maupun As-Sunah dan tradisi yang berlaku tidak bertentangan dengan akal sehat dan tabiat yang sejahtra serta tidak megakibatkan kerusakan dan kemudharatan.

6. Ijtihad

Ijtihad berakar dari kata *jahda* yang berarti Al-musyaqqah (yang sulit) dan badzl al-wus'I wa ath-thaqa (pengerahan kesanggupan dan kekuatan). Sai'id at-Tafrani memberikan arti ijtihad dengan *tahmil al-juhdi*(kea rah yang membutuhkan kesungguhan), yaitu pengarahan segala kesanggupan dan kekuatan untuk memperoleh apa yang dituju sampai pada batas puncaknya (Al- Umari,1981). [18]

Kata "*juhda*" yang nantinya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sugguh-sungguh da mengerahkan semua tenaganya.Pekerjaan yang dilakukan sangat berat dan sukar, sehingga membutuhkan kekuatan yang maksimal.Ijtihad itu sendiri adalah *masdhar* dari fiil madi yang asalnya"ijtahad''.

Menurut istilah, ijtihad ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syariat.Dengan jalan mengeluarkannya dari Al-Quran

---

[16] Abudin Nata. *Op cit*, Hlm. 115.
[17] Muzayyin Arifin. *Op cit*, Hlm. 68.
[18] Abudin Nata. *Op cit*, Hlm. 117-118.

dan As-sunnah atau mengerahkan kesanggupan seorang fuqhaha' untuk menghabiskan zhan (sangkaan) dengan menetapkan hukum syara' dan orang yang melakukannya disebut mujtahid.

Tujuan ijtihad dalam pendidikan adalah untuk dinamisasi, inovasi dan modernisasi pendidikan agar diperoleh masa depan pendidikan yang lebih berkualitas. Ijtihad tidak berarti merombak tatanan yang lama secara besar-besaran dan membuang begitu saja apa yang salama ini dirintis, tetapi memelihara tatanan lama yang baik dan mengambil tatanan baru yang lebih baik. Begitu penting upaya ijtihad ini sehingga Rasulullah memberikan apresiasi yang baik terhadap pelakunya, apabila mereka benar melakukannya, baik pada tataran isi maupun prosedurnya, maka mereka mendapatkan dua pahala tetapi apabila mengalami kesalahan maka mereka dapat satu pahala yaitu pahala karena kesungguhannya (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Amr Ibn Ash).

C. Nilai-Nilai Normatif Pendidikan Menurut Perspektif Islam

Al-Qur'an memuat nilai normatif yang menjadi acuan dalam pendidikan islam. Nilai yang dimaksud terdiri atas tiga pilar utama yaitu:

1. I'tiqadiyah yakni Yang berkaitan dengan pendidikan keimanan, seperti percaya kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhir dan takdir, yang bertujuan untuk menata kepercayaan individu.
2. Khuluqiyah yakni Yang berkaitan dengan pendidikan etika, yang bertujuan untuk membersihkan diri dari perilaku rendah dan menghiasi diri dengan perilaku terpuji.
3. Amaliyah yakni Yang berkaitan dengan pendidikan tingkah laku sehari-hari, baik yang berhubungan dengan; Pendidikan Ibadah, yang memuat hubungan antara manusia dengan Tuhannya seperti sholat, puasa, zakat, haji dan yang bertujuan untuk aktualisasi nilai-nilai ubudiyah. Dan Pendidikan muamalah, yang memuat hubungan antara manusia, baik secara individual maupun institusional. Bagian ini terdiri atas;
   1) Pendidikan Syakhshiyyah, seperti perilaku individu, masalah perkawinan, hubungan suami istri, dan keluarga serta kerabat dekat, yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah dan sejahtera.

2) Pendidikan Madaniyyah, yang berhubungan perdagangan seperti upah, gadai, kongsi, dan sebagainya. Yang bertujuan untuk mengelola harta benda atau hak-hak individu.
3) Pendidikan Jana'iyyah, yang berhubungan dengan pidana atas pelanggaran yang dilakukan, yang bertujuan untuk memelihara kelangsungan kehidupan manusia, baik berkaitan dengan harta, kehormatan, maupun hak-hak individu lainnya.
4) Pendidikan Murafa'at, yang berhubungan dengan acara, seperti peradilan, saksi maupun sumpah, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan diantara anggota masyarakat.
5) Pendidikan Dusturiyyah, yang berhubungan dengan undang-undang negara yang mengatur hubungan antara rakyat dengan pemerintah atau negara, yang bertujuan untuk stabilitas bangsa dan negara.
6) Pendidikan Duwaliyyah, yang berhubungan dengan tata negara, seperti tata negara islam, tata negara tidak islam, wilayah perdamaian dan wilayah perang, dan hubungan muslim satu negara dengan muslim di negara lain, yang bertujuan untuk perdamaian dunia.
7) Pendidikan Iqtishadiyyah, yang berhubungan dengan perekonomian individu dan negara, hubungan yang miskin dan yang kaya, yang bertujuan untuk keseimbangan atau pemerataan pendapatan.

Al-Qur'an secara normatif juga mengungkap lima aspek pendidikan dalam dimensi-dimensi kehidupan manusia, yang meliputi;

1. Pendidikan menjaga agama (*hifzh ad-din*)

   Yang mampu menjaga eksistensi agamanya; memahami dan melaksanakan ajaran agama secara konsekuen dan konsisten; mengembangkan, meramaikan; mendakwahkan, dan mensyiarkan agama. seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 52

   فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيْرًا (الفرقان: 52)

   Artinya:

   Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Qur'an dengan jihad yang besar (QS. Al-Furqan: 52).

2. Pendidkan menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*)

   Yang memenuhi hak dan kelangsungan hidup diri sendiri dan masing-masing anggota masyarakat, karenanya perlu diterapkan hukum *qishash* (pidana islam) bagi

yang melanggarnya, seperti hukuman mati. Seperti dalam Al-Qur’an surat Al-Isra’ ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيْرًا (الإسراء: 31)

Artinya:

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar (QS. Al-Isra’: 31).

3. Pendidikan menjaga akal pikiran (*hifzh al-aqal*)

Yang menggunakan akal pikirannya untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah dan hukum-hukum-Nya, menghindari perbuatan yang merusak akalnya dengan minum khamar atau zat adiktif, yang karenanya diberlakukan *had*(sanksi) seperti cambuk. Seperti dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 90

يَآ يُهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (المائدة: 90)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) Khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (QS. Al-Maidah: 90).

4. Pendidikan menjaga keturunan (*hifzh an-nasb*)

Yang mampu menjaga dan melestarikan generasi muslim yan g tangguh dan berkualitas; menghindari perilaku seks menyimpang, seperti free sex, kumpul kebo, homoseksual, lesbian, sodomi, yang karenanya diundang-undangkan hukum rajam (lempar batu) atau cambuk. Seperti dalam Al-Qur’an surat Al-Isra’ ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوْا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَآءَ سَبِيْلًا (الإسراء: 32)

Artinya:

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (QS. Al-Isra’: 32)

5. Pendidikan menjaga harta benda dan kehormatan (*hifzh al-mal wa al-‘irdh*)

Yang mampu mempertahankan hidup melalui pencarian rezeki yang halal; menjaga kehormatan diri dari pencurian, penipuan, perampokan, pencelakaan, riba, dan kezaliman. Seperti dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 29

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ (النّور: 29)

Artinya:

Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan (QS. An-Nur: 29).

BAGIAN 3

LANDASAN PENGETAHUAN ILMIAH DALAM PENDIDIKAN

Pengetahuan (*knowledge)* adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui berbagai cara pengindraan terhadap fakta, penalaran (rasio), intuisi, dan wahyu. Pengetahuan yang memenuhi kriteria dari segi ontologis, epistemologis, dan aksiologis secara konsekuen dan penuh disiplin biasa disebut ilmu ataupun ilmu pengetahuan. Dilihat dari segi tujuan pokoknya, sering pula dibedakan ilmu dasar (*basic science*) dan ilmu terapan (*applied science*). Ilmu dasar terutama digunakan demi kemajuan ilmu itu sendiri, sedangkan ilmu terapan terutama digunakan untuk mengatasi masalah dan memajukan kesejahteraan manusia. Hasil dari ilmu terapan itu harus dialihragamkan (ditranformasikan) menjadi bahan, alat, atau prosedur kerja.

Pada dasarnya kita sebagai manusia yang diberi kelebihan dari pada mahluk-mahluk lainya dimuka bumi ini sebuah akal, kita harus dapat dididik, mendidik, dan menjadi seorang pendidik, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Maka mendidik sesungguhnya harus "ilmiah". Tidak asal-asalan apalagi penuh dengan kebohongan. Karena pembelajaran tersebut yang selamanya akan diserap dan bahkan dikembangkan oleh akal pikiran kita, jadi ketika pembelajaran tersebut diisi dengan kebohongan atau tidak berdasarkan fakta dan realita, maka selamanya kita akan melakukan tindakan yang salah juga.

A. Pengertian Pengetahuan Ilmiah

1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan (*knowledge)* adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui berbagai cara pengindraan terhadap fakta, penalaran (rasio), intuisi, dan wahyu. Pengetahuan yang memenuhi kriteria dari segi ontologis, epistemologis, dan aksiologis secara konsekuen dan penuh disiplin biasa disebut ilmu ataupun ilmu pengetahuan (*science)*, kata sifatnya adalah ilmiah atau keilmuan, sedangkan ahlinya

disebut ilmuwan. Dengan demikian, pengetahuan meliputi berbagai cabang ilmu (ilmu-ilmu social atau *social sciences*, dan ilmu-ilmu alam atau *natural sciences*), humaniora (seni, filsafat, bahasa, dan sebagainya), serta wahyu keagamaan atau yang sejenisnya.[19] Dilihat dari segi tujuan pokoknya, sering pula dibedakan ilmu dasar (*basic science*) dan ilmu terapan (*applied science*). Ilmu dasar terutama digunakan demi kemajuan ilmu itu sendiri, sedangkan ilmu terapan terutama digunakan untuk mengatasi masalah dan memajukan kesejahteraan manusia. Hasil dari ilmu terapan itu harus dialihragamkan (ditranformasikan) menjadi bahan, alat, atau prosedur kerja. Kegiatan ini biasa disebut pengembangan (*development*). Tindak lanjut dan hasil kegiatan pengembangan itulah yang disebut teknologi.[20] Pengetahuan bisa didapatkan dengan beberapa cara diantaranya adalah:

1) Melakukan pengamatan dan observasi yang dilaksanakan secara empiris dan rasional. Pengetahuan empiris tersebut juga dapat berkembang menjadi pengetahauan deskriptif bila seseorang dapat melukiskan dan menggambarkan segala ciri, sifat dan gejala yang ada pada objek empiris tersebut.
2) Melalui pengalaman pribadi manusia yang terjadi berulang kali. Misalnya, seseorang yang sering dipilih untuk memimpin organisasi dengan sendirinya akan mendapatkan pengetahuan tentang manajemen organisasi.
3) Melalui akal budi yang kemudian dikenal sebagai rasionalisme**.** Rasionalisme lebih menekankan pengetahuan yang bersipat apriori, tidak menekankan pada pengalaman. Misalnya, dalam Matematika, hasil 1 + 1 = 2 bukan didapatkan melalui pengalaman atau pengamatan empiris melainkan melalui sebuah pemikiran logis akal budi.

2. Pengertian Pengetahuan Ilmiah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ilmiah/il·mi·ah/ *a* adalah bersifat ilmu; secara ilmu pengetahuan; memenuhi syarat (kaidah). ilmu pengetahuan Dalam penjelasan tentang pengetahuan Jujun S. Suriasumantri mengemukakan bahwa kumpulan pengetahuan yang disusun secara konsisten dan kebenarannya telah teruji secara empiris itulah yang disebut dengan *ilmu* atau bisa dikatakan ilmu pengetahuan. Ciri–ciri pengetahuan yang bersifat ilmiah :

1) Mempunyai derajat kepastian yang tinggi, dimanah pijakan berpikirnya

[19] Jujun S. Suriasumantri. 1981. *Filsafat Ilmu.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Hlm. 13-16.
[20] *Ibid,* Hlm. 163-164

dilandasi pengetahuan yang luas.

2) Obyektif. Ilmu harus memiliki obyek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam. Obyeknya dapat bersifat ada, atau mungkin ada karena masih harus diuji keberadaannya. Dalam mengkaji obyek, yang dicari adalah kebenaran, yakni persesuaian antara tahu dengan obyek, dan karenanya disebut kebenaran obyektif; bukan subyektif berdasarkan subyek peneliti atau subyek penunjang penelitian.
3) Metodis adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Konsekuensi dari upaya ini adalah harus terdapat cara tertentu untuk menjamin kepastian kebenaran. Metodis berasal dari kata Yunani "Metodos" yang berarti: cara, jalan. Secara umum metodis berarti metode tertentu yang digunakan dan umumnya merujuk pada metode ilmiah.
4) Sistematis. Dalam perjalanannya mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu obyek, ilmu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu , mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut obyeknya. Pengetahuan yang tersusun secara sistematis dalam rangkaian sebab akibat merupakan syarat ilmu yang ketiga
5) Universal. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran universal yang bersifat umum (tidak bersifat tertentu)

3. Landasan Pengetahuan Ilmiah

Setiap jenis pengetahuan mempunyai ciri-ciri yang spesifik mengenai *apa (*ontologi), *bagaimana* (epistemologi), dan *untuk apa* (aksiologi) pengetahuan tersebut disusun.

Ke tiga landasan ini saling berkaitan. Jadi ontologi ilmu terkait dengan epistemologi ilmu dan epistemologi ilmu terkait dengan aksiologi ilmu dst. Jadi kalau kita ingin membicarakan epistemologi ilmu, maka hal ini harus dikaitkan dengan ontologi dan aksiologi ilmu.

Ilmu mempelajari alam sebagaimana adanya dan terbatas pada lingkup pengalaman kita. Pengetahuan dikumpulkan oleh ilmu dengan tujuan untuk menjawab permasalahan kehidupan yang sehari-hari dihadapi manusia dan

digunakan untuk menawarkan kemudahan. Pengetahuan ilmiah merupakan sebagai alat bagi manusia dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapinya. Pemecahan tersebut pada dasarnya adalah dengan meramalkan dan mengontrol gejala alam. Dengan ilmu manusia memanipulasi dan menguasai alam. Dengan mempelajari alam manusia dapat mengembangkan pengetahuan. Pengetahuan berkembang melalui pengalaman dan rasionalisme yang didukung oleh metode mencoba-coba/*trial-and error* .[21]

Ilmu atau ilmu pengetahuan juga memiliki definisi sebagai seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya.

Ilmu bukan sekadar pengetahuan (*knowledge*), tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berfikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi.

B. Perbedaan Pengetahuan dan Pengentahuan Ilmiah

Ernest Nagel secara rinci membedakan pengetahuan (*common sense*) dengan ilmu pengetahuan (*science*). Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam *common sense* informasi tentang suatu fakta jarang disertai penjelasan tentang mengapa dan bagaimana. *Common sense* tidak melakukan pengujian kritis hubungan sebab-akibat antara fakta yang satu dengan fakta lain. Sedang dalam *science* di samping diperlukan uraian yang sistematik, juga dapat dikontrol dengan sejumlah fakta sehingga dapat dilakukan pengorganisasian dan pengklarifikasian berdasarkan prinsip-prinsip atau dalil-dalil yang berlaku.
2. Pengetahuan ilmiah menekankan pada ciri sistematik. Pengetahuan ilmiah didasarkan pada pengetahuan-pengetahuan yang ada sebelumnya dan terikat satu sama lain. Sedang *common sense* tidak memberikan penjelasan (eksplanasi) yang sistematis dari berbagai fakta yang terjalin. Di samping itu, dalam *common sense*

[21] *Ibid,* Hlm. 105-106

cara pengumpulan data bersifat subjektif, karena *common sense* sarat dengan muatan-muatan emosi dan perasaan.

3. Dalam menghadapi konflik dalam kehidupan, pengetahuan ilmiah menjadikan konflik sebagai pendorong untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Pengetahuan ilmiah berusaha untuk mencari, dan mengintroduksi pola-pola eksplanasi sistematik sejumlah fakta untuk mempertegas aturan-aturan. Dengan menunjukkan hubungan logis dari proposisi yang satu dengan lainnya.
4. Kebenaran yang diakui oleh *common sense* bersifat tetap, sedang kebenaran dalam pengetahuan ilmiah selalu diusik oleh pengujian kritis. Kebenaran dalam pengetahuan ilmiah selalu dihadapkan pada pengujian melalui observasi maupun eksperimen dan sewaktu-waktu dapat diperbaharui atau diganti.
5. Perbedaan selanjutnya terletak pada segi bahasa yang digunakan untuk memberikan penjelasan pengungkapan fakta. Istilah dalam *common sense* biasanya mengandung pengertian ganda dan samar-samar. Sedang ilmu pengetahuan merupakan konsep-konsep yang tajam yang harus dapat diverifikasi secara empirik.
6. Perbedaan yang mendasar terletak pada prosedur. Pengetahuan ilmiah didasarkan pada metode ilmiah. Dalam ilmu pengetahuan alam (*sains*), metoda yang dipergunakan adalah metoda pengamatan, eksperimen, generalisasi, dan verifikasi. Sedang ilmu sosial dan budaya juga menggunakan metode pengamatan, wawancara, eksperimen, generalisasi, dan verifikasi. Dalam *common sense* cara mendapatkan pengetahuan hanya melalui pengamatan dengan panca indera

C. Landasan Pengetahuan

Jujun Suriasumantri berpendapat, bahwa semua pengetahuan apakah itu ilmu, seni atau pengetahuan apa saja pada dasarnya memilki tiga landasan yaitu, ontologis, epistimologis, dan aksiologis.

1. Landasan Ontologis

Landasan ontologis dari ilmu berkaitan dengan objek yang ditelaah oleh ilmu adalah: apa yang ingin diketahui oleh ilmu, bagaimana wujud hakiki dari objek tersebut, dan bagaimana hubungannya dengan daya tangkap manusia? Seperti diketahui, ilmu membatasi objeknya pada fakta atau kejadian yang bersifat empiris, yang dapat ditangkap oleh alat indra, baik secara langsung maupun dengan bantuan alat lain (mikroskop, teleskop, dan sebagainya). Objek ilmu itu selalu berkaitan

dengan pengalaman manusia yang dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Sesuatu yang diluar jangkauan pengalaman, misalnya pengalaman sudah mati / meninggal dunia, hal tersebut diluar dari objek ilmu, karena belum ada orang yang pernah kembali dari lubang kuburannya untuk menceritakan pengalamannya sesudah mati / meninggal dunia.hal yang sejenis dengan pengalaman sesudah mati / meninggal dunia itu menjadi kawasan agama yang menerima kebenaran melalui wahyu. Pengetahuan ilmiah pada dasarnya merupakan abstraksi yang disederhanakan dari fakta atau kejadian alam yang sangat kompleks.untuk itu ilmu mempunyai tiga asumsi tentang objek empiris itu, yakni:

1) Objek-objek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lain yang memungkinkan dilakukan klasifikasi.
2) Objek dalam jangka waktu tertentu tidak mengalami perubahan (kelestarian yang relative).
3) Adanya determinisme, bahwa suatu gejala bukan merupakan kejadian yang kebetulan tetapi mempunyai pola tertentu yang bersifat tetap.[22]

Jadi ontologi ilmu adalah ciri-ciri yang essensial dari objek ilmu yang berlaku umum, artinya dapat berlaku juga bagi cabang-cabang ilmu yang lain. Ilmu berdasar beberapa asumsi dasar untuk mendapatkan pengetahuan tentang fenomena yang menampak. Asumsi dasar ialah anggapan yang merupakan dasar dan titik tolak bagi kegiatan setiap cabang ilmu pengetahuan. Asumsi dasar ini menurut Endang Saifudin ada dua macam sumbernya:

Pertama, mengambil dari poslutat, yaitu kebenaran-kebenaran apriori, yaitu dalil yang dianggap benar walaupun kebenarannya tidak dapat dibuktikan, kebenaran yang sudah diterima sebelumnya secara mutlak. Kedua, mengambil dari teori sarjana atau ahli yang lain terdahulu, yang kebenarannya disangsikan lagi oleh masyarakat, terutama oleh si penyelidik itu sendiri.

Megenai asumsi dasar dalam keilmuan, Harsojo menybutkan tentang macamnya dalam karangan "apakah ilmu itu dan ilmu gabungan tentang tingkah laku manusia" meliputi:

1) Dunia itu ada, dan kita dapat mengetahui bahwa dunia itu benar ada. Apakah benar dunia ada? Pertanyaan itu bukanlah pertanyaan ilmiah, melainkan pertanyaan filsafat. Oleh karena itu ilmu yang kita pelajari itu adalah ilmu

[22] *Ibid,* hlm. 5-8

pengetahuan empiris, maka landasanya adalah dunia empiris itu sendiri, yang eksistensinya tidak diragukan lagi. “Dunia itu ada” diterima oleh ilmu dengan begitu saja, dengan apriori atau dengan kepercayaan. Setelah ilmu menerima kebenaran eksistensi dunia empiris itu, barulah ilmu mengajukan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, seperti misalnya: Bagaimanakah dunia empiris alam dan social itu tersusun.

2) Dunia empiris itu dapat diketahui oleh manusia melalui pancaindera. Mungkin ada jalan-jalan lain untuk mendapatkan pengetahuan mengenai dunia empiris itu, akan tetapi bagi ilmu satu-satunya ialah jalan untuk mengetahui fakta ilmiah adalah melalui pancaindera. Adanya penyempurnaan terhadap pancaindera manusia dengan membuat alat-alat ekstension yang lebih halus … tidak mengurangi kenyataan bahwa pengetahuan tentang dunia empiris itu diperoleh melalui pancaindera. Ilmu bersandar kepada kemampuan pancaindera manusia beserta alat-alat ekstentionnya.
3) Fenoma-fenomena yang terdapat di dunia ini berhubungan satu sama lain secara kausal. Berdasarkan atas postulat bahwa fenomena-fenomena di dunia itu saling berhubungan secara kausal, maka ilmu nencoba untuk mencari dan menemukan sistem, struktur, organisasi, pola-pola dan kaidah-kaidah di belakang fenomena-fenomena itu, dengn jalan menggunakan metode ilmiahnya.

2. Landasan Epistimologi

Landasan epistimologi dari ilmu berkaitan dengan segenap proses yang dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Yakni: bagaimana prosedurnya, apakah yang harus diperhatikan agar diperoleh kebenaran, cara / teknik / sarana apa yang dapat membantu untuk mendapatkannya? Ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui proses tertentu yang disebut metode keilmuan. Seperti iptek itu sendiri, metode keilmuan itu juga mengalami perkembangan sebagai akumulasi pendapat manusia yang kini dikenal sebagai model Induktif-Hipotetiko-Deduktif.[23]

Secara umum dipahami bahwa epistemologi menjadi landasan nalar filsafat, untuk memberikan keteguhan dan kekukuhannya bahwa manusia dapat memperoleh kebenaran dan pengetahuan. Di bawah ini, dapat disebutkan beberapa nilai penting epistemologi, yaitu:

[23] Raka Joni, 198 4: 6

1) Epistemologi memberikan kepercayaan bahwa manusia mampu mencapai pengetahuan. Kita ketahui bahwa pada masa Yunani Kuno, ada kelompok sophis yang menggugat kemampuan manusia untuk memperoleh pengetahuan, dan masa kini kelompok ini lebih dikenal dengan skeptisisme dan agnotisisme. Kelompok ini menegaskan bahwa manusia tidak memiliki pengetahuan, karena tidak ada fondasi yang pasti bagi pengetahuan kita. Untuk itulah, maka kajian epistemologi penting guna mengupas problematika ini sehingga kita dapat menyatakan bahwa manusia dapat memperoleh pengetahuan dan mendapatkan kepastian.
2) Epistemologi memberikan manusia keyakinan yang kuat akan pandangan dunia (world view) dan ideologi yang dianutnya. Agama berisi pandangan dunia, pandangan dunia diperoleh melalui penalaran filsafat yang basisnya epistemologi. Karena itu, jika epistemologinya kokoh, maka kajian filsafatnya juga akan kokoh sehingga pandangan dunia dan ideologi, serta agama yang dianut pun akan memiliki kekokohan dan keutuhan.
3) Di dunia ini banyak aliran pemikiran yang berkembang dan terus disosialisasikan oleh para penganutnya. Karena setiap aliran pemikiran didapat dari penyimpulan pengetahuan, ini berarti pemikiran juga berurusan dengan epistemologi. Untuk itu, epistemologi akan memberikan kita kemampuan untuk memilih dan memilah pemikiran yang berkembang dan membanding-bandingkannya sehingga diketahui mana yang benar dan mana yang keliru.
4) Epistemologi mengukuhkan nilai dan kemampuan akal serta kebenaran dan kesahihan metodenya dalam mendapatkan pengetahuan yang benar. Bagi kalangan empirisme, indera merupakan jalan utama memperoleh pengetahuan. Adapun akal, tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang dunia, karena—seperti dikatakan David Hume—semua yang masuk akal tentang dunia adalah bersifat induktif, dan pemikiran induktif tidak menjamin kebenaran hasilnya. Jadi epistemologi akan mengkaji leshahihan metode akal atau pun metode empiris.
5) Salah satu hal yang sering kita lakukan adalah tindakan akumulatif pengetahuan. Artinya, manusia memiliki kemampuan untuk memperbanyak pengetahuan dari berbagai hal yang umumnya telah kita ketahui terlebih dahulu. Untuk itulah, epistemologi memberikan sarana bagi manusia untuk melipatgandakan pengetahuannya dari bahan-bahan dasar yang telah ada dalam mentalnya

melalui teknik-teknik yang sistematis dan teratur.

3. Landasan Aksiologi

Landasan aksiologis dari ilmu berkaitan dengan manfaat atau kegunaan pengetahuan ilmiah itu, yaitu: untuk apa pengetahuan ilmiah itu digunakan, bagaimana kaitannya dengan nilai-nilai moral? Ilmu telah berjasa mengubah wajah dunia dalam berbagai bidang serta memajukan kesejahteraan manusia. Namun kita juga menyaksikan bagaimana ilmu digunakan untuk mengancam martabat dan kebudayaan manusia.oleh karena itu, ilmu sering dianggap netral, ilmu itu bebas dari nilai baik atau buruk, dan sangat tergantung dari nilai moral ilmuwan tersebut. Dengan kata lain, manusia sebagai pemilik ilmu yang seharusnya menentukan apakah ilmunya itu bermanfaat bagi manusia atau sebaliknya.[24]

D. Pengetahuan Ilmiah dalam Pendidikan

semua kegiatan pembelajaran itu sesungguhnya harus “ilmiah”. Tidak asal-asalan apalagi penuh dengan kebohongan. Apapun jenis substansi pembelajaran, pola sajiannya harus menggunakan pendekatan ilmiah. pendekatan ilmiah disini bermakna bahwa transformasi substansi pembelajaran dan pemecahan masalah-masalah pendidikan menggunakan acuan kerja yang dianut dalam dunia ilmu.

Cara kerja pengetahuan ilmiah dibidang pendidikan yaitu dengan menggunakan prinsip-prinsip dan metode kerja ilmiah yang ketat, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif sehingga ilmu pengetahuan dapat diiris-iris menjadi bagian-bagian yang lebih detail dan mendalam. Menurut Akhmad Sudrajat, dengan pendekatan ilmiah ini (yang disebut olehnya pendekatan sains) kemudian dihasilkan sains pendidikan atau ilmu, dengan berbagai cabangnya, seperti:

1. Sosiologi pendidikan, cabang ilmu pendidikan sebagai aplikasi dari sosiologi dalam pendidikan untuk mengkaji factor-faktor sosial dalam pendidikan.
2. Psikologi pendidikan, cabang ilmu pendidikan sebagai aplikasi dari psikologi untuk mengkaji perilaku dan perkembangan individu dalam belajar.
3. Administrasi atau manajemen pendidikan, cabang ilmu pendidikan sebagai aplikasi dari ilmu manajemen untuk mengkaji tentang upaya memanfaatkan berbagai sumber daya agar tujuan-tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

---

[24] Jujun S. Suriasumantri. *Op. cit.*, hlm. 35-36

4. Teknologi pendidikan, cabang ilmu pendidikan sebagai aplikasi dari ilmu teknologi untuk mengkaji aspek metodologi dan teknik belajar yang efektif dan efisien.
5. Evaluasi pendidikan, merupakan cabang ilmu pendidikan sebagai aplikasi dari psikologi pendidikan dan statistika untuk menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa.
6. Bimbingan dan konseling, cabang ilmu pendidikan sabagai aplikasi dari beberapa displin ilmu, seperti: sosiologi, teknologi, dan terutama psikologi.

Pengetahuan ilmiah ini tidak terlepas dari sifat-sifat ilmu itu sendiri, sifat-sifat ilmu dimaksud disajikan berikut ini.

1. Ilmu itu dinamis, dimana siswa dan semua orang, termasuk guru, harus terus menjadi pembelajar untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Ilmu itu milik semua orang, dimana sifat ilmu itu netral. Ilmu itu hanya akan dimiliki oleh siswa atau siapa saja yang mau mempelajarinya. Seseorang dimungkinkan memiliki keahlian substantive, meski tidak ada bukti formal (ijazah) yang menjadi tanda bahwa seseorang tersebut ahli dibidangnya.
3. Ilmu memiliki metodologi, berupa prosedur kerja dalam rangka pengembangannya. Prosedur yang dimaksud adalah: identifikasi masalah, rumusan masalah, penjelajahan data, analisis, simpulan, dan refleksi.
4. Ilmu akan cepat berkembang jika dapat bermanfaat secara massal.
5. Aplikasi ilmu yang langka sangat mahal, khususnya dibidang biologi dan kedokteran. Pada sisi lain, karya bidang ilmu yang dipatenkan bernilai tinggi.
6. Ilmu akan mati jika tidak ada yang mengembangkan atau mewariskannya. Karena itu, guru atau ilmuwan harus dapat berkarya untuk warisan sejarah bagi ilmu pengetahuan. Transformasi ilmu pengetahuan di ruang kelas menjadi bagian dari upaya pencerdasan, sekaligus menghindarkan ilmu dari kematian itu.

BAGIAN 4

LANDASAN HUKUM DALAM PENDIDIKAN

Dunia pendidikan sebagai ruang bagi peningkatan kapasitas anak bangsa haruslah dimulai dengan sebuah cara pandang bahwa pendidikan adalah bagian untuk mengembangkan potensi, daya pikir dan daya nalar serta pengembangan kreatifitas yang dimiliki. Sistem pendidikan di Indonesia merupakan suatu system yang harus mampu menciptakan anak bangsa yang memiliki sensitifitas terhadap lingkungan hidup dan krisis sumber-sumber kehidupan, serta mendorong terjadinya sebuah kebersamaan dalam keadilan hak. Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.

Pendidikan merupakan bagian penting dari manusia yang merupakan rangkaian kegiatan menuju pendewasaan guna menuju kehidupan yang lebih berarti. Anak-anak menerima pendidikan dari orang tuanya dan manakala anak-anak ini sudah dewasa dan berkeluarga mereka akan mendidik anak-anaknya, begitu juga di sekolah dan perguruan tinggi, para siswa dan mahasiswa diajar oleh guru dan dosen. Landasan Pendidikan merupakan salah satu kajian yang dikembangkan dalam berkaitannya dengan dunia pendidikan.

A. Pengertian Landasan Hukum dalam Pendidikan

Pendidikan berasal dari kata “didik” lalu kata ini mendapatkan awalan “ME”, Sehingga menjadi kata “mendidik” artinya memelihara dan memberikan latihan yang diperlukan adanya ajaran,tuntunan dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Selanjutnya pengertian pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseprang atau sekelompok orang dalam upaya mendewasakn manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Depdikbud,1992:232)

Hukum merupakan suatu aturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam hal ini adalah kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan-aturan baku mengenai segala proses dan hal yang berkaitan dengan pendidikan. Cukup banyak kegiatan pendidikan yang dilandasi oleh aturan-aturan lain seperti aturan kurikulum, aturan cara mengajar, cara membuat persiapan, supervisi dan lain sebagainya. Kata yuridis berkaitan dengan hukum, maka yang menjadi asumsi dalam pendidikan adalh sumber-sumber hukum yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia.

Landasan hukum pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang di jadikan titik tolak dalam pendidikan. Terutama pendidikan nasional (tatang saripudin dan nuraini,2006:6) sedangkan menurut Made Pidarta (1997:40) landasan hukum diartikan sebagai suatu aturan baku sebagai tempat berpijak dan titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam hal ini adalah kegiatan pendidikan.

Jadi, landasan hukum pendidikan adalah dasar atau pondasi perundang-undangan yang menjadi pijakan dan pegangan dalam pelaksanaan pendidikan di suatu Negara. Dalam hal ini aturan yang menjadi dasar hukum pendidikan di Indonesia. Diantara dasar hukum pendidikan di Indonesia yaitu: UUD 1945,UU No 20 tahun 2003 tentang sisitem pendidikan nasional,UU No 14 Tahun 2005 Tentang guru dan dosen, PP No 19 tahun 2005 tentang setandar nasional pendidikan dan lain sebagainya.

Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, dalam hal ini kegiatan pendidikan yaitu pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

B. Dasar, Fungsi dan Tujuan Pendidikan

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 2 dan 3, Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

1. Landasan Hukum Pendidikan Di Indonesia

Sehubungan pendidikan nasional sunaryo w. (1969:3) merumuskan, pendidikan nasional adalah suatu sisitem pendidikan yang berlandaskan dan dijiwai oleh suatu filsafat hidup suatu bangsa dan bertujuan untuk mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut. Dengan demikian pendidikan nasional suatu Negara di landasi oleh filsafat Negara tersebut. Yang menjadi landasan hukum pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan Indonesia menurut UUD 1945

Sebagaimana sudah dikemukakan pada bagian pendahuluan bahwa bangsa Indonesia Sangat memperhatikan dan mementingkan pendidikan nasional. Sebab hal itu menjadi salah satu tujuan bangsa,cita-cita bangsa dan tujuan Negara. Hal itu terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat *"……mencerdaskan kehidupan bangsa....."* dan hal ini di pertegas di dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1-5 yang menyatakan :

Ayat 1 : Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;

Ayat 2 : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;

Ayat 3 :Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang;

Ayat 4 : Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;

Ayat 5 : Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

2) Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003

Dalam undang-undang ini pada pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud :

1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar danproses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
3) Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
4) Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
5) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6) Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7) Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
8) Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9) Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
10) Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

11) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14) Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15) Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
16) Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudanpendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
17) Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18) Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
19) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
20) Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21) Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

22) Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
23) Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
24) Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
25) Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26) Warga negara adalah warga negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27) Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
28) Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
29) Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
30) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.

Lebih lanjut dalam UU No. 20 tahun 2003 pada pasal 4 yang menyebutkan tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan, antara lain:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Kemudian uraian tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat dan Pemerintah yang tertuang pada pasal 5-11 UU No. 20 tahun 2003, yaitu:

Pasal 5:

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6:

1. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
2. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraanPendidikan

Pasal 7:

1. Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
2. Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya

Pasal 8:

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 10

Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Begitu juga dengan penjelasan tentang peserta didik yang dijelaskan pada pasal 12

Pasal 12

1. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
   1) Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
   2) Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
   3) Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
   4) Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
   5) Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
   6) Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masingmasing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
2. Setiap peserta didik berkewajiban:
   1) Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
   2) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Peraturan Menteri Pendidikan No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Berdasarkan pertimbangan di dalam Peraturan Menteri, bahwa pendidikan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dan oleh karena itu penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama ketiga unsur tersebut; kemudian bahwa penjaminan mutu pendidikan perlu terus didorong dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan arah dalam pelaksanaannya; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, diantaranya:

1. Mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional.
2. Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut SPMP adalah subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional yang fungsi utamanya meningkatkan mutu pendidikan.
4. Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan yang selanjutnya disebut SPM adalah jenis dan tingkat pelayanan pendidikan minimal yang harus disediakan oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan peraturan perundangan lain yang relevan.

6. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan.
7. Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal yang selanjutnya disebut BPPNFI adalah unit pelaksana teknis Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal.
8. Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal yang selanjutnya P2PNFI adalah unit pelaksana teknis Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal.
9. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
10. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BANPT adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
11. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
12. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
13. Badan akreditasi provinsi yang selanjutnya disebut BAP adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

14. Departemen adalah departemen yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
15. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

Dengan adanya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan maka perlu adanya Tujuan Penjaminan Mutu Pendidikan,diantaranya:

1. Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP).
2. Tujuan antara penjaminan mutu pendidikan adalah terbangunnya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) termasuk:
   1) Terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal;
   2) Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal pada satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah;
   3) Ditetapkannya secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal;
   4) Terpetakannya secara nasional mutu pendidikan formal dan nonformal yang dirinci menurut provinsi, kabupaten atau kota, dan satuan atau program pendidikan;
   5) terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan tersambung yang menghubungkan satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah.

C. Peranan Landasan Hukum Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pengajarandan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang di butuhkan oleh dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.

Hukum merupakan suatu aturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam hal ini adalah kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan-aturan baku mengenai segala proses dan hal yang berkaitan dengan pendidikan. Cukup bamnyak kegiatan pendidikan yang dilandasi oleh aturan-aturan lain seperti aturan kurikulum, aturan cara mengajar, cara membuat persiapan, supervise dan lain sebagainya (Made pidarta,2007: 40).

Jadi peranan dan atau hubungan antara pendidikan dan hukum seperti halnya tercantum didalam Pasal 2 dan 3 UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pemerintah menjamin terselengaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Wajib belajar merupakan tugas dan tanggung jawab Negara yang diselelengarakan oleh lembaga pendidikan nasional, pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan hal itu maka tujuan dan pendidikan nasional akan tercapai sesuai dengan harapan dan cita-cita Negara.

Seperti hubungan antara pancasila dan system pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan dimana pancasila adalah dasar Negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila mempunyai fungsi dalam hidup dan kehidupan bangsa dan Negara Indonesia. Antara lain pancasila sebagi dasar negara, alat pemersatu bangsa, sumber dari segala sumber hukum, pandangan hidup bangsa, dan sumber ilmu pengetahuan di Indonesia (Jalaludin,1997:143).

BAGIAN 5

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MULTIBUDAYA

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang di dalamnya terdapat banyak kultur budaya. Banyaknya kultur kebudayaan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi negara Indonesia dan menjadi identitas bangsa Indonesia.

Pendidikan multikultural berpegang teguh pada kesatuan dan toleransi tidak memandang suatu perbedaan sebagai masalah. Perbedaan dipandang sebagai perantara dalam menjaga kesatuan dan sikap toleransi antar umat beragama.

Dalam pandangan pendidikan multikultural, setiap individu memiliki hak yang sama dalam menjalankan kehidupan tanpa terkecuali. Dengan demikian setiap individu diharapkan untuk bisa menghargai orang lain apapun perbedaan yang ada di antara mereka. Keberagaman kultur diharapkan bukan menjadi masalah tetapi justru sebagai perantara dalam menjalin hubungan antar etnis, suku, dan umat beragama dalam menggapai kesejahteraan bersama tanpa mengganggu satu sama lain dan demi terwujudnya keadilan sosial yang berpegang teguh pada sikap saling toleransi.

A. Pendidikan sebagai Transformasi Budaya

Banyak berbagai kalangan yang melakukan pengkajian tentang pendidikan dengan pendekatan interdisipliner, dan ada pula yang memakai pendekatan multi indisipliner. Beberapa bentuk pengkajian yang telah dilakukan tersebut bisa dilihat diantaranya adalah kajian tentang relasi pendidikan dengan kekuasaan, pendidikan dengan demokrasi, dan pendidikan dengan multikulturalisme, yang melahirkan konsep pendidikan multicultural.

Wacana tentang pendidikan multicultural ini dimaksudkan untuk merespons fenomena konflik etnis, sosial budaya, yang kerap muncul di tengah-tengah masyarakat yang berwajah multicultural. Tentu penyebab konflik tersebut banyak sekali, tetapi kebanyakan disebabkan oleh perbedaan suku, agama, ras, etnis, dan budaya.

Maka menjadi keharusan bagi kita bersama untuk memikirkan upaya pemecahannya, termasuk pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah kalangan pendidikan. Pendidikan sudah selayaknya berperan dalam menyelesaikan masalah konflik yang terjadi di masyarakat. Minimal, pendidikan harus mampu memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa konflik bukanlah suatu hal yang baik untuk dibudayakan. Selayaknya pula, pendidikan mampu memberikan tawaran-tawaran yang mencerdaskan, antara lain dengan cara membuat materi, metode, hingga kurikulum yang mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya sikap saling toleran, menghormati perbedaan suku, agama, ras, etnis dan budaya masyarakat Indonesia yang multicultural. Sudah selayaknya pendidikan berperan sebagai media transformasi sosial, budaya dan multikulturalisme.

Dari latar belakang masalah tersebut, selayaknyalah kita mengembangkan paradigma baru dalam dunia pendidikan, yakni paradigma pendidikan multicultural yang akhirnya bermuara pada terciptanya sikap para peserta didik yang mau memahami, menghormati, menghargai perbedaan budaya, etnis agama dan lainnya yang ada di masyarakat, bahkan jika dimungkinkan mereka bisa bekerjasama. Kemudian pendidikan multicultural memberikan penyadaran bahwa perbedaan suku, agama, etnis dan budaya tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk bersatu. Dengan perbedaan, diharapkan peserta didik tetap bersatu dan tidak tercerai berai. Mereka juga diharapkan untuk menjalin kerjasama serta berlomba-lomba dalam kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Epistemologi Pendidikan

Dalam kajian pemikiran pendidikan perlu diketahui tentang dua istilah penting yang hampir sama bentuknya dan sering digunakan dalam dunia pendidikan. Dua istilah penting tersebut adalah pedagogi dan pedagogic. Pedagogi berarti pendidikan sedangkan pedagogic berarti ilmu pendidikan.

Pedagogic atau ilmu pendidikan berarti ilmu yang menyelidiki dan merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. Istilah ini berasal dari bahasa yunani 'pedagogia' yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Sedangkan 'paedagogos' berasal dari kata 'paedos' yang berarti anak dan 'agoge' yang berarti saya membimbing atau memimpin. Pedagog dari pedagogos berarti seseorang yang tugasnya membimbing anak dalam pertumbuhannya kearah kemandirian dan sikap tanggung jawab.

Secara sederhana dan umum, pendidikan bermakna sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Bagi kehidupan umat manusia, pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan, mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup dan berkembang sejalan dengan aspirasi untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. Selain itu, definisi pendidikan juga dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara dalam kongres taman siswa yang pertama pada 1930 ia menyebutkan, bahwa pendidikan pada umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Dalam taman siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya. Menurut Drikarya pendidikan adalah upaya untuk memanusiakan manusia muda. Crow dan crow mendefinisikan pendidikan sebagai proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya dan membanu meneruskan adat dan budaya serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi.

Dari berbagai definisi tentang pendidikan di atas, dapatlah diikhtisarkan bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai:

1. Suatu proses pertumbuhan yang menyesuaikan dengan lingkungan.
2. Suatu pengarahan dan bimbingan yang diberikan kepada anak-anak dalam pertumbuhannya.
3. Suatu usaha sadar untuk menciptakan suatu keadaaan atau situasi tertentu yang dikehendaki oleh masyarakat.
4. Suatu pembentukan karakter, kepribadian dan kemampuan anak-anak dalam menuju kedewasaan.

Kehidupan manusia primitive sebagian besar penghidupannya hanya bergantung pada usaha berburu, meramu, dan menangkap ikan. Dengan kehidupan primitive tersebut dapat dipandang cukup pendidikan anak tersebut apabila mempunyai keahlian dan keterampilan untuk keperluan berburu dan menangkap ikan. Demikian cara pendidikan itu dilaksanakan sangat sederhana. Mungkin anak pada masa tersebut tidak dijelaskan secara khusus tentang penggunaan alat berburu dan alat menangkap ikan dan bagaimana cara agar menangkap ikan yang banyak, kapan harus tahu musim banyak ikan dan sebagainya. Melainkan mereka langsung ikut membantu orangtua mereka dalam

kegiatan-kegiatan tersebut. Cara demikian masih dilanjutkan pada zaman kehidupan bercocok tanam secara primitive.

Tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kehidupan manusia dan masyarakat berubah menjadi sangat kompleks, serta makin maju pesat. Dalam masyarakat ini, kita dapati sekolah-sekolah formal, di samping pendidikan dalam keluarga, yang isi maupun cara pelaksanaan pendidikannya sudah jauh berbeda.

Pendidikan dewasa ini harus dilaksanakan dengan teratur dan sitematis, agar dapat memberikan hasil yang sebaik-baiknya. Dunia pendidikan selain dihadapkan dengan perkembangan kemajuan teknologi dan informasi, juga dihadapkan pada realitas sosial, budaya yang sangat beragam (multicultural). Dengan demikian, pendidikan mau tidak mau juga harus merespons dan menyesuaikan (adaptasi) dengan persinggungan budaya masyarakat sekitar. Bila ditinjau dari fungsinya, objek ilmu pendidikan dapat dibagi menjadi dua:

1. Objek formal yaitu bidang yang menjadi keseluruhan ruang lingkup garapan riset pendidikan.
2. Objek material yaitu aspek-aspek atau hal-hal yang menjadi garapan langsung riset pendidikan.

Dengan demikian, dapat terjadi bahwa sekelompok cabang ilmu mempunyai objek formal yang sama, misalnya manusia. Tetapi, setiap cabang ilmu mempunyai objek material yang berbeda. Misalnya antropologi mempunyai objek asal usul, perkembangan, ciri-ciri spesies atau ras manusia.

C. Epistemiologi Multikulturalisme

Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran/paham). Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik.

Dengan demikian, setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Pengingkaran suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui (politics recognition) merupakan akar dari segala ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan.

Pendidikan merupakan wahana yang paling tepat untuk membangun kesadaran multikulturalisme, karena dalam tataran ideal, pendidikan seharusnya bisa berperan sebagai juru bicara bagi terciptanya fundamen kehidupan multicultural yang terbatas. Hal itu dapat berlangsung apabila ada perubahan paradigma dalam pendidikan, yakni mulai dari penyeragaman menuju identitas tunggal, lalu kearah pengakuan dan penghargaan keragaman identitas dalam kerangka penciptaan harmonisasi kehidupan. Selanjutnya harus diakui bahwa multikulturalisme kebangsaan Indonesia belum sepenuhnya dipahami oleh segenap warga masyarakat sebagai sesuatu yang diberikan, takdir tuhan, dan bukan factor bentukan manusia. Memang masyarakat telah memahami sepenuhnya bahwa setiap manusia terlahir berbeda, baik secara fisik maupun non fisik, tetapi nalar kolektif masyarakat belum bisa menerima relitas bahwa setiap individu atau kelompok tertentu memiliki sistem keyakinan , budaya, adat, agama dan tata cara ritual yang berbeda. Nalar kolektif masyarakat tentang multikulturalitas kebangsaan masih terpengaruh oleh logosentrisme yang syarat akan prasangka, kecurigaan, bisa kebencian dan reduksi terhadap kelompok yang berada di luar dirinya. Akibatnya ikatan-ikatan sosial melaui kolektivitas dan kerjasama hanya berlaku di dalam kelompoknya sendiri, tidak berlaku bagi kelompok lain.

Kondisi multikulturalitas kebangsaan bisa diibaratkan sebagai pedang bermata ganda, di satu sisi ia merupakan modalitas yang bisa menghasilkan energy positif, tetapi di sisi lain, manakala keanekaragaman tersebut tidak bisa dikelola dengan baik, ia bisa menjadi ledakan destruktif yang bisa menghancurkan struktur dan pilar-pilar kebangsaan.

1. Akar sejarah multikulturalisme

Secara historis, sejak zaman reformasi kebudayaan Indonesia cenderung mengalami disintegrasi. Saat krisis moneter berlangsung ekonomi dan politik terjadi krisis sosio cultural di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Krisis sosial budaya yang meluas itu dapat disaksikan dalam berbagai bentuk disorientasi dan dislokasi banyak kalangan masyarakat, misalnya disintegrasi sosial politik yang bersumber dari euphoria kebebasan yang hampir kebablasan, lenyapnya kesabaran sosial dalam menghadapi realitas kehidupan yang semakin sulit sehingga mudah mengamuk dan melakukan berbagai tindakan kekerasan dan anarki, merosotnya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum, etika, moral dan kesantunan sosial. Semakin meluasnya penyebaran narkotika dan penyakit-penyakit sosial lainnya. Berlanjutnya konflik dan kekerasanyang bermuatan politis dan SARA. Disorientasi,

dislokasi, atau krisis sosial budaya di kalangan masyarakat kita semakin merebak seiring dengan meningkatnya penetrasi dan ekspansi budaya barat sebagai akibat proses globalisasi yang terus tidak terbendung, berbagai ekspresi sosial budaya yang sebenarnya asing dan tidak memiliki basis dan preseden kulturalnya dalam masyarakat dan terus menyebar sehingga memunculkan kecenderungan-kecenderungan gaya hidup baru yang tidak selalu sesuai dan kondusif bagi kehidupan sosial budaya masyarakat dan bangsa.

2. Multikulturalisme dan penyebarannya

Walaupun multikulturalisme itu telah digunakan oleh para pendiri bangsa ini untuk mendesain kebudayaan Indonesia namun untuk orang Indonesia masa kini multikulturalisme masih dianggap sesuatu yang asing. Konsep multikulturalisme di sini tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman suku bangsa atau kebudayaan yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Mengkaji multikulturalisme tidak bisa dilepaskan dari permasalahan yang mendukung ideology ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan usaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan, prinsip-prinsip etika dan moral juga tingkat daya saing dan produktivitas. Multikulturalisme bukan hanya sebuah wacana, tetapi sebuah idelogi yang harus diperjuangkan. Multikulturalisme dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakat,. Multikulturalisme bukan sebuah ideology yang berdiri sendiri, terpisah dari ideology-ideologi yang lainnya. Tetapi multikulturalisme masih tetap membutuhkan seperangkat konsep-konsep yang mendukungnya. Untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan yang berupa bangunan konsep-konsep yang relevan yang mendukung keberadaan dan berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Bangunan konsep-konsep ini harus dikomunikasikan di antara para ahli, yang mempunyai perhatian ilmiah, yang sama tentang multikulturalisme, sehingga terdapat kesamaan pemahaman, dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideology ini. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa,

keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan public, HAM, hak budaya komuniti dan lain-lain.

3. Masyarakat Indonesia yang Multicultural

Untuk menciptakan tatanan masyarakat indonesia yang multicultural tentu tidak mudah, oleh karena itu dibutuhkan konsep-konsep yang mendukung demi terwujudnya tatanan multicultural yang betul-betul berpijak pada konsep yang kuat dan tidak mudah terombang ambing oleh kondisi lingkungan. Inti cita-cita spirit reformasi adalah terbentuknya sebuh masyarakat sipil yang demokratis, ditegakkannya hukum, terselenggaranya pemerintah yang bersih dari KKN, terwujudnya keteraturan sosial, terciptanya rasa aman, terjaminnya kelancaran produktivitas masyarakat dan kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia. Hasil dari reformasi ini adalah, bahwa masyarakat Indonesia yang bercorak majemuk, yang berisikan potensi kekuatan primordial, yang otoriter milteristik harus digeser menjadi ideology keanekaragaman kebudayaan atau ideology multikulturalisme. Dalam ideology ini kelompok- kelompok budaya tersebut berada dalam kesetaraan derajat, demokratis dan toleransi sejat. Dengan sendirinya masyarakat majemuk belum tentu dapat dinyatakan sebagai masyarakat multicultural, karena bisa saja didalamnya terdapat hubungan antar kekuatan masyarakat varian budaya yang tidak simetris, yang selalu hadir dalam bentuk dominasi dan hegemoni. Bagi masyarakat Indonesia yang telah melewati reformasi, konsep masyarakat multicultural bukan hanya sebuah wacana, atau sesuatu yang dibayangkan. Tetapi konsep ini adalah ideology yang harus diperjuangkan karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM dan kesejahteraan masyarakat. Kesetaraan derajat kemanusiaan hanya mungkin terwujud dalam praktik nyata apabila ada pranata sosial, terutama pranata hukum, yang merupakan mekanisme control secara ketat dan adil yang mendukung dan mendorong terwujudnya prinsip demokrasi dalam kehidupan nyata.

Wacana Multikulturalisme atau pendidikan Multikultural di Indonesia menemukan momentumnya pada saat tumbangnya rezim Soeharto. Pada saat itu terjadi gejolak politik yang sangat besar yang disertai dengan konflik horizontal yang semakin rusuh sehingga membuat tiak stabilnya kondisi nasional kala itu. Hal ini tentunya sangatlah mencengangkan dan menimbulkan pertanyaan pada masyarakat tentang sistem yang cocok bagi negara Indonesia yang majemuk.

Asas historitas bangsa Indonesia sendiri merupakan negara yang ber-Bhineka Tunggal Ika, yang terdiri dari keragaman suku bangsa dan kulturnya. Sebelum adanya kebangkitan nasional, masyarakat masih terpecah belah berdasarkan rasa kesukuan dan kedaerahan. Tonggak kebangkitan nasional yang menghantarkan bangsa Indonesia pada kesetaraan kultural. H.A.R Tilaar, berpendapat bahwa sejak kebangkitan nasional tahun 1908 sebenarnya sudah memunculkan kesadaran baagaimana membangun masyarakat dan bangsa berdasarkan kesetaraan kultural.

Bhineka Tunggal Ika yang berarti persatuan dalam perbedaan merupakan semboyan negara Republik Indonesia. Ungkapan ini mengekspresikan suatu keinginan kuat tidak hanya kalangan pemimpin politik saja tetapi juga kalangan berbagai lapisan penduduk untuk mencapai kesatuan meskipun ada karakter yang heterogen pada negara yang baru terbentuk itu.

Ahmad Syafi'i Maarif berpendapat bahwa momentum kebangkitan nasional bukanlah pada berdirinya Boedi Utomo tahun 1908, karena Boedi Utomo hanya untuk lingkup yang terbatas yaitu untuk mempresentasikan Jawa dan Madura. Beliau justru lebih berpendapat jika tonggak kebangkitan nasional ini adalah pada tanggal 28 Oktober 1928 yaitu momentum Sumpah Pemuda. Pada momen tersebut seluruh pemuda Indonesia mengucapkan ikrarnya bersama: bertanah air satu (tanah air Indonesia), berbangsa satu (bangsa Indonesia), dan berbahasa satu (bahasa Indonesia).

Pendidikan di Indonesia secara perundangan telah diatur denganmemberikan ruang keragaman sebagai bangsa. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 UU N0. 20 Tahun 2003, salah satu diktumnya menyatakan tentang "pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa". Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sangat terbuka untuk menerapkan pendidikan multikultural kedalam kurikulum pendidikan nasional.

Pendidikan multikultural dapat melatih dan membangun karakter siswa mampu bersikap demokratis, humanis, dan pluralis dalam lingkungan mereka. Dengan begitu dalam kehidupan sehari-hari siswa dapat selalu bersikap demokratis, pluralis, dan humanis.

4. Nilai-Nilai Universal dalam Pendidikan Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural bertujuan untuk menjunjung tinggi harkat martabat manusia menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal, yaitu, nilai kesetaraan, toleransi, pluralisme, dan demokrasi.

1) Nilai Kesetaraan

Kesetaraan merupakan sebuah nilai yang menganut prinsip bahwa setiap individu memiliki kesetaraan hak dan posisi dalam masyarakat.oleh karena itu setiap individu tanpa terkecuali memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial di masyarakat.

Di dalam agama apapun akan mempunyai dampak yang sangat luas apabila sebuah agama mempunyai kepedulian terhadap lingkungan masyarakat, karena agama harus mampu menerjemahkan visi kemaslahatan sosial bagi masyarakat. Kesetaraan dalam agama, terutama agama Islam, Allah telah memerintahkan untuk menghapuskan perbudakan. Prinsip kesetaraan Islam tidak hanya tentang kehidupan beragama saja akan tetapi dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

2) Nilai Toleransi

Toleransi adalah suatu sikap bagaimana menghargai orang lain yang memiliki perbedaan. Pendidikan multikultural sanggat menghargai perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Begitu pula Islam adalah agama yang mempunyai semangat toleransi yang tinggi. Islam bersifat adil dan moderat dalam arti tidak ekstrem kanan maupun ekstrem kiri

Hal yang tidak terfikirkan oleh umat Islam saat ini telah lama dilakukan oleh Rasulullah saw. sikap toleransi yang beliau terapkan saat ini menggambarkan bahwa beliau sangat menghargai umat yang lainnya. Dalam pandangan yang lebih luas ini, sesungguhnya nilai-nilai toleransi yang terdapat dalam syari'at Islam adalah nilai-nilai yang terdapat dalam pebdidikan multikultural.

3) Nilai Demokrasi

Prinsip demokrasi dalam pendidikan merupakan suatu prinsip yang dapat membebaskan manusia dari berbagai jenis kungkungan serta memberikan kesempatan bagi perkembangan manusia. Masuknya ideologi demokrasi ke dalam pendidikan merupakan bentuk pengakuan terhadap kekuasaan rakyat.

Islam yang memuat nilai-nilai universal salah satunya juga memuat nilai demokrasi. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa, Islam mendahului faham demokrasi dengan menetapkan kaidah-kaidah yang menjadi penopang esensi

dan substansi demokrasi. Keistimewaan demokrasi menurut Yusuf Qardhawi adalah dapat memperjuangkan dan melindungi rakyat dari kesewenag-wenangan. Rasulullah saw. bersabda " menimba ilmu bagi laki-laki dan perempuan muslim adalah wajib hukumnya". Dengan begitu prinsip demokrasi dalam pendidikan sesungguhnya memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk dapat mengenyam pendidikan (*Education for all*).

Tumbuhnya demokrasi dalam proses pendidikan mendorong tumbuhna multikulturalisme dalam pendidikan. Multikulturalisme memasuki berbagai ruang lingkup kehidupan masyarakat, terlebih aspek pendidikan. Masyarakat akan memperoleh keadilan demokrasi apabila seluruh kebutuhan rakyat dapat terakomodir dengan baik. Lebih jauh lagi demokrasi memuat nilai-nilai keadilan untuk rakyat.

4) Nilai Pluralisme

Perdebatan mengenai posisi kelompok agama dalam masyarakat merupakan kajian dari pluralisme, sehingga apa yang disebut oleh pluralisme adalah sebuah paham yang memperjelas dan meyakiniperbedaan dalam agama. Pluralisme mengajak kepada masyarakat agar melihat keberadaan perbedaan agama sebagai bagian yang realistis dalam kehidupan manusia.

Islam mengajak kepada manusia yang berasal dari agama-agama keyakinan yang berbeda untuk dapat menyatukan keanekaragaman dalam persamaan. Sesungguhnya pluralisme menginginkan tatanan masyarakat yang dialogis, toleran, dan dinamis.

Pluralisme bukanlah sebuah paham yang menganggap semua agama adalah sama, terlebih pluralisme adalah paham untuk menghargai perbedaan agama. Dengan keberagaman yang terdapat di masyarakat, sering menimbulkan tindakan destruktif kepada umat beragama lain. Oleh karena itu pluralisme akan memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama termasuk dalam memilih agama.

Pluralisme memiliki basis teologi yang kuat di dalam khasanah Islam. Meskipun begitu pluralisme tidak hanya untk konteks ke-Islaman saja, melainkan dalam konteks global. Pluralisme merupakan kemajemukan yang mengakui adanya perbedaan.

D. Konsep Pendidikan Multicultural

Menurut Prof. HAR Tilaar, pendidikan multicultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang interkulturalisme seusai perang dunia ke 2 kemunculan gagasan dan kesadaran interkulturalisme ini, selain terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM, kemerdekaan dari kolonialisme dan diskriminasi sosial dan lain-lain, juga karena meningkatnya pluralitas di negara-negara barat sendiri sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari Negara-negara baru merdeka ke amerika dan eropa.

Mengenai focus pendidikan multicultural, tilaar mengungkapkan bahwa dalam program pendidikan multicultural , focus tidak lagi diarahkan semata-mata pada kelompok rasial, agama dan cultural domain atau mainstream. Focus seperti ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan intercultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya mainstream yang dominan, yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat mainstream.

Pendidikan multicultural sebenarnya merupakan sikap peduli dan mau mengerti atau politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas. Dalam konteks tersebut pendidikan multicultural melihat masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap tidak sama dan tidak mengenal tidak hanya berakar dari ketimpangan struktur rasial, tetapi paradigma pendidikan multicultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang sosial budaya ekonomi pendidikan dan lain sebagainya.

E. Paradigma Pendidikan Multicultural

Kemajemukan masyarakat memberikan dampak positif dan dampak negative . karena factor inilah justru terkadang sering menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat, yang pada akhirnya konflik-konflik antar kelompok tersebut akan memberikan distabilitas keamanan, sosio-ekonomi, dan ketidakharmonisan sosial.

Tentang banyaknya kerusuhan dan konflik yang berlatar belakang SARA menunjukkan bahwa telah terjadi kegagalan pendidikan dalam menciptakan pluralism dan multikulturalisme. Symbol budaya, agama, ideology, bendera, baju sebenarnya boleh berbeda tapi pada hakikatnya kita adalah satu bangsa yang setuju dalam perbedaan. Pendidikan multicultural disini juga dimaksudkan bahwa manusia dipandang sebagai

makhluk makro dan sekaligus makhluk mikro yang tidak akan terlepas dari akar budaya bangsa dan kelompok etnisnya. Akar makro yang kuat akan menyebabkan manusia tidak akan pernah tercerabut dari akar kemanusiannya. Sedangkan akar mikro yang kuat akan menyebabkan manusia mempunyai tempat berpijak yang kuat dan tidak mudah di ombang ambing oleh perubahan yang amat cepat yang menandai kehidupan modern dan pergaulan dunia global. Pendidikan multikulturalisme biasanya mempunyai ciri-ciri:

1. Tujuannya membentuk manusia budaya dan menciptakan masyarakat berbudaya.
2. Materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis.
3. Metodenya demokratis, yang mengahrgai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya bangsa dan kelompok etnis (multikulturalis).
4. Evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputu persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya.

F. Pendekatan pendidikan multicultural

Ada beberapa pendekatan dalam proses pendidikan multicultural, diantaranya:

1. Tidak lagi menyamakan pandangan pendidikan dengan persekolahan atau pendidikan multicultural dengan pendidikan sekolah-sekolah formal. Pandangan yang lebih luas tentang pendidikan sebagi transmisi kebudayaan membebaskan pendidik dari asumsi keliru bahwa tanggung jawab primer mengembangkan kompetensi kebudayaan di kalangan anak didik semata mata berada di tangan mereka tapi justru semakin banyak pihak yang bertanggung jawab karena program sekolah seharusnya terkait dengan pembelajaran informal di luar sekolah.
2. Menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik. Artinya tidak perlu lagi mengasosiasikan kebudayaan semata-mata dengan kelompok-kelompok etnik sebagaimana yang selama ini terjadi. Pendekatan ini diharapkan dapat mengilhami para penyusun program pendidikan multicultural untuk melenyapkan kecenderungan memandang anak didik secara stereotape menurut identitas etnik mereka, sebaliknya mereka akan meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan perbedaan di kalngan anak didik dari berbagai kelompok etnik.
3. Karena pengembangan kompetensi dalam suatu kebudayaan baru biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah mempunyai kompetensi, maka dapat dilihat lebih jelas bahwa upaya untuk mendukung sekolah-

sekolah yang terpisah secara etnik merupakan antithesis terhadap tujuan pendidikan multicultural. Mempertahankan dan memperluas solidaritas kelompok etnis akan menghambat sosialisasi ke dalam kebudayaan baru

4. Pendidikan multicultural meningkatkan kompetensi beberapa kebudayaan, kebudayaan mana yang akan diapdopsi itu ditentukan secara proporsional sesuai situasi dan kondisi yang berlangsung.
5. Kemungkinan bahwa pendidikan formal ataupun non formal meningkatkan kesadaran akan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kesadaran seperti ini kemudian akan menjauhkan kita dari konsep dwi budaya atau antara pribumi dan non pribumi.

G. Pendidikan multicultural dan pendidikan global

Pendidikan multicultural dapat kita rumuskan sebagai studi tentang keanekaragaman kultural, hak asasi manusia dan pengurangan atau penghapusan berbagai jenis prasangka demi membangun suatu kehidupan masyarakat yang hidup adil dan tentram. Pendidikan kultural berarti mengembangkan kesadaran atas kebanggaan seseorang atas bangsanya, dengan demikian pendidikan global tidak mengurangi pengembangan kesadaran akan kebanggan terhadap suatu bangsa. Oleh sebab itu tidak ada pendidikan global, tetapi yang ada adalah pendidikan dalam perspektif global.

H. Menuju multikulturalisme global

Multikulturalisme global berangkat dari kenyataan sejarah di mana budaya budaya bangsa begitu majemuknya. Sehingga monokulturalisme atau budaya tunggal tidak mungkin menjadi agenda sebuah negara-negara bangsa untuk dipaksakan kepada Negara-negara lain. Pengertian budaya di sini tidak terbatas dalam seni, tetapi mencakup segala hal yang menjadi proses dan produk sebuah komunitas agama, ideology, system hukum, system pembangunan dan sebagainya. Budaya dapat bersifat lintas Negara, tetapi ada juga budaya yang telah menjadi ciri khas negara bangsa tertentu. Misalnya para pendiri negara Indonesia telah menjadikan pancasila sebagai bagian dari budaya nasional, karena merupakan akumulasi dari nilai-nilai bangsa Indonesia. Malaysia juga merupakan negara bangsa berkembang dari berbagia unsure budaya yaitu melayu, india, tionghoa dan lain sebagainya.

BAGIAN 6

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF

Pendidikan pada dasarnya adalah sebuah proses transformasi pengetahuan menuju ke arah perbaikan, penguatan dan penyempurnaan semua potensi manusia. Oleh karena itu, pendidikan tidak mengenal ruang dan waktu, ia tidak dibatasi oleh tebalnya tembok sekolah dan juga sempitnya waktu belajar di kelas. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat dan bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja manusia dan mampu melakukan proses kependidikan.

Pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus termasuk anak penyandang cacat. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan inklusif juga dapat dimaknai sebagai satu bentuk reformasi pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan, dan perluasanakses pendidikan bagi semua anak, peningkatan mutu pendidikan, upaya strategis dalam menuntaskan wajib belajar sembilan tahun, serta upaya merubah sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK).

Dalam konteks pendidikan luar biasa di Indonesia, pendidikan inklusif bukanlah satu-satunya cara mendidik *disabled children* dengan maksud untuk mengantikan pendidikan segregasi. Melainkan suatu alternative, pilihan, inovasi, atau terobosan/pendekatan baru disamping pendidikan segregasi yang sudah berjalan lebih dari satu abad. Hal ini dikarenakan setting pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa di Indonesia menganut pendekatan "*Multitrack Approach*". Hanya saja eksistensi Sekolah Luar Biasa (SLB) yang seharusnya mampu berperan sebagai pusat sumber dalam mendukung pendidikan inklusif, belum diberdayakan secara maksimal. Sekalipun secara formal pendidikan inklusif di Indonesia baru dilaksanakan dalam satu dasa warsa terakhir, namun diyakini bahwa secara alamiah pendidikaninklusif sudah berlangsung sejak lama. Hal ini tidak lepas dari faktor-

faktor filosofi, sosial, maupun budaya Indonesia yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi kebhinekaan atau keberagaman. Faktor-faktor ini tentu dapat menjadi modal dasar bagi pengembangan penyelenggaraan pendidikan inklusi yang sekarang sedang dikembangkan.

A. Pengertian Pendidikan Inklusif

Istilah inklusif memiliki ukuran universal. Inklusif dapat dikaitkan dengan persamaan, keadilan, dan hak individual dalam pembagian sumber-sumber seperti pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi. Menurut Reid[25] masing-masing dari aspek-aspektersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan satu sama lain.

Pendidikan inklusif yaitu pendidikan yang dilaksanakan di sekolah/kelas reguler dengan melibatkan seluruh peserta didik tanpa kecuali, meliputi : anak yang memiliki perbedaan bahasa, beresiko putus sekolah karena sakit, kekurangan gizi, tidak berprestasi, anak yang berbeda agama, penyandang HIV/AIDS, dan sebagainya. Mereka dididik dan diberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan cara yang ramah dan penuh kasih sayang tanpa diskriminasi.[26]

Reid ingin menyatakan bahwa istilah inklusif berkaitan dengan banyak aspek hidup manusia yang didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu. Dalam ranah pendidikan, istilah inklusif dikaitkan dengan model pendidikan yang tidak membeda-bedakan individu berdasarkan kemampuan dan atau kelainan yang dimiliki individu. Dengan mengacu pada istilah inklusif yang disampaikan Reid di atas, pendidikan inklusif didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu.Istilah pendidikan inklusif digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program sekolah. Konsep inklusif memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerimaan anak-anakyang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial yang ada di sekolah.[27]

Pendidikan inklusif merupakan sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh, yang kelak diharapkan memberi jaminan bahwa strategi nasional tentang Pendidikan Untuk Semua (PUS) benar-benardimiliki semua kalangan, tidak membeda-bedakanapakah mereka tergolong anak-anak berkebutuhan khusus atau

---

[25] Gavin Reid. 2005. *Dyslexia and Inclusion; Classroom Approaches for Assesment, Teaching and Learning.* London: David Fulton Publisher, Hlm. 88.

[26] http://dedekusn.com/pendidikan/pentingnya-pendidikan-inklusif/, 28/07/2016, pukul 22.35.

[27] J. David Smith. 2006. *Inklusif, Sekolah Ramah untuk Semua.* Bandung: Penerbit Nuansa, Hlm. 45.

tidak. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat dan memiliki keterampilan berhidup.

Karena itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali, termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (*difabel*) seperti yang tertuang pada UUD 1945 pasal 31 (1). Namun sayangnya sistem pendidikan di Indonesia belum mengakomodasi keberagaman, sehingga menyebabkan munculnya segmentasi lembaga pendidikan yang berdasar pada perbedaan agama, etnis, dan bahkan perbedaan kemampuan baik fisik maupun mental yang dimiliki oleh siswa. Jelas segmentasi lembaga pendidikan ini telah menghambat para siswa untuk dapat belajar menghormati realitas keberagaman dalam masyarakat.Selama ini anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel) disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis difabelnya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Secara tidak disadari sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusifisme bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus.

MIF. Baihaqi dan M. Sugiarmin menyatakan bahwa hakikat inklusif adalah mengenai hak setiap siswa atas perkembangan individu, sosial, dan intelektual. Para siswa harus diberi kesempatan untuk mencapai potensi mereka secara maksimal. Untuk mencapai potensi tersebut, sistem pendidikan harus dirancang dengan memperhitungkan perbedaan-perbedaanyang ada pada diri siswa. Bagi mereka yang memiliki ketidakmampuan khusus dan/atau memiliki kebutuhan belajar yang luar biasa harus mempunyai akses terhadap pendidikan yang bermutu tinggi dan tepat.[28]Tembok eksklusifisme tersebut selama ini tidak disadari telah menghambat proses saling mengenal antara anak-anak difabel (ABK) dengan anak-anaknon-difabel (Anak Berkebutuhan Umum). Akibatnya dalam interaksi sosial di masyarakat kelompok difabel menjadi komunitas yang teralienasi dari dinamika sosial di masyarakat.

Masyarakat menjadi tidak akrab dengan kehidupan kelompok ABK (*difabel*). Sementara kelompok difabel sendiri merasa keberadaannya bukan menjadi bagian yang integral dari kehidupan masyarakat di sekitarnya. Namun dalam prakteknya sistem pendidikan inklusif di Indonesia masih menyisakan persoalan tarik ulur antara pihak pemerintah dan praktisi pendidikan, dalam hal ini para guru. Kesimpulannya Pendidikan Inklusif adalah sebuah pendekatan yang sedang berkembang, ditujukan untuk memenuhi

---

28 MIF. Baihaqi dan M. Sugiarmin. 2006. *Memahami dan Membantu Anak ADHD.* Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm. 75-76.

kebutuhan belajar pada peserta didik, dalam hal ini adalah anak-anak berkebutuhan khusus (ABK).[29]

Baihaqi dan Sugiarmin menekankan bahwa tiap peserta didik memiliki hak yang sama tanpa dibeda-bedakanberdasarkan perkembangan individu, sosial, dan intelektual. Perbedaan yang terdapat dalam diri individu harus disikapi dunia pendidikan dengan mempersiapkan model pendidikan yang disesuaikan dengan perbedaan-perbedaan (keunikan) tiap individu. Perbedaan bukan lantas melahirkan diskriminasi dalam pendidikan, namun pendidikan harus tanggap dalam menghadapi perbedaan.

Daniel P. Hallahan mengemukakan pengertian pendidikan inklusif sebagai pendidikan yang menempatkan semua peserta didik berkebutuhan khusus dalam sekolah reguler sepanjang hari. Dalam pendidikan seperti ini, guru memiliki tanggung jawab penuh terhadap peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa pendidikan inklusif menyamakan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya. Menyamakan bukan dalam hal proses pembelajaran dan pendampingan, namun dalam hal kesamaan dalam memperoleh pendidikan sama dengan siswa berkebutuhan umum. Untuk itulah, guru memiliki tanggung jawab penuh terhadap proses pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dengan demikian guru harus memiliki kemampuan dalam menghadapi banyaknya perbedaan peserta didik.[30]

Dalam ensiklopedi *online* Wikipedia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan inklusi yaitu pendidikan yang memasukkan peserta didik berkebutuhan khusus untuk bersama-sama dengan peserta didik normal lainnya. Pendidikan inklusif adalah mengenai hak yang sama yang dimiliki setiap anak. Pendidikan inklusif merupakan suatu proses untuk menghilangkan penghalang yang memisahkan peserta didik berkebutuhan khusus dari peserta didik normal agar mereka dapat belajar dan bekerja sama secara efektif dalam satu sekolah.

Pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas secara umum menyatakan hal yang sama mengenai pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif berarti pendidikan yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan semua peserta didik, baik peserta didik yang berkebutuhan umum maupun peserta didik berkebutuhan khusus. Masing-masing dari mereka memperoleh layanan pendidikan yang sama tanpa dibeda-bedakan satu sama lain. Mereka yang berkebutuhan khusus ini dulunya adalah anak-anak yang diberikan

---

29 https://keluargasehat.wordpress.com/pendidikan-inklusif, 28/07/2016, pukul 22.35.

30 Daniel P. Hallahan dkk. 2009. *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education.* Boston: Pearson Education Inc., cet. ke-10, Hlm. 53.

label (*labelling*) sebagai Anak Luar Biasa (ALB) dan di ekslusifkan dalam Sekolah Luar Biasa (SLB). Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan istilah lain untuk menggantikan istilah Anak Luar Biasa (ALB) yang menandakan adanya kelainan khusus. Istilah lain yang juga biasa dipakai untuk menandai anak yang "lain" dari yang lain ini yaitu hendaya (*impairment*).[31]

B. Tujuan Pendidikan Inklusif

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Karena itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (*difabel*) seperti yang tertuang pada UUD 1945 pasal 31 (1) "setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Selama ini anak-anakyang memiliki perbedaan kemampuan (*difabel*) disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis difabelnya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB).

Salah satu kesepakatan Internasional yang mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi adalah *Convention on the Rights of Person with Disabilities and Optional Protocol* yang disahkan pada Maret 2007. Pada pasal 24 dalam Konvensi ini disebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan inklusi di setiap tingkatan pendidikan. Adapun salah satu tujuannya adalah untuk mendorong terwujudnya partisipasi penuh difabel dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam prakteknya sistem pendidikan inklusi di Indonesia masih menyisakan persoalan tarik ulur antara pihak pemerintah dan praktisi pendidikan, dalam hal ini para guru. Dan selain diuraikan tujuan pendidikannya, tujuan pembelajaran anak berkebutuhan khusus harus didasarkan pada visi dan misi pembelajaran yang sudah ditetapkan. Komponen-komponen dasar model pembelajaran anak berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan menjadi :

1. Masukan yang berupa masukan mentah yang terdiri dari *elicitors, behaviors* dan *reinforces*, masukan instrumen yang terdiri dari program, guru kelas, tahapan dan sarana serta masukan lingkungan yang berupa norma, tujuan dan tuntutan.

[31] Bandi Delphie. 2006. *Pembelajaran Anak Tunagrahita; Suatu Pengantar dalam Pendidikan Inklusi.* Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm. 1

2. Proses yang terdiri dari atas program pembelajaran individual, pelaksanaan intervensi, dan refleksi hasil pembelajaran.
3. Keluaran berupa perubahan kompetensi setiap peserta didik yang mempunyai kesulitan atau hambatan perkembangan diri.[32]

C. Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Landasan yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan empiris. Secara terperinci, landasan – landasantersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. *Landasan Filosofis*

Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara Burung Garuda yang berarti Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2) Pandangan Agama (*khususnya Islam*) antara lain ditegaskan bahwa: (a) manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi (*inklusif*) dan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah adalah ketaqwaannya
3) Pandangan universal hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak pekerjaan.

b. *Landasan Yuridis*

Secara yuridis, pendidikan inklusif dilaksanakan berdasarkan atas:

1) UUD 1945
2) UU Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
3) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
4) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
5) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

---

32 John W. Santrock. 2004. *Educational Psychology*. New York: The McGraw Hill Inc., Hlm. 175

7) Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No. 380/C.C6/MN/2003 Tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif: Menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap Kabupaten/Kota sekurang – kurangnya4 (empat) sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK.

8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Akan tetapi ada yang berbeda yaitu khusus untuk DKI Jakarta, landasan yuridis yang berlaku yaitu: Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

c. *Landasan Empiris*

Landasan empiris yang dipakai dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu:

1) Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 (*Declaration of Human Rights*).
2) Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention of The Rights of Children*).
3) Konferensi Dunia Tentang Pendidikan untuk Semua 1990 (*World Conference on Education for All*).
4) Resolusi PBB nomor 48/96 Tahun 1993 Tentang Persamaan Kesempatan Bagi Orang Berkelainan (*the standard rules on the equalization of opportunitites for person with dissabilities*).
5) Pernyataan Salamanca Tentang Pendidikan Inklusi 1994 (*Salamanca Statement on Inclusive Education*).
6) Komitmen Dakar mengenai Pendidikan Untuk Semua 2000 (*The Dakar Commitment on Education for All*).
7) Deklarasi Bandung 2004 dengan komitmen "*Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif*".
8) Rekomendasi Bukittinggi 2005 mengenai pendidikan yang inklusif dan ramah.

D. Pentingnya dan kendala Pendidikan Inklusif

a. *Pentingnya Pendidikan Inklusif*

Pentingnya pendidikan inklusif diadakan atau dilaksanakan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, yaitu :

1) Mutu pendidikan masih belum memuaskan (belum: *cageur, bageur, bener, tur singer* vs kecerdasan intelektual, sosial, emosional, spiritual, fisikal).

2) Masih banyak anak usia sekolah belum mendapat layanan pendidikan yang baik.
3) Pendidikan masih diskriminatif.
4) Pembelajaran masih *teacher centre.*
5) Proses Belajar Mengajar (PBM) belum mengakomodasi kebutuhan siswa.
6) Lingkungan pendidikan masih belum ramah anak.
7) Pembelajaran masih belum berbasis *learning style* siswa.
8) PBM belum dilaksanakan dengan aktif, kreatif, dan menyenangkan.
9) Pembelajaran belum menghargai keberagaman.

Istilah inklusif berimplikasi pada adanya kebutuhan yang harus dipenuhi bagi semua anak dalam sekolah. Hal ini menyebabkan adanya penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran. Penyesuaian pendidikan (*adaptive education*) dilaksanakan dengan menyediakan pengalaman-pengalaman belajar guna membantu masing-masing peserta didik dalam meraih tujuan-tujuan pendidikan yang dikehendakinya. Penyesuaian pendidikan dapat berlangsung tatkala lingkungan pembelajaran sekolah dimodifikasi untuk merespon perbedaan-perbedaan peserta didik secara efektif dan mengembangkan kemampuan peserta didik agar dapat bertahan dalam lingkungan tersebut.[33]

b. Kendala Pendidikan Inklusif

Undang-undang tentang pendidikan inklusif dan bahkan uji coba pelaksanaan pendidikan inklusifnya pun konon telah dilakukan. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang adalah sejauh mana keseriusan pemerintah untuk mendorong terlaksananya sistem pendidikan inklusif bagi kelompok difabel.

Beberapa kasus muncul misalnya minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusif, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusif menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusif belum benar-benar dipersiapkan dengan baik. Apalagi sistem kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang memang belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan (*difabel*). Sehingga sepertinya program pendidikan inklusif hanya terkesan program eksperimental.

Kondisi ini jelas menambah beban tugas yang harus diemban para guru yang berhadapan langsung dengan persoalan teknis di lapangan. Di satu sisi para guru harus

33 Thomas M. Stephens, dkk. 1982. *Teaching Mainstreamed Students.* Canada: John Wiley & Sons, Hlm. 27.

berjuang keras memenuhi tuntutan hati nuraninya untuk mencerdaskan seluruh siswanya, sementara di sisi lain para guru tidak memiliki ketrampilan yang cukup untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa yang difabel. Alih-alih situasi kelas yang seperti ini bukannya menciptakan sistem belajar yang inklusif, justru menciptakan kondisi eksklusifisme bagi siswa difabel dalam lingkungan kelas reguler. Jelas ini menjadi dilema tersendiri bagi para guru yang di dalam kelasnya ada siswa difabel.[34]

E. Tahapan Penerapan Pendidikan Inklusif

a. Sebelum menerapkan inklusi ,sebaiknya sekolah sudah penerapan terlebih dahulu prinsip-prinsip MBS dengan tiga pilar utama : manajemen sekolah yang transparan, akuntable dan demokaris; Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM) dan optimalisasi peran serta masyarakat.
b. Kepala sekolah, guru, komite, dan orangtua mendapatkan pemahaman apa, bagaimana, mengapa konsep inklusi perlu diterapkan.
c. Kepala sekolah dan guru *(yang nantinya akan menjadi GPK=GURU pembimbing khusus)* harus mendapatkan pelatihan bagaimana menjalankan sekolah inklusi.
d. GPK mendapatkan pelatihan teknis memfasilitasi anak ABK.
e. Asesmen di sekolah dilakukan untuk mengatahui anak ABK.
f. Sekolah melakukan motivasi dan penjaringan di masyarakat agar anak ABK yang belum masik sekolah mendapatkan pendidikan secara seimbang dengan memasukannnya ke sekolah inklusi.
g. Pengadaan aksesiblilitas(sarana dan prasarana bagi ABK) sesuai kemampuan sekolah.
h. Menyelenggarakan pembelajaraan inklusif.
i. Mengadakan bimbingan khusus atas kesepahaman dan kesepatandengan orangtua ABK.

F. Model Pembelajaran Pendidikan Inklusif

Pelaksanaan pembelajaran dalam kelas inklusif sama dengan pelaksanaan pembelajaran dalam kelas reguler. Namun jika diperlukan, anak berkebutuhan khusus

---

34 https://keluargasehat.wordpress.com/pendidikan-inklusif, 28/07/2016, pukul 22.35.

membutuhkan perlakuan tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus (ABK) diperlukan proses*skrining*atau*assesment* yang bertujuan agar pada saat pembelajaran di kelas, bentuk intervensi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus merupakan bentuk intervensi pembelajaran yang sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka. *Assesment* yang dimaksud yaitu proses kegiatan untuk mengetahui kemampuan dan kelemahan setiap peserta didik dalam segi perkembangan kognitif dan perkembangan sosial melalui pengamatan yang sensitif.[35]

Seorang pendidik hendaknya mengetahui program pembelajaran yang sesuai bagi anak berkebutuhan khusus. Pola pembelajaran yang harus disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus disebut dengan*Individualized Education Program* (IEP) atau Program Pembelajaran Individual (PPI). Perbedaan karakteristik yang dimiliki anak berkebutuhan khusus membuat pendidikan harus memiliki kemampuan khusus.

Sebelum Program Pembelajaran Individual dijalankan oleh pendidik, terlebih dahulu pendidik harus melakukan identifikasi terhadap kondisi dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus agar diperoleh informasi yang akurat mengenai kebutuhan pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Setelah proses *skrining* atau*assesment* dilakukan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus teridentifikasi, maka Program Pembelajaran Individual (PPI) dapat dijalankan di kelas-kelas reguler. Program Pembelajaran Individual tersebut sebenarnya tidak mutlak diperlukan bagi anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran model inklusif di kelas reguler.

Pada praktiknya ada beberapa anak berkebutuhan khusus yang tidak memerlukan Program Pembelajaran Individual. Mereka dapat belajar bersama dengan anak reguler dengan program yang sama tanpa perlu dibedakan. Program Pembelajaran Individual meliputi enam komponen, yaitu*elicitors, behaviors, reinforcers, entering behavior, terminal objective,*dan*enroute*. Secara terperinci, keenam komponen tersebut yaitu:

a. *Elicitors,* yaitu peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan atau menyebabkan perilaku.
b. *Behaviors*, merupakan kegiatan peserta didik terhadap sesuatu yang dapat ia lakukan.
c. *Reinforcers,* suatu kejadian atau peristiwa yang muncul sebagai akibat dari perilaku dan dapat menguatkan perilaku tertentu yang dianggap baik.
d. *Entering behavior,* kesiapan menerima pelajaran.

---

35 Bandi Delphie. *Op cit*., Hlm. 3.

e. *Terminal objective,*sasaran antara dari pencapaian suatu tujuan pembelajaran yang bersifat tahunan.

f. *Enroute,* langkah dari *entering behavior* menujut ke *terminal objective.*[36]

Model pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus harus memperhatikan prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum pembelajaran meliputi motivasi, konteks, keterarahan, hubungan sosial, belajar sambil bekerja, individualisasi, menemukan, dan prinsip memecahkan masalah. Prinsip umum ini dijalankan ketika anak berkebutuhan khusus belajar bersama-samadengan anak reguler dalam satu kelas. Baik anak reguler maupun anak berkebutuhan khusus mendapatkan program pembelajaran yang sama. Prinsip khusus disesuaikan dengan karakteristik masing-masingpeserta didik berkebutuhan khusus. Prinsip khusus ini dijalankan ketika peserta didik berkebutuhan .khusus membutuhkan pembelajaran individual melalui Program Pembelajaran Individual (PPI).[37]

G. Kelebihan dan Kelemahan Pendidikan Inklusif

a. Kelebihannya Pendidikan Inklusif

Pendidikan Inklusi dalam penyelenggaraannya memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan pendidikan terpadu atau pendidikan khusus (*segregasi*) sehingga sangat tepat apabila pemerintah menyelenggarakan dan mengembangkan program ini.Dengan diselenggarakannya pendidikan Inklusi bukan berarti SLB (*Sekolah Luar Biasa*), sekolah terpadu dan SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa) ditutup, akan tetapi dijadikan mitra kerja yang baik dengan penyelenggaraan Sekolah Inklusif, bahkan kalau perlu dijadikan laboratorium sekolah dan nara sumber bagi guru-gurukhusus yang mengajar di sekolah inklusif.Munculnya sekolah inklusif karena memiliki beberapa keistimewaan antara lain :

1) Keberadaan anak cacat diakui sejajar dengan anak berkebutuhan umum;
2) Lingkunganmengajarkan kebersamaan dan menghilangkan diskriminasi;
3) Memberi kesan pada orang tua dan masyarakat bahwa anak berkebutuhan khusus pun mampu seperti anak pada umumnya;
4) Anak yang berkelainan akan belajar menerima dirinya sebagaimana adanya dan juga tidak menjadi asing lagi di lingkungannya;

---

36 *Ibid.*, Hlm. 150 - 151
37 *Ibid.*, Hlm. 154

5) Aktivitas yang mungkin dapat diikuti anak cacat ada kesempatan untk berpartisipasi sehingga dapat menunjukkan kemampuannya di lingkungan anak normal;
6) Membutuhkan pegangan diri yaitu dengan belajar secara kompetitif, eksistensi anak cacat akan teruji dalam persaingan secara sehat dengan anak pada umumnya.

Penyelenggaraan tersebut pada hakekatnya memberikan kesempatan yang sama setiap peserta didik dalam mengikuti pendidikan dengansistem sekolahan reguler sesuai dengankebutuhan individunya tanpa membedakanlatar belakang agama, budaya, sosial, ekonomi maupun suku. Sungguh merupakan harapan kita semua program penyelenggaraan sekolah inklusif ini dapat terlaksana dengan baik atas dasar kepedulian pemerintah dan kepedulian kita bersama.

b. Kelemahannya pendidikan inklusif

Kelemahan dari pendidikan inklusif sebagai berikut:

1) Jumlah Anak Kebutuhan Khusus (ABK) di Indonesia masih sedikit yang terdaftar di sekolah.

   Menurut data UNESCO tahun 2009, ranking Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) terus mengalami kemerosotan. Pada 2007, ranking Indonesia berada di urutan ke-58 dari 130 negara, sedangkan pada 2008 turun ke ranking ke-63 dari 130 negara. Pada 2009, ranking Indonesia bahkan kian merosot hingga di peringkat ke-71 dari 129 negara. Semua hal di atas dikarenakan jumlah ABK di Indonesia masih sedikit yang terdaftar di sekolah.
2) Kurikulum yang tersusun kaku dan kurang tanggap terhadap kebutuhan anak yang berbeda.

   Banyak negara mendorong kebutuhan pendidikan dasar tanpa memperhatikan isu pendidikan anak berkebutuhan khusus. Namun, pendidikan inklusif tidak kemudian mensyaratkan kurikulum yang terpisah karena itu justru akan menciptakan segregasi.Kurikulum pendidikan inklusi harus masuk dalam kurikulum arus utama. Inisiatif para *stakeholders,* guru dan sekolah, serta masyarakat masih parsial terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi, sehingga akses Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) mengenyam pendidikan masih begitu sempit.

3) Kebijakan yang kurang mendukung

   Kebijakan pemerintah tidak memisahkan komponen pendidikan khusus ini, harusnya tidak lagi dibedakan. Pendidikan inklusi sudah bukan lagi tambahan, tetapi masuk dalam pengaturan umum.

4) Kurangnya ketersediaan anggaran

   Minimnya anggaran yang disediakan pemerintah adalah sisi lain akibat tidak adanya dukungan kebijakan pemerintah.[38]

5) Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

6) Paradigma/pandangan masyarakat terhadap pendidikan inklusi pendidikan inklusi memang tidak popular dalam masyarakat.

   Masyarakat hanya disibukkan dengan urusan meningkatkan kualitas pendidikan secara horizontal maupun vertical. Sehingga anak bangsa yang memiliki kebutuhan yang terbatas ini sering termarginalkan (kaum yang tersisih). Pelayanan pendidikan ini memang memerlukan sarana dan prasarana yang cukup besar tapi bukan berarti harus ditinggalkan karena mereka mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan.

---

38 Anonim. 2009. *Pendidikan Inklusi Masih Banyak Kendala*, (Online), (http://www.ykai.net/:pendidikan-inklusi-masih-banyak-kendala&catid=117:terkini&Itemid=136, 28/07/2016, pukul 22.35)

BAGIAN 7

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN BERBASIS KONSEPSI KETERBAKATAN

Perhatian terhadap pendidikan anak berbakat sebenarnya sudah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu. Misalnya, Plato pernah menyerukan agar anak-anak berbakat dikumpulkan dan dididik secara khusus karena mereka ini diharapkan bakal menjadi pemimpin negara dalam segala bidang pemerintahan. Oleh karena itu, mereka dibekali ilmu pengetahuan yang dapat menunjang tugas mereka.

Demikian pula di Indonesia, kehadiran mereka sudah dikenal sejak dulu. Banyak sekolah yang menerapkan sistem loncat kelas atau dapat naik ke kelas berikutnya lebih cepat meskipun waktu kenaikan kelas belum saatnya. Perhatian yang lebih serius dan formal tersurat dalam UUSPN No. 2 Tahun 1989 bahwa peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh pendidikan khusus untuk mengembangkan potensi anak-anak tersebut secara optimal. Namun, implementasi program pengayaan dan akselerasi yang merupakan salah satu cara pelayanan anak berbakat intelektual ternyata tidak tepat sasaran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hawadi, dkk pada 20 SMA Unggulan di 16 propinsi menyimpulkan bahwa program akselerasi tidak cukup memberikan dampak positif pada siswa berbakat untuk mengembangkan potensi intelektual yang tinggi karena jumlah siswa yang tergolong memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa hanya 9,7%. Hal itu berarti sebagian besar siswa (92,3%) yang mengikuti program akselerasi bukan merupakan anak berbakat intelektual tinggi.

Keberadaan anak berbakat intelektual hanya 2–3% dari populasi. Jumlah tersebut cukup sedikit dan tersebar keberadaannya.Oleh karena itu pelayanan akselerasi yang menuntut kontinyuitas penyelenggaraan sulit dilakukan, terlebih dengan adanya penetapan kuota.

Agar anak berbakat yang mempunyai potensi unggul tersebut dapat mengembangkan potensinya dibutuhkan program dan layanan pendidikan secara khusus. Mereka lahir dengan membawa potensi luar biasa yang berarti telah membawa kebermaknaan hidup. Oleh karena itu, tugas pendidikan adalah mengembangkan kebermaknaan tersebut secara optimal sehingga mereka dapat berkiprah dalam memajukan bangsa dan negara.

Seorang anak dikatakan anak luar biasa karena ia berbeda dengan anak-anak lainnya. Perbedaan terletak pada adanya ciri-ciri yang khas yang menunjukkan pada keunggulan dirinya. Namun, 'keunggulan' tersebut selain menjadi sebuah kekuatan dalam dirinya sekaligus menjadi 'kelemahan'. Yang dimaksud sebagai kelemahan di sini adalah diabaikannya ia sebagai individu yang memiliki hak sama dalam mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dirinya.

A. Pengertian Bakat

Pengertian bakat atau *aptitude* berbeda dengan kemampuan *(ability)* dan prestasi *(achievement)*. Bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih agar dapat terwujud. Bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relative bisa bersifat umum ataupun khusus.

Kemampuan adalah daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Kemampuan menunjukkan bahwa suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Kemampuan menunjukkan bahwa suatu tindakan dapat dilaksanakan sekarang dan dikembangkan dimasa mendatang apabila kondisi latihan dikemukanan secara optimal sedangkan bakat memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat dilakukan di masa yang akan datang.

Bakat menentukan prestasi sesorang. Misalnya orang yang memiliki bakat matematika dan diperkirakan akan mampu mencapai prestasi tinggi dalam bidang itu. Jadi prestasi merupakan perwujudan dari bakat dan kemapuan. Prestasi yang sangat menonjol dalam salah satu bidang, mencerminkan bakat yang unggul dalam bidang tertentu. Anak berbakat anak-anak yang diidentifikasi oleh orang-orang profesional, yang karena kemampuannya yang sangat menonjol, dapat memberikan prestasi yang tinggi.

Definisi menurut USOE *(United States Office of Education),* anak berbakat adalah anak yang dapat membuktikan kemampuan berprestasinya yang tinggi dalam bidang-bidang seperti intelektual, kreatif, artistik, kapasitas kepemimpinan atau akademik

spesifik dan mereka yang membutuhkan pelayanan atau aktivitas yang tidak sama dengan yang disediakan di sekolah sehubungan dengan penemuan kemampuan-kemampuannya.

Sedangkan menurut Depdiknas (2003), anak berbakat adalah mereka yang oleh psikolog dan atau guru diidentifikasi sebagai peserta didik yang telah mencapai prestasi memuaskan dan memiliki kemampuan intelektual umum yang berfungsi pada taraf cerdas, kreativitas yang memadai, dan keterikatan pada tugas yang tergolong baik.

Torrance melaporkan hasil studinya mengenai kemampuan berfikir kreatif dalam kaitannya dengan keberbakatan. Ia mengemukakan bahwa apabila keberbakatan semata-mata diidentifikasi berdasarkan taraf intelegensi, maka sekitar 70% anak-anak yang tinggi kreatifitasnya tidak akan termasuk ke dalam kelompok mereka yang disebut anak berbakat.

Munandar dalam Ilmu dan Aplikasi Pendidikan mengemukakan anak berbakat itu lebih mengacu kepada anak yang menunjukkan kemampuan unjuk kerja yang tinggi dalam aspek intelektual, kreativitas, seni, kepemimpianan atau bidang akademik tertentu.

Dari beberapa pendapat ahli maka anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan yang lebih menonjol dari aspek intelektual, kreatif, seni, kepemimpianan atau bidang akademik tertentu yang menghasilkan prestasi tinggi.

Istilah yang melukiskan anak-anak berbakat, cerdas atau cemerlang yaitu *genius, talented, gifted dan bright atau superior*. Persamaan dari istilah-istilah tersebut adalah penyimpangan ke atas dari rata-rata. Sedangkan perbedaannya adalah:

1. *Genius* digunakan pada mereka yang memiliki kemampuan unggul berhasil mencapai prestasi yang luar biasa, memberikan sumbangan yang orisinil dan bermutu, serta mempunyai makna yang universal atau mantap.
2. *Talented* suatu bakat khusus yang tidak selalu menghasilkan prestasi yang luar biasa, tidak perlu orsinil atau dampak yang universal.
3. *Gifted atau berbakat* mempunyai kesamaan dengan genius, karena keduanya berkaitan dengan kualitas intelektual, namun berbakat belum tentu terwujud dalam suatu karya unggul yang mendapat pengakuan universal. Jadi tidak semua anak berbakat merupakan anak genius.
4. *Bright atau superior* merujuk pada karakteristik seseorang yang memiliki intelegensi yang tinggi.

Menurut Maryland dalam Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan tinggi dalam aspek:

1. Kemampuan umum yang tinggi, yaitu kecerdasan individu yang berada pada posisi di atas *rata*-rata.
2. Bakat akademik khusus, yaitu kemampuan individu dalam bidang-bidang tertentu seoerti bahasa dan matematika.
3. Kreatif dan berfikir produktif, yaitu kemempuan yang menghasilkan gagasan baru dengan memadukan elmen-elmen yang biasanya dianggap sebagai suatu yang terpisah-pisah atau tdak sejenis dan keampuan mengembangkan keterampialan baru yang mengandung nilai-nilai sosial.
4. Kepemimpianan, yaitu kemampuan untuk mengarahkan individu-individu atau kelompok untuk mengambil keputusan, memetapkan tindakan bersama atau mencapai tujuan tertentu.
5. Kemampuan dalam bidang seni, yaitu memiliki bakat khusus dalam bidang seni rupa, musik, tari, lukis, drama dan lainnya.

Sementara menurut Renzulli dalam Ilmu dan Aplikasi Pendidikan mengemukakan bahwa ada tiga dimensi yang menandai keberbakatan, yaitu:

1. Kecerdasan, kemampuan umum yang biasanya diukur dengan tes intelegensi di atas rata-rata.
2. Kreativitas, kemampuan memberikan gagasan-gagasan baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah
3. Komitmen terhadap tugas, tanggung jawab, semangat, atau motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan suatu tugas.
4. Keterkaitan antara tiga ciri keberbakatan itu dapat digambarkan menggunakan diagram.

B. Ciri-ciri Anak Berbakat

Anak berbakat itu memiliki karakteristik yang menonjol dalam aspek-aspek kesiagaan mental, kemampuan pengamatan, keinginan untuk belajar, daya konsentrasi, daya nalar, kemampuan membaca, ungkapan verbal, kemampuan menulis, kemampuan mengajukan pertanyaan yang baik, menunjukan minat yang luas, berambisi untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi, mandiri dalam memberikan pertimbangan, dapat

memberikan jawaban yang tepat dan langsung kesasaran, mempunyai rasa humor yang tinggi, melibatkan diri sepenuhnya dan ulet menghadapi tugas yang diminati.

Menurut Balitbang Depdiknas (1986) mengungkapkan ciri-ciri keberbakatan peserta didik dilihat dari aspek kecerdasan, kreativitas, dan komitmen terhadap tugas:

1. Lancar berbahasa (mampu mengutarakan pikirannya)
2. Memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap ilmu pengetahuan
3. Memiliki kemampuan yang tinggi dalam berpikir logis dan kritis
4. Mampu belajar/bekerja secara mandiri
5. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa)
6. Mempunyai tujuan yang jelas dalam tiap kegiatan atau perbuatannya
7. Cermat atau teliti dalam mengamati
8. Memiliki kemampuan memikirkan beberapa macam pemecahan masalah;
9. Mempunyai minat yang luas;
10. Mempunyai daya imajinasi yang tinggi;
11. Belajar dengan cepat
12. Mampu mengemukakan dan mempertahankan pendapat;
13. Mampu berkonsentrasi
14. Tidak memerukan dorongan (motivasi) dari luar.

Selanjutnya Utami Munandar, 2004 mengemukakan karaktersistik atau ciri-ciri anak berbakat itu sebagai berikut:

Aspek	Ciri-ciri
1) Belajar	Mudah menangkap pelajaran, ingatan baik, perbendaharaan kata luas, penalaran tajam, daya konsentrasi baik, ungkapan diri lancar dan jelas, cermat dalam pengamatan, memacahkan masalah dan cepat dalam menemukan kesalahan.
2) Kreativitas	Dorongan ingin tahu besar sering mengajukan pertanyaan yang baik, memberikan banyak usulan atau gagasn terhadap suatu maslah, bebas dalam menyampaikan pendapat, menonjol dalam salah satu bidang seni, mempunyai pendapat sendiri dan dapat mengungkapkannya, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, daya imajinasi kuat, orisinalitas tinggidan senang mencoba hal-hal yang baru.

3) Motivasi	Tekun menghadapi tugas, ulet dalam menghadapi kesulitan, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi, ingin mendalami pengetahuan yang dipelajari didalam kelas, selalu berusaha untuk berprestasi sebaik mungkin, dapat mempertahankan pendapatnya, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini dan senang mencari dan memecahkan soal-soal.
4) Psikososial	Senang dipilih menjadi pemimpin atau ketua, disenangi oleh teman sekelas, dapat bekerja sama, dapat mempengaruhi teman-temannya, mempunyai inisiatif, rasa tanggung jawab besar, percaya pada diri sendiri, mudah menyesuaikan diri terhadap situasi di sekolah, aktif berpartisipasi dalam kegiatan social di sekolah dan senag membantu orang lain.

Tabel 1. karaktersistik anak berbakat

Menurut Dedi Supriadi, anak berbakat memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak normal, karakteristik anak berbakat meliputi:

1. Memiliki kelebihan yang menonjol dalam kosa kata
2. Memiliki informasi yang kaya
3. Cepat menguasai bahan pelajaran
4. Cepat dalam memahami hubungan antar fakta
5. Mudah memahami dalil-dalil atau formula-formula
6. Memiliki ketajaman dalam menganalisis sesuatu
7. Gemar membaca
8. Peka terhadap situasi yang terjadi di sekelilingnya
9. Bersifat kritis
10. Memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar

Pada umumnya anak-anak berbakat berkembang lebih cepat atau bahkan sangat cepat bila dibandingkan dengan ukuran perkembangan yang normal. Hal ini disebabkan anak berbakat memiliki superioritas intelektual, mampu dengan cepat melakukan analisis, dan dalam irama perkembangan yang mantap. Bahkan dalam berfikir mereka sering meloncat dari ukuran berfikir yang normal. Selain potensi intelektual anak-anak berbakat memiliki keunggulan pada aspek psikologis, yang lain, yaitu emosi. Anak-anak berbakat memiliki stabilitas emosi yang mantap sehingga mereka akan mampu

mengendalikan masalah-maslah personal. Rasa tanggung jawab mereka yang tinggi serta mempunyai cita rasa humor yang tinggi pula.

Jadi ciri-ciri anak berbakat adalah anak yang berbeda dari anak normal dari aspek kecerdasan, pemahaman dalam belajar, kreativitas, motivasi, komitmen terhadap tugas, dan psikososial.

C. Identifikasi Anak Berbakat

Cara mengidentifikasi anak berbakat yaitu menggunakan strategi yang dikenal dengan *The Generic Gifted Identification Strategy*. Melalui strategi ini Clark melakukan dua tahap yaitu penjaringan dan identifikasi. Pada tahap penjaringan dilakukan melalui nominasi (guru, orang tua, teman sejawat dan dirinya sendiri, laporan kemampuan siswa, hasil karya siswa, pekerjaan siswa, observasi, skala/ interior atau tes integelensi kelompok). Sedangkan tahap identifikasi menggunakan tes intelegensi individual, tes prestasi, tes kreativitas, tes bakat seni dan lain-lain.

1. Identifikasi dengan menggunakan alat-alat Tes

Meliputi dua tahap:

a. Tahap penjaringan atau screening dengan tes kelompok yang sudah dibakukan.

Biasanya seperti tes aptitude seperti tes intelegensi, dan tes prestasi belajar. Tes *progressive matrices* disarankan karena menurut Jensen merupakan tes intelegensi umum yang paling Culture free. Tes tersebut tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh status social ekonomi. Orang-orang yang tidak berpemdidikan pun dapat memperoleh skor yang tinggi pada tes PM. Keuntungannya adalah dalam waktu singkat dapat diperoleh keterangan mengenai tingkat kemampuan mental anak.

b. Tahap seleksi atau identifikasi dengan tes individual.

Tes intelegensi individual lebih halus dan mengukur kemampuan seseorang lebih tepat dan lebih teliti, tetapi memerlukan waktu dan tenaga ahli, sehingga tidak ekonomis. Dapat di bayangkan bahwa di Indonesia untuk menjangkau daerah terpecil dan jauh sulit untuk mennggunakan tes individual untuk seleksi anak berbakat.

Tes kreativitas juga telah banyak digunakan karena mengukur kemampuan berfikir yang berbeda dengan tes intelegensi. Disamping itu

kreativitas merupakan salah satu dimensi dari keberbakatan. Bahwa tes intelegensi kelompok tidak terlalu teliti dan tepat sebagai metode identifikasi nyata dari perbedaan skor yang diperoleh seseorang pada tes kelompok dan pada tes individual kadang bias sampai 30 IQ poin.

2. **Menggunakan teknik non tes**

Pendekatan non tes adalah identifikasi melalui studi kasus, yaitu memperoleh sebanyak mungkin keterangan tentang anak yang diperkirakan berbakat dari sumber-sumber yang berbeda, misalnya dari guru, orang tua, teman sebaya atau dari anak itu sendiri. Dan bias juga dari angggota masyarakat yang mengenal baik anak tersebut.

Jadi disini tidak perlu memakai alat-alat tes, tetapi misalnya dengan menggunakan suatu daftar pertanyaan kuesioner.

Cara ini lah yang kiranya dapat digunakan untuk daerah-daerah dimana tenaga ahli dan fasilitas peralatan tes langka.Dalam praktek prosedur yang dugunakan pada umumnya adalah gabungan dari pendekatan pertama dan kedua.

Prosedur identifikasi yang diannjurkan oleh para ahli adalah:

a. Tes intelegensi individual (90%)
b. Prestasi yang dicapai (78%)
c. Observasi dan Nominasi guru (75%)

Sedangkan prosedur yang paling banyak dipakai adalah :

a. Observasi dan nominasi oleh guru (93%)
b. Tes prestasi sekolah kelompok (87%)
c. Tes intelegensi kelompok (87%)

Sebagaimana *Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Belajar SD, SMP dan SMA* (Satu Model Pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Istimewa) (Departemen pendidikan Nasional (2003), acuan untuk identifikasi anak berbakat ditetapkan berdasarkan persyaratan skor, sebagai berikut :

1. Akademis

Nilai Ujian Nasional dari sekolah sebelumnya, dengan rata-rata 8,0 ke atas baik untuk SMP maupun SMA. Sedangkan untuk SD tidak dipersyaratkan. Tes

Kemampuan Akademis, dengan nilai sekurang-kurangnya 8.0. Rapor, nilai rata-rata seluruh mata pelajaran tidak kurang dari 8,0

2. Psikologis, adalah mereka yang memiliki kemampuan intelektual umum dengan kategori jenius (IQ $\geq$ 140) atau mereka yang memiliki kemampuan intelektual umum dengan kategori cerdas (IQ $\geq$ 125) yang ditunjang oleh kreativitas dan keterikatan terhadap tugas dalam kategori di atas rata-rata.

Identifikasi anak unggul yang dalam proses seleksi yang cenderung menekankan pada kemampuan intelektual umum (hasil tes IQ), seringkali menyebabkan anak-anak yang unggul, namun tidak berprestasi terlewatkan (*underachieve*).

Anak yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dapat diklasifikasikanmenjadi tiga kelompok, seperti dikemukakan oleh Sutratinah Tirtonegoro (1984) yaitu; Superior, Gifted dan Genius.Ketiga kelompok anak tersebut memiliki peringkat ketinggian intellegnsi yang berbeda.

1. *Genius*

Genius ialah anak yang memiliki kecerdasan luar biasa, sehingga dapat menciptakan sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Intelligence Quotient-nya (IQ) berkisar antara 140 sampai 200. Anak genius memiliki sifat-sifat positif sebagai berikut; daya abstraksinya baik sekali, mempunyai banyak ide, sangat kritis, sangat kreatif, suka menganalisis, dan sebagainya. Di samping memiliki sifat-sifat positif juga memiliki sifat negatif, diantaranya; cenderung hanya mementingkan dirinya sendiri (egois), temperamennya tinggi sehingga cepat bereaksi (emosional), tidak mudah bergaul, senang menyendiri karena sibuk melakukan penelitian, dan tidak mudah menerima pendapat orang lain.

2. *Gifted*

Anak ini disebut juga gifted and talented adalah anak yang tingkatkecerdasannya (IQ) antara 125 sampai dengan 140. Di samping memiliki IQ tinggi, juga bakatnya yang sangat menonjol, seperti ; bakat seni musik, drama, dan ahli dalam memimpin masyarakat. Anak gifted diantaranya memiliki karakteristik; mempunyai perhatian terhadap sains, serba ingin tahu, imajinasinya kuat, senang membaca, dan senang akan koleksi.

3. Superior

Anak superior tingkat kecerdasannya berkisar antara 110 sampai dengan 125 sehingga prestasi belajarnya cukup tinggi.Anak superior memiliki karakteristik sebagai berikut; dapat berbicara lebih dini, dapat membaca lebih awal, dapat mengerjakan pekerjaan sekolah dengan mudah dan dapat perhatian dari teman temannya.

Hasil studi lain menemukan bahwa "Anak-anak berbakat memiliki karakteristik belajar yang berbeda dengan anak-anak normal. Mereka cenderung memiliki kelebihan menonjol dalam kosa kata dan menggunakannya secara luwes, memiliki informasi yang kaya, cepat dalam menguasai bahan pelajaran, cepat dalam memahami hubungan antar fakta, mudah memahami dalil-dalil dan formulaformula, tajam kemampuan analisisnya, membaca banyak bahan bacaan (gemar membaca), peka terhadap situasi yang terjadi di sekelilingnya, kritis dan memiliki rasa ingin yang sangat besar"

D. Faktor-faktor Penyebab Keberbakatan Anak

Ada beberapa faktor penyebab keberbakatan anak, diantaranya:

1. Faktor Genetik dan Biologis Lainnya

Pendapat bahwa intelegensi dan kemampuan yang berkualitas adalah diturunkan kurang dapat diterima di masayarakat yang memandang bahwa semua orang itu sama. Penelitian dalam genetika perilaku menyatakan bahwa setiap jenis dalam perkembangan perilaku dipengaruhi secara signifikan melalui gen/keturunan.

Namun demikian faktor biologis juga tidak dapat diingkari, faktor biologis yang belum bersifat genetik yang berpengaruh pada intelegensi adalah faktor gizi dan neurologik. Kekurangan nutrisi dan gangguan neurologik pada masa kecil dapat menyebabkan keterbelakangan mental. Studi dari Terman terhadap orang-orang yang memiliki IQ tinggi menunjukkan keunggulan fisik seperti: tinggi, berat, daya tarik dan kesehatan, dibandingkan mereka yang intelegensinya lebih rendah. Penekanannya adalah, individu tidak mewarisi IQ atau bakat. Yang diwariskan adalah sekumpulan gen yang bersama dengan oengalaman-pengalaman akan menentukan kapasitas dari intelegensi dan kemampuan-kemampuan lainnya (Zigler & Ferber, dalam Hallahan & Kauffman, 1994).

2. Faktor Lingkungan

Stimulasi, kesempatan, harapan, tuntutan, dan imbalan akan berpengaruh pada proses belajar seorang anak. Penelitian tentang individu-individu berbakat yang sukses menunjukkan masa kecil mereka di dalam keluarga memiliki keadaan sebagai berikut:

- Adanya minat pribadi dari orang tua terhadap bakat anak dan memberikan dorongan Orangtua sebagai panutan
- Ada dorongan dari orangtua untuk menjelajah
- Pengajaran bersifat informal dan terjadi dalam berbagai situasi, proses belajar awal lebih bersifat eksplorasi dan bermain
- Keluarga berinteraksi dengan tutor/mentor
- Ada perilaku-perilaku dan nilai yang diharapkan berkaitan dengan bakat anak dalam keluarga
- Orangtua menjadi pengamat latihan-latihan, memberi pengarahan bila diperlukan, memberikan pengukuran pada perilaku anak yang dilakuakn dengan terpuji dan memenuhi standard yang ditetapkan
- Orangtua mencarikan instruktur dan guru khusus bagi anak
- Orangtua mendorong keikutsertaan anak dalam berbagai acara positif di mana kemampuan anak dipertunjukkan pada khalayak ramai

Anak-anak yang disadari memiliki potensi perlu dikembangkan, perlu memiliki keluarga yang penuh rangsangan, pengarahan, dorongan, dan imbalan-imbalan untuk kemampuan mereka. Jadi lingkungan memiliki pengaruh yang banyak terkait bagaimana genetik anak diekspresikan dalam kesehariannya. Faktor keturunan lebih menentukan rentang di mana seseorang akan berfungsi, dan faktor lingkungan menentukan apakah individu akan berfungsi pada pencapaian lebih rendah atau lebih tinggi dari rentang tersebut.

E. Jenis-jenis Bakat

Yoesoef Noesyirwan dalam Psikologi Umum menggolongkan jenis bakat atau kemampuan menurut fungsi atau aspek-aspek yang terlibat dan menurut prestasinya. Berdasarkan fungsi atau aspek jiwa raga yang terlibat dalam berbagai macam prestasi, bakat dapat dibedakan dalam :

1. Bakat yang lebih berdasarkan psikofisik

   Bakat jenis ini adalah kemampuan yang berakar pada jasmaniah sebagai dasar dan fundamen bakat, seperti kemampuan pengindraan, ketangkasan atau ketajaman panca indra, kemampuan motoriik, kekuatan badan, kelincahan jasmani, keterampilan jari-jemari, tangan dan anggota badan.

2. Bakat kejiwaan yang bersifat umum

   Yang dimaksud dengan bakat jenis ini ialah kemampuan ingatan daya khayal atau imajinasi dan intelegensi. Daya ingat adalah kemampuan menyimpan isi kesadaran pada satu saat dan membawanya kembali ke permukaan pada saat yang lain. Dalam ingatan, jiwa kita bersifat menerima dan reproduktif. Daya khayal merupakan isi kesadaran yang berasala dari dunia dalam kita sendiri, berupa gambar khayalan dan ide-ide kreatif, sehingga jiwa kita bersifat spontan dan produktif. Adapun intelegensi adalah kemampuan menyesuaikan diri pada keadaan dengan menggunakan alat pemikiran yang berbeda dengan penyesuaian diri karena kebiasaan atau sebagai akibat latihan (drill) dan coba-coba (trial and error). Penyesuaian diri karena kebiasaan, drill, dan trial and error, bersifat mekanis, kadang-kadang secara kebetulan memerlukan banyak waktu. Peneyesuaian diri dengan pemikiran terjadi karena pengertian, pendapat pemahaman, pencarian makna dan hubungannya yang tampak dalam pemecahan dan penguasaan keadaan baru dari kesulitan yang dihadapinya. Intelegensi dapat diuraikan sebagai kemampuan menangkap, memahami, menjelaskan, menguraikan, memadukan dan menyimpulkan arti hubungan dan sangkut paut makna. Tiap orang memiliki isi, proses, dan cara berfikir yang berbeda satu dengan yang lainnya.

3. Bakat-bakat kejiwaan yang khas dan majemuk

   Bakat-bakat yang khas atau bakat dalam pengertian yang sempit ialah bakat yang sejak awal sudah ada dan terarah pada suatu lapangan yang terbatas, seperti bakat bahasa, bakat melukis, bakat music, bakat seni, bakat ilmu dan lain-lain. Adapun bakat majemuk yang berkembang lambatlaun dari bakat produktif kea rah yang sangat bergantung dalam keadaan di dalam dan di luar individu, seperti bakat filsafat, bakat hukum, bakat pendidik, bakat psikologi, bakat kedokteran, bakat ekonomi, bakat politik dan lain-lain.

4. Bakat yang lebih berdasarkan pada alam perasaan dan kemampuan

Bakat ini berhubungan dengan watak, seperti kemampuan untuk mengadakan kontak sosial, kemampuan mengasihi, kemampuan merasakan atau menghayati, perasaan orang lain.

Berdasarkan sifat prestasinya, bakat dapat digolongkan dalam :

1. Bakat Reproduktif ialah kemampuan untuk memprodusir hasil pekerjaan orang lain dan menguraikan kembali dengan tepat pengalaman-pengalaman sendiri. Bakat ini berhubungan erat dengan daya ingat.
2. Bakat Aplikatif ialah kemampuan memiliki, mengamalkan, mengubah dan menerangkan pendapat, buah pikiran yang berasal dari orang lain.
3. Bakat Interpretatif ialah bakat menerangkan dan menangkap hasil pekerjaan orang lain, sehingga disamping sesuai dengan maksud penciptanya, dalam penjelasan itu juga tampil pendapat atau pendirian pribadi.
4. Bakat Produktif ialah kemampuan menciptakan hal-hal yang aru berupa sumbangan dalam ilmu pengetahuan, pembangunan, dan lapangan kehidupan yang lain yang berharga.

F. Strategi, Model, dan Evaluasi Pendidikan Anak Berbakat

Pendidikan anak berbakat bertujuan agar anak menguasai sistem konseptual dalam berbagai mata pelajaran, anak mampu mengembangkan keterampilan dan strategi yang memungkinkan mereka menjadi lebih mandiri, keatif dan memenuhi kebutuhannya sendiri, anak harus mengembangkan suatu kesenangan dan gairah belajar yang akan membawa mereka kepada kerja keras.

Menurut Depdiknas dalam Syamsu Yusuf tujuan pendidikan bagi anak berbakat adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum
   a. Memenuhi kebutuhan peserta didik yang memiliki karakterisitik spesifik dari segi perkembangan kognitif dan afektif.
   b. Memenuhi hak asasi peserta didik yang sesuai dengn kebutuhan pendidikan bagi dirinya sendiri.
   c. Memenuhi minat intelektual dan perspektif masa depan peserta didik
   d. Memenuhi kebutuhan aktualisai diri pesera didik

e. Menimbang peran peserta didik sebagai aset masyarakat dan kebutuhan masyarakat untuk pengisian peran
f. Menyiapkan peserta didik sebagai pemimin masa depan.

2. Tujuan Khusus
   a. Memberikan pengarahan untuk dapat menyelesaikan program pendidikan secara cepat sesuai dengan potensinya.
   b. Meningkatkan efisien dan efektivitas proses pembelajaran peserta didik.
   c. Mencegah rasa bosan terhadap iklim yang jelas kurang mendukung berkembangnya potensi keunggulan peserta didik secara optimal
   d. Memacu siswa untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, spiritulal dan emosionalnya secara seimbang.

1). Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berbakat sangat mendorong anak tersebut untuk berprestasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan strategi pembelajaran adalah sebagai berikut

a. Pembelajaran anak berbakat harus diwarnai dengan kecepatan dan tingkat kompleksitas yang lebih sesuai dengan kemampuannya yang lebih tinggi dari anak normal.
b. Pembelajaran pada anak berbakat tidak saja mengembangkan kecerdasan intelektual semata, tetapi pengembangan kecerdasan emosional juga patut mendapat perhatian.
c. Pembelajaran anak berbakat berorientasi pada modifikasi proses, isi/content, dan produk.

Sehubungan dengan itu, M. Soleh YAI (1996) dalam mengemukakan 3 jenis modifikasi sebagai berikut. Modifikasi proses adalah metodologi atau cara guru mengajar termasuk cara mempresentasikan isi materi kepada siswa yang berorientasi kepada berpikir tingkat tinggi, banyak pilihan, mengupayakan penemuan, mendukung penalaran atau argumentasi, kebebasan memilih, interaksi kelompok dan simulasi, serta kecepatan dan variasi proses. Modifikasi isi adalah modifikasi dalam materi pembelajaran baik berupa ide, konsep maupun fakta. Pembelajaran dimulai dari hal yang konkret, menuju ke hal yang kompleks, abstrak dan bervariasi. Modifikasi produk atau hasil adalah produk

kurikulum yang tidak dapat dipisahkan dari isi materi dan proses pembelajaran yang dikembangkan dan merupakan hasil dari proses yang dievaluasi untuk menentukan efektivitas satu program.

2). Model Pembelajaran

Pendidikan bagi anak berbakat dapat dilaksanakan dengan berbagai model, seperti akselarasi, pengayaan dan pengelompokan berdasarkan kemampuan.

a. Model Akselarasi atau percepatan

Akselarasi tidak hanya diartikan sebagai cara untuk mempercepat penyelesaian studi agar lulus lebih awal, tetapi lebih menekankan kepada kebutuhan belajar siswa berbakat agar meningkatkan produktivitas, efisiensi dan evektivitas belajar mereka, percepatan yang terjadi dalam belajar tanpa intervensi pendidikan dan mengurangi kebosanan atau kejenuhan dalam belajar.

Model akselarasi dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, meliputi:

- Loncat kelas

  Usia mental para anak berbakat lebih tinggi dari usia sebenarnya, maka mudah timbul perasaan tidak puas belajar bersama dengan anak-anak seumurnya. Meskipun banyak aspek perkembangan lain pada anak ternyata memang lebih maju daripada anak-anak seumurnya misal aspek sosial. Akan tetapi cara percepatan dengan meloncat anak pada kelas-kelas yang lebih tinggi dianggap kurang baik, antara lain karena mempermudah timbulnya masalah-masalah penyesuaian, baik di sekolah, dirumah maupun dilingkungan sosialnya. Kecuali norma yang dipakai adalah norma yang diikuti bukan norma dari anak berbakat itu sendiri.

- Percepatan melalui pelayanan individual

  Cara ini tergolong cara yang baik karena diberikan berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan anak itu sendiri. Kesulitannya ialah pengaturan andsminitrasi sekolah yang meliputi pengaturan-pengaturan tenaga pengajar karena hanya memberikan pelajaran secara individual kepada anak. Pada anak sendiri dikhawatirkan akan timbul kesulitan dalam penyesuai diri, baik sosial maupun emosional karena terbatasnya hubungan-hubungan sosial dengan teman-teman sebaya.

- Mengikuti pembelajaran di kelas yang lebih tinggi

  Siswa memiliki peluang untuk mengikuti mata pelajaran tertentu yang diprogramkan di kelas yang lebih tinggi. Pelung yang diberikan itu dapat mempercepat penyelesaian studi siswa.

b. Model Pengayaan

Melayani siswa yang memiliki kemampuan unggul, dapat dilakukan dengan program pengayaan yaitu memberikan tugas-tugas tambahan yang relevan dengan bidang studi yang diterimanya. Model pengayaan ini dapat memenuhi harapan atau kebutuhan siswa dalam mengembangkan kemampuan intelektualnya, dengan tidak memisahkan mereka dari teman-teman sekelasnya.

Dalam model pengayaan/*enrichment* ini anak mendapatkan pembelajaran tambahan sebagai pengayaan. Pengayaan ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu sebagaiberikut :

- Secara vertikal;

Cara ini untuk memperdalam salah satu atau sekelompok mata pelajaran tertentu. Anak diberi kesempatan untuk aktif memperdalam ilmuPengetahuan yang disenangi, sehingga menguasai materi pelajaran secaraluas dan mendalam.

- Secara horizontal;

Anak diberi kesempatan untuk memperluas pengetahuan dengan tambahanatau pengayaan yang berhubungan dengan pelajaran yang sedang dipelajari.

c. Model Pengelompokan Berdasarkan Kemampuan

Siswa yang diidentifikasi berbakat dari semua tingkat kelas yang sama disuatu sekolah dikelompokan ke dalam satu kelas. Kelompok tersebut terdapat lima atau delapan anak. Jika lebih dari delapan anak sebaiknya mereka dikelompokan menjadi dua kelompok. Setiap kelompok dibimbing oleh guru yang memiliki kemampuan atau keterampilan khusus untuk mengajar atau membimbing para siswa yang berkemampuan luar biasa.

Terdapat pula model atau sistem penyelenggaraan pendidikan lainnya bagi anak berbakat atau cemerlang adalah :

a. Sekolah khusus

Dari sudut administrasi sekolah mudah diatur. Namun dari sudut anak banyak kerugiannya karena dengan mengikuti pendidikan khusus, anak terlempar jauh dari lingkungan sosialnya dan menjadi anggota kelompok sosial khusus dan istimewa. Perkembangan aspek kepribadian sangat mengkhawatirkan karena kurangnya kemungkinan anak untuk mendefinisikan aspek-aspek kepribadian seluas-luasnya. Dalam hal ini bisa dicapai melaui pergaulan, nilai sebagai anggota masyarakat, ia akan mudah merasa sebagai anggota masyarakat dengan kelas dan tingkatan.

b. Kelas khusus

Pada model ini kurikulum dibuat khusus demikian pula dengan guru-gurunya. Keuntungannya ialah mudah mengatur pelaksanaannya dan pada murid sendiri merasa ada persaingan dengan teman-temannya yang seimbang kemampuannya dan jumlah pelajaran serta kecepatan dalam menyelesaiakan suatu mata pelajaran bisa disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan anak. Kerugia akan terjadi pada anak-ana normal yang sebaya, sehingga proses sosialisasi di sekolah menjadi berkurang. Perlakuan istimewa oleh pihak sekolah dan guru-guru menimbulkan perasaan harga diri yang berlebihan. Karena dalam kenyataannya dia berada dalam kelas yang eksekutif, tersendiri dan sulit menyesuaikan diri

c. Kelas terintegrasi

Cara ini bisa dilakukan di setiap sekolah karena anak berbakat mengikuti secara penuh acara di sekolah dan setelah itu memperoleh pelajaran tambahan dikelas khusus.

Waktu belajarnya bertambah dan mata pelajaran dasar atau yang berhubungan dengan kemampuan khusus ditambah. Permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pendidikan model terintegrasi atau inklusi adalah bagaimana memberikan perhatian kepada setiap individu anak dalam setting kelas yang relatif beragam kemampuannya. Implikasi dari penerapan model ini adalah perlunya kurikulu yang fleksibel atau berdiferensi, yang bisa mengakomodasi anak-anak normal maupun berbakat, dan guru-guru

memiliki kesiapan atau kemampuan untuk melayani siswa yang memiliki keragaman karakterisitik tersebut.

Kerugian yang mungkin dialami anak:

- Berkurangnya waktu untuk melakukan kegiatan lain yang diperlukan untuk meperkembangkan aspek kpribadiannya, misal pergaulan, olah raga dan kesenian.
- Pada waktu anak mengikuti kelas biasa, ia merasa bosan dan pada anak-anak yang masih kecil, kemungkinan mengganggu teman-temannya bertambah.
- Dikelas biasa anak tidak terlatih bersaing dan bekerja keras untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya.

Pada model ini anak mengikuti kelas biasa tetapi tidak seluruhnya dan ditambah dengan mengikuti kelas khusus. Jumlah jam pelajaran tetap dan hal ini menguntungkan anak sehingga ia masih mempunyai waktu untuk mengembangkan aspek-aspek kepribadiannya. Keuntungan lain jumlah jam belajar yang cukup lama di kelas khusus masih memperoleh kesempatan bersaing dengan teman-temannya yang mempunyai potensi berbeda.

3). Evaluasi Pembelajaran

Selain masalah kriteria dan prosedur identifikasi, perhatian khusus kepada anak berbakat melibatkan beberapa dimensi lain, seperti dikemukakan oleh Dedi Supriadi (1992) yaitu; “Perancangan kurikulum, penyediaan sarana pembelajarannya, model perlakuannya, kerjasama dengan keluarga dan pihak luar, serta model bimbingan dan konselingnya”.

Kurikulum berdiferensiasi bagi anak berbakat mengacu pada penanjakan kehidupan mental melalui berbagai program yang akan menumbuhkan kreativitasnya serta mencakup berbagai pengalaman belajar intelektual pada tingkat tinggi. Dilihat dari kebutuhan perkembangan anak berbakat, maka kurikulum berdiferensiasi memperhatikan perbedaaan kualitatif individu berbakat dari manusia lainnya. Dalam kurikulum berdiferensiasi terjadi penggemukan materi, artinya materi kurikulum diperluas atau diperdalam tanpa menjadi lebih banyak. Secara kualitatif materi pelajaran berubah dalam penggemukan beberapa

konsep esensial dari kurikulum umum sesuai dengan tuntutan bakat, perilaku, keterampilan dan pengetahuan serta sifat luar biasa anak berbakat.

Dengan demikian, kurikulum pendidikan seyogyanya bisa mengakomodasi dimensi vertikal maupun horisontal pendidikan anak.Secara vertikal, anak-anak berbakat harus dimungkinkan untuk menyelesaikannya pendidikannya lebih cepat.Secara horisontal, disediakan program pengayaan (enrichment), dimana siswa berbakat dimungkinkan untuk menerima materi tambahan, baik dengan tugas-tugas maupun sumber-sumber belajar tambahan, baik dengan tugas-tugas maupun sumber-sumber belajar tambahan.

Proses evaluasi pada anak berbakat tidak berbeda dengan anak pada umumnya, namun karena kurikulum atau program pelajaran anak berbakat berbeda dalam cakupan dan tujuannya maka dibutuhkan penerapan evaluasi yang sesuai dengan keadaan tersebut.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui ketuntasan belajar anak berbakat. Sehubungan dengan hal itu Conny Semiawan, (1992) dalam mengemukakan bahwa instrumen dan prosedur yang digunakan mengacu pada ketuntasan belajar adalah perwujudan dari kekhususan layanan pendidikan anak berbakat, hasil umpan balik untuk keperluan tertentu, pemantulan tingkat kemantapan penguasaan suatu materi sesuai dengan sifat, keterampilan, dan kemampuan maupun kecepatan belajar seseorang. Model pengukuran seperti tersebut di atas adalah pengukuran acuan criteria. Sebaliknya ada pengukuran acuan norma yang membandingkan keberbakatan seseorang dengan temannya. Kedua cara tersebut tidak selalu menunjuk hasil akhir yang diinginkan, melainkan merupakan petunjuk bidang mana yang sudah dikuasai individu sehingga memberikan keterangan mengenai taraf kemampuan yang dicapai tanpa tergantung pada kinerja temannya.

G. Permasalahan yang Dapat Terjadi pada Anak Berbakat

Keberbakatan menimbulkan permasalahan apabila mereka tidak memperoleh dukungan dan bantuan yang diperlukannya.Permasalahan itu terutama timbul pada masa remaja. Buescher dan Higham (1990) mengemukakan bahwa anak anak berbakat antara usia 11 dan 15 tahun sering menghadapi berbagai masalah sebagai akibat dari keberbakatannya yang meliputi: perfeksionisme, kompetitif, penilaian yang tidak realistis terhadap keberbakatannya, penolakan dari teman sebaya, kebingungan akibat “pesan-

pesan" yang beraneka ragam sehubungan dengan bakatnya, dan tekanan dari orang tua serta masyarakat agar berprestasi, di samping permasalahan yang ditimbulkan oleh terlalu tingginya ekspektasi terhadap diri mereka.

Beberapa anak berbakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan dan memilih teman, memilih jurusan di sekolah atau perguruan tinggi, dan akhirnya juga mengalami kesulitan dalam memilih karir. Masalah-masalah perkembangan yang dialami oleh semua remaja juga dialami oleh remaja berbakat tetapi masalahnya dibuat lebih kompleks oleh kebutuhan khusus dan karakteristik anak berbakat.Kemudian kesulitan utama remaja berbakat. Salah satu nya juga disebabkan karena lingkungan belajar yang kurang menantang kepada mereka untukmewujudkan kemampuannya secara optimal.

Menurut Utami Munandar, 2009 mengemukaakn ada tiga faktor yang menyebabkan anak berbakat dalam keadaan rentan merupakan ciri kepribadian yang dapat menimbulkan kesulitan, menyebabkan ketegangan bagi anak berbakat yaitu:

1. Karakteristik kepribadian yang menyebabkan kerentanan anak berbakat ialah:
    a. Perfeksionisme

        Dorongan dalam untuk mencapai kesempurnaan membuat siswa berbakat tidak putus asa dengan prestasinya yang tidak dapat memenuhi tujuan-tujuan pribadinya. Dorongan akan kesempurnaan ini dapat menyebabkan anak berbakat hanya mau memilih kegiatan tertentu jika ia yakin akan bisa berhasil. Kritik terhadap diri sendiri yang berlebih dan taraf aspirasi yang tidak realitis membuat banyak anak berbakat diliputi rasa tidak mampu.

    b. Kepekaan yang berlebihan

        Sistem saraf yang super sensitif dari anak berbakat membuatnya lebih peka dalam pengamatan, menanggapi dirinya dan lingkungannya secara analitis dan kritis, sehingga ia menjadi mudah tersinggung dan diliputi perasaan seperti dikucilkan. Anak kecil yang berbakat sering digambarkan sebgai anak yang hiperraktif dan perhatiannya mudah beralih.

    c. Kurang keterampilan sosial

        Ada anak berbakat yang sulit menyesuaikan dirinya dengan lingkungn sosialnya, mereka lebih banyak menyendiri dan dapat dihinggapi rasa kesendirian dn kesunyian. Di lain pihak ada pula anak berbakat yang ingin

populer dan menjadi pimpinan, hal ini dapat mengarah kekecenderungan untuk mendominasi kelompoknya.

Sosialisasi dini dari anak berbakat sagat penting bagi perkembangan mereka sebagai pemimpin masa depan. Mereka memerlukan bimbingan orang dewasa untuk membantu mereka belajar bagaimana berperanserta sebagai anggota kelompok, disamping juga memenuhi kebutuhan pribadi mereka.

2. Kondisi lingkungan yang dapat menyulitkan anak berbakat ialah:
   a. Isolasi sosial

      Karena kurang memahami ciri-ciri dan kebutuhan anak berbakat, orang dewasa dalam sikap dan perilaku mereka dapat menunjukkan sentimen atau penolakan terhadap anak berbakat.

      Demikian pula kelompok sebaya dapat memberi tekanan terhadap anggota kelompokyang menyimpang dari mayoritas, yang kreatif dan berbakat. Kondisi ini dapat menyebabkan anak berbakat mengalami isolasi sosial.

   b. Harapan yang tidak realistis

      Harapan atau tuntutan yang tidak realistis terhadap anak berbakat dari pihak orang tua atau orang dewasa lainnya dapat terjadi karena dua hal:

      - Kecenderungan untuk menggeneralisasi sehingga anak berbakat diharapkan/dituntut menonjol dalam semua bidang.
      - Pelibatan ego orang tua atau guru terhadap keberhasilan anak (ingin merasa bangga atas prestasi anak).

   c. Tidak tersedia pelayanan pendidikan yang sesuai

      Ketidakpedulian terhadap kebutuhan anak berbakat dan penolakan terhadap hak-hak mereka menyebabkan masyarakat kurang memberikan kesempatan pendidikan yang sesuai bagi anak berbakat. Akibat dari keterlantaran ini ialah bahwa siswa berbakat harus menyelesaikan pendidikan formal mereka dalam sekolah yang lebih menekankan konformitas terhadap “yang rata-rata”. Dalam iklim sosial ini anak “berbeda”, hal ini dapat mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan mentalnya maupun terhadap pertumbuhan dan perkembangannya secara menyeluruh.

Terkait dengan masalah anak berbakat *Ohio's State Board of Education* telah melakukan penelitian, yang hasilnya menunjukkan bahwa

1. Banyak anak berbakat mengalami "*drop out*" dari sekolah, karena tidak memperoleh layanan akademik atau pembelajaran yang dibutuhkan,
2. Anak berbakat yang tidak mendapatkan tantangan, atau stimulasi yang dapat mengembangkan potensinya cenderung kurang siap menerima tantangan, tugas-tugas sekolah yang lebih tinggi
3. 85% anak berbakat mengalami *"underachiver"* karena mereka tidak memperoleh layanan pendidikan yang diharapkan, dan
4. Mereka sering mengalami rasa bosan, kurang bersemangat, frustasi, rasa marah, dan merasa kurang berharga.

Terdapat pula permasalahan anak berbakat yaitu:

1. Kemampuan berpikir kritis dapat mengarah ke arah sikap
2. Meragukan (skeptis), baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain;
3. Pemberian Label/ sebutan pada anak berbakat bahwa dirinya berbakat dapat menimbulkan harapan terhadap kemampuan anak dan dapat menimbulkan beban mental pada dirinya dan kadang mengakibatkan frustasi.
4. Resiko dan tekanan yang menyertai potensi intelegensi tinggi dan sering mengarahkan anak yang berpotensi tinggi untuk menjadi anak yang bersikap defensif.
5. Kemampuan kreatif dan minat untuk melakukan hal-hal yang baru, bisa menyebabkan mereka tidak menyukai atau lekas bosan terhadap tugas-tugas rutin;
6. Perilaku yang ulet dan terarah pada tujuan, dapat menjurus ke keinginan untuk memaksakan atau mempertahankan pendapatnya;
7. Kepekaan yang tinggi, dapat membuat mereka menjadi mudah tersinggung atau peka terhadap kritik;
8. Semangat, kesiagaan mental, dan inisiatifnya yang tinggi, dapat membuat kurang sabar dan kurang tenggang rasa jika tidak ada kegiatan atau jika kurang tampak kemajuan dalam kegiatan yang sedang berlangsung;
9. Dengan kemampuan dan minatnya yang beraneka ragam, mereka membutuhkan keluwesan serta dukungan untuk dapat menjajaki dan mengembangkan minatnya;

10. Keinginan mereka untuk mandiri dalam belajar dan bekerja, serta kebutuhannya akan kebebasan, dapat menimbulkan konflik karena tidak mudah menyesuaikan diri atau tunduk terhadap tekanan dari orang tua, sekolah, atau temantemannya.
11. Ia juga bisa merasa ditolak atau kurang dimengerti oleh lingkungannya;
12. Sikap acuh tak acuh dan malas, dapat timbul karena pengajaran yang diberikan di sekolah kurang mengundang tantangan baginya.

H. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Anak Berbakat

1. Penerapan Kurikulum Berdiferensi

Penerapan model pendidikan siswa berbakat yang terintegrasi dalam kelas yang reguler/ normal disamping memiliki banyak keuntungan bagi perkembangan psikologi dan sosial anak, tetapi juga menghadapi hal yang rumit, yaitu perlunya memberikan perhatian secara berbeda melalui "pengajaran yang diindividualisasikan" yaitu setting kelas tetapi perhatian diberikan kepada setiap individu anak.

Implikasi dari kondisi tersebut untuk penyelenggaraan siswa berbakat diperlukan penerapan kurikulum berdiferensi, yang dapat mengakomodasi para siswa yang normal maupun yang cemerlang. Dengan demikian, kurikulum pendidikan seyogyanya dapat mengakomodasi dimensi vertikal maupun horisontal. Secara vertikal, anak-anak cerdas harus dimungkinkan untuk menyelesaikan pendiikannya lebih cepat. Secara horisontal, disediakan program pengayaan dimana siswa cemerlang dimungkinkan untuk mendapatkan materi tambahan, baik dengan tugas-tugas maupun sumber-sumber belajar tambahan.

Menurut Conny S ada beberapa materi yang harus menjadi landasan utama dalam mengembangkan kurikulum berdiferensi yang berkenaan dengan materi, keterampilan, pengembangan pikiran, dan sikap yang harus dicapai. Mengenai *materi*, isi kurikulum harus mempusatkan dan mengkoordinasi ide dan masalah serta tema yang lebih luas, rumit dan mendalam, yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan secara melintang dengan sistem pemikiran.

a. Keterampilan Mental

- Pengembangan kurikulum harus memberikan pengalaman belajar sehingga anak memiliki pikiran yang terorganisasikan. Caranya ialah dengan memasukan konsep generalisasi, prinsip dan teori yang berarti,

yang berkaitan dengan maslah aktual yang menarik bagi dirinya ke dalam proses berfikir.

- Pengembangan kurikulum harus menampilkan ide dan teori masa lalu, masa yang akan datang serta masa kini untuk memperluas pemahaman yang lebih mendalam terhadap berbagai sistem dan nilai, sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif dan afektif yang lebih tinggi.
- Pengembangan kurikulum harus menerapkan pengetahuan pada tingkat ganda dan pengertian dalam berbagai situasi dan kejadian secara beragam. Memperluas cara berfikir, mencari jawaban terhadap berbagai kejadian harus diselenggarakan dalam pengalaman belajar.
- Pengembangan kurikulum harus memberikan kesempatan untuk memperoleh dan menerapkan belajar secara mendasar.
- Kondisi lingkungan harus menumbuhkan inspirasi turunan orisinal terhadap berbagai masalah.
- Kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang dijabarkan dari disiplin yang satu ke bidang lain harus diadakan dalam berbagai situasi belajar dengan berbagai kemungkinan yang terbuka.

b. Penerapan berfikir produktif

- Memberikan kesempatan kepada anak untuk mengkonseptualkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan ke dalam bentuk inovatif dengan perspektif bermakna dalam berbagai mata pelajaran. Guru harus mempersiapkan bahan pemerkaya peserta didik.
- Pengembangan keterampilan berbagai bentuk berkomunikasi.

c. Pengembangan sikap

- Kesempatan menjelajah rintisan ilmu pengetahuan dengan kemungkinan menyatakan pendapatnya melalui berbagai media.
- Kesempatan pengembangan metode dan keterampilan musyawarah serta konsesus terhadap perbedaan, penjabaran masalah melalui berbagai kemungkinan.
- Memahami peranan persepsi dalam penafsiran isu dan cara pengembangan pendapat pribadi serta pernyataannya dalam hal-hal yang dalam program khusus harus diberikan peluang untuk ditumbuhkan.

2. Penciptaan Lingkungan yang Kondusif

Penyelenggaraan pendidikan anak berbakat perlu didukung oleh penciptaan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi dan memberikan peluang-peluang bagi anak dalam mengembangkan potensinya. Gallagher mengemukakan beberapa hal yang terkait dengan upaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak barbakat, yaitu:

a. Memberikan program pengayaan
b. Menugaskan “guru konsultan”
c. Menyediakan ruang sumber
d. Menggunakan mentor
e. Memberikan latihan kepada anak untuk melakukan studi mandiri
f. Menyediakan kelas-kelas khusus terhadap minat siswa

3. Penempatan Guru yang Qualified

Salah satu faktor yang sangat berarti bagi keberhasilan penyelengara pendidikan anak berbakat adalah guru. Guru yang dipandang cocok bagi pendidikan anak berbakat, adalah yang memiliki karakeristik sebagai berikut:

- Memiliki kemampuan berfikir logis, rasional dan produktif
- Memiliki kreativitas yang tinggi
- Memiliki pengalaman belajar yang bermakna
- Memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulis
- Memiliki pemahaman konsep tentang kebermaknaan
- Memiliki keterampilan dalam menerapkan berbagai metode pembelajaran secara efektif
- Memiliki wawasan yang luas tentang berbagai aspek kehidupan, terutama yang terkait dengan materi-materi yang diajarkan kepada anak
- Memiliki komitmen yang kuat terhadap tugas yang diembannya
- Memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan anak berbakat
- Memiliki pemahaman tentang kurikulum berdiferensi dan langkah-langkah pengembangannya

- Memiliki pemahaman tentang konsep bimbingandan mampu menerapkannya
- Menguasai teknologi informasi yang menunjang tugasnya dalam mengajar anak berbakat.

I. Pihak yang Berperan pada Anak Berbakat

1. Peran Guru

   a. Pertama-tama guru perlu memahami diri sendiri, karena anak yang belajar tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang dilakukan guru, tetapi juga bagaimana guru melakukannya, guru pun perlu memiliki pengertian tentang keterbakatan.

   b. Guru hendaknya mengusahakan suatu lingkungan belajar sesuai dengan perkembangan yang unggul dari kemampuan-kemampuan anak.

   c. Guru anak berbakat hendaknya lebih banyak memberikan tantangan daripada tekanan

   d. Guru anak berbakat tidak hanya memperhatikan produk atau hasil belajar siswa, tetapi lebih-lebih proses belajar.

   e. Guru anak berbakat lebih baik memberikan umpan balik daripada penilaian

   f. Guru anak berbakat harus menyediakan beberapa alternatif strategi belajar

   g. Guru hendaknya dapat menciptakan suasana di dalam kelas yang menunjang rasa harga diri anak serta dimana anak merasa aman dan berani mengambil resiko dalam menentukan pendapat dan keputusan.

2. Peran Orang Tua

   Orang tua memegang peranan yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak berbakat istimewa :

   - Memahami konsep keberbakatan istimewa
   - Perlu dipahami bahwa anak yang memiliki potensi berbakat istimewa memerlukan dorongan psikologis maupun materil yang berbeda maka pengasuhannya diharapkan disesuaikan dengan karakteristik yang dimilikinya.
   - Membuat komunikasi dengan pihak sekolah dalam mengembangkan pendidikan bagi anaknya.
   - Mengembangkan lingkungan yang kondusif dalam proses pendidikan anak berbakat istimewa.

3. Masyarakat

Suatu masyarakat yang berdasarkan pada hukum yang adil, yang memungkinkan kondisi ekonomi dan psikologis baik bagi warga negaranya, merupakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan kreatifitas. Terdapat sembilan faktor sosiokultural yang kreatif.

- Tersedianya sarana kebudayaan
- Keterbukaan terhadap rangsangan kebudayaan
- Penekanan pada *"becoming"* (menjadi) bukan sekedar hanya pada *"being"* (sekedar ada)
- Memberikan kesempatan bebas terhadap media kebudayaan bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi
- Timbulnya kebebasan setelah pengalaman tekanan dan tindakan keras
- Keterbukaan terhadap kebudayaan yang berbeda, bahkan yang kontras.
- Toleransi dan minat terhadap pandangan yang divergen
- Adanya interaksi antara individu-individu yang berpengaruh
- Adanya insentif, penghargaan, atau hadiah

Selain itu sangat dibutuhkan kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga dan sekolah dapt bersama-sama mengusahakan pelayanan pendidikan bagi anak berbakat, misalnya dengan memandu dan memupuk minat anak. Perlu diadakan pertemuan berkala antara guru-guru yang membimbing anak berbakat dengan orangtua anak berbakat untuk bersama-sama membicarakan dan mambahas masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan keberbakatan anak.

BAGIAN 8

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN GLOBAL DAN GLOBALISASI

Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia (Edison A. Jamli, 2005). Proses globalisasi berlangsung melalui dua dimensi, yaitu dimensi ruang dan waktu. Globalisasi bisa dianggap sebagai penyebaran dan intensifikasi dari hubungan ekonomi, sosial, dan kultural yang menembus sekat-sekat geografis ruang dan waktu. Proses globalisasi ini hampir mencakup semua bidang dengan adanya perkembangan ekonomi, politik, teknologi, informasi, komunikasi, transportasi, pendidikan dan sebagainya.

Pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan globalisasi. Dalam menuju era globalisasi, Indonesia harus melakukan reformasi dalam proses pendidikan, yaitu dengan menciptakan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel sehingga para lulusan dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat global dan dapat mengikuti perkembangan ekonomi, teknologi, informasi, komunikasi dan sebagainya. Pendidikan harus dirancang sedemikian rupa agar memungkinkan para peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh keterbukaan, kebersamaan namun tetap bertanggung jawab. Pendidikan juga harus dapat menghasilkan lulusan yang dapat terjun ke masyarakat dengan segala faktor pendukung dalam pencapaian sukses. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengelolaan pendidikan Indonesia yang berwawasan global atau pendidikan global.

Pendidikan global di sini hadir sebagai upaya dalam menjawab permasalahan-permasalahan global yang ada di masyarakat. Penerapan pendidikan global bertujuan agar

peserta didik memiliki kepekaan terhadap hal-hal yang terjadi di masyarakat sehingga peserta didik kelak menjadi pribadi dan sumber daya manusia yang siap pakai dan siap berkompetitif. Di samping itu tujuan pendidikan global adalah untuk mengembangkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*attitudes*) yang diperlukan untuk hidup secara efektif dalam dunia yang saat ini sumber daya alamnya semakin menipis dan ditandai oleh keragaman etnis, pluralisme budaya dan rasa ketergantungan satu sama lain.

A. Pendidikan Global dan Globalisasi

1. Hakikat pendidikan

Rogers, Burdge, Korsching dan Donner Meyer (1988:437) menyatakan bahwa pendidikan sebagai proses trasmisi budaya mengacu kepada setiap bentuk pembelajaran budaya (*cultural learning*) yang berfungsi sebagai transmisi pengetahuan, mobilitas sosial, pembentukan jati diri dan kreasi pengetahuan. Toffler dalam Sonhadji (1993 : 4) menyatakan bahwa sekolah atau lembaga pendidikan masa depan harus mengarahkan peserta didiknya untuk belajar bagaimana belajar dalam memperoleh suatu pengetahuan. Pendidikan diarahkan pada upaya memanusiakan manusia, maksudnya dalam pelaksanaan dan proses pendidikan harus mampu membantu peserta didik agar menjadi manusia yang berbudaya tinggi dan bemilai tinggi (bermoral, berwatak, bertariggungjawab dan bersosialitas). Untuk mewujudkan capaian tersebut, implementasi pendidikan harus didasarkan pada fondasi pendidikan yang memiliki prinsip *learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together*. Seiring dengan perkembangan global pergeseran orientasi pendidikan dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul harus dilakukan secara fundamental melalui pendidikan yang berkarakter, mampu menumbuhkan kesadaran diri dan komuniti dengan mendasarkan pada sistem nilai yang dimiliki.

Pendidikan merupakan investasi yang sangat strategis dalam melestarikan sistem nilai yang berkembang dalam kehidupan. Proses pendidikan merupakan upaya yang mempunyai dua arah, yaitu yang pertama bersifat menjaga kelangsungan hidupnya (*maintenance synergy*) dan kedua menghasilkaan sesuatu (*effective synergy*). Proses kependidikan juga tidak hanya memberikan pengetahuan dan pemahaman peserta didik secara kognitif dan keterampilan, namun juga diarahkan pada pembentukan sikap, perilaku dan kepribadian peserta didik, mengingat perkembangan komunikasi, informasi dan kehadiran media cetak maupun elektronik

yang membawa pengaruh pada pemikiran dan perilaku manusia yang besar dan tidak selalu membawa pengaruh yang positif bagi peserta didik. Tugas pendidik dalam konteks ini membantu untuk mengkondisikan peserta didik pada sikap, perilaku atau kepribadian yang benar, agar mampu menjadi *agent of modernization* bagi dirinya sendiri, lingkungan, masyarakat dan siapa saja yang dijumpai tanpa harus membedakan suku, agama,ras dan golongan.

2. Hakikat Globalisasi

Berdasarkan KBBI kata "globalisasi" berasal dari kata dasar "global" yang artinya secara umum, keseluruhan, seluruhnya, garis besar, secara utuh, dan kesejagatan. Mengglobal memiliki arti menyeluruh, meluas ke seluruh dunia atau mendunia.Globalisasi dapat diartikan sebagai pengglobalan seluruh aspek kehidupan atau perwujudan dari perubahan secara menyeluruh pada aspek kehidupan. Perubahan merupakan suatu proses aktual yang tidak pernah hilang selama manusia hidup di muka bumi. Adanya perubahan ini dikarenakan manusia pada dasarnya adalah makhluk kreatif atas rasa, cipta, dankarsa yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa.

Globalisasi juga dapat dimaknai dengan proses gerakan mendunia, yaitu suatu perkembangan pembentukan sistem dan nilai-nilai kehidupan yang bersifat global. Baharudin Darus menyatakan bahwa ada lima aspek globalisasi yaitu :

a. globalisasi informasi dan komunikasi;
b. globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas;
c. globalisasi gaya hidup, pola konsumsi, budaya dan kesadaran;
d. globalisasi media massa cetak dan elektronik;
e. globalisasi politik dan wawasan.

Menurut Thomas L. Friedman (2000), globalisasi dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif, memperkuat atau melemahkan sendi-sendi kehidupan, menyeragamkan atau mempolarisasikan, juga mendemokratisasikan atau justru sebaliknya. Akan tetapi semua itu tergantung bagaimana cara menanggapi dan merespon suatu perubahan. Era globalisasi merupakan masa dimana memberikan perubahan besar pada tatanan dunia secara menyeluruh dan perubahan itu dihadapi bersama sebagai suatu perubahan yang wajar baik perubahan yang dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif. Perubahan merupakan sesuatu hal yang pasti terjadi. Perubahan dalam era globalisasi ini di tandai dengan proses

kehidupan mendunia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang tranformasi dan komunikasi serta terjadinya lintas budaya.

National Council for the Sosial Studies (NCSS,1982) mengemukakan beberapa gejala atau fenemona proses globalisasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya evolusi dalam sistem komunikasi dan transportasi global.
2. Penggabungan perekonomian lokal, regional dan nasional menjadi perekonomian global.
3. Meningkatnya intensitas interaksi antar masyarakat yang menciptakan budaya global sebagai panduan dari budaya lokal, regional dan nasional yang beragam.
4. Munculnya sistem international yang mengikis batas-batas tradisi politik internasioanal dan politik nasional.
5. Meningkatkan dampak aktifitas manusia terhadap ekosistem di bumi.
6. Meningkatnya kesadaran global yang menumbuhkan kesadaran akan kedudukan manusia di bumi sebagai anggota makhluk manusia, sebagai penduduk di bumi dan sebagai anggota dalam sistem global.

Apabila pandangan suatu bangsa atau negara yang berpaling dari pandangan global hanya akan membuat negara atau bangsa itu terisolir, maka dari itu globalisasi telah menuntut setiap warga di dunia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia ini maka sekolah sebagai sarana memberikan dan memperoleh pendidikan berusaha untuk meningkatkan kualitas para lulusannya untuk dapat menjadi pribadi yang siap menghadapi tuntutan globalisasi baik dengan peningkatan pengetahuan, keterampilan maupun budi pekerti. Hal tersebut diharapkan agar peserta didik dapat mengikuti perubahan yang terjadi dan memanfaatkan keglobalisasian dengan memilah mana yang dapat memberikan dampak positif atau negatif.

B. Implementasi Pendidikan Global dan Globalisasi

Pendidikan global adalah sebuah gerakan sosial kontemporer yang mengarah pada arus perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat di seluruh dunia. Istilah pendidikan global sendiri dimulai dalam sistem pendidikan di Amerika yang berusaha ntuk membantu sekolah, universitas, dan instituisi pendidikan non formal dengan cara memberikan kompetensi dasar intelektual baik bagi anak-anak maupun orang dewasa demi memenuhi kebutuhan untuk mengatasi ealitas kehidupan saat ini. (Mulyanto 2010)

Pendidikan global juga merupakan upaya untuk menanamkan suatu pandangan

(*prespective*) tentang dunia kepada peserta didik dengan memfokuskan bahwa terdapat saling keterkaitan antar budaya, umat manusia dan kondisi di bumi. Tujuan pendidikan setiap mata pelajaran untuk kondisi saat ini menekankan pada kemampuan peserta didik dalam berfikir kritis dan peka terhadap masyarakat serta lingkungan sekitar. Peningkatan kemampuan berpikir kritis tersebut diupayakan dengan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hal tersebut semata-mata bertujuan agar peserta didik dapat secara aktif untuk mengeksplorasi pengetahuan yang dimilikinya untuk lebih mencari tahu dan mempelajari sesuatu. Akan tetapi dalam pembelajaran yang berwawasan global, fokus substansinya berasal dari hal-hal yang mendunia sehingga mencirikan pluralisme. Tujuan pendidikan global adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk hidup secara efektif dalam dunia yang sumber daya alamnya semakin menipis, teknologi, informasi dan komunikasi yang semakin berkembang pesat, dan adanya keragaman etnis serta pluralisme budaya satu sama lain.

Seiring dengan waktu permasalahan yang terjadi di dunia semakin beragam. Pendidikan dinilai merupakan jalan keluar bagi masalah yang terjadi pada masyarakat global tersebut. Tuntutan masyarakat global berupa tuntutan kemampuan profesional, harga ekonomis, kualitas produk yang tinggi, tenaga kerja yang berkualitas dan persaingan di pasar global. Adanya permasalahan-permasalahan tersebut, Lestari NT (2012) secara khusus mengemukakan bahwa tujuan pendidikan global yang dianggap sebagai solusi di era globalisasi antara lain bertujuan untuk:

1. Mengembangkan pengertian keberadaan peserta didik untuk membentuk masyarakat.
2. Memberikan pengertian peserta didik yang merupakan bagian dari masyarakat.
3. Memberi kesadaran kepada peserta didik bahwa mereka adalah penghuni planet bumi dan kehidupannya bergantung pada planet bumi tersebut.
4. Memberi kesadaran kepada peserta didik sebagai partisipan dan pelaku aktif dalam masyarakat global.
5. Mendidik peserta didik agar mampu secara bijaksana dan bertanggung jawab sebagai individu, umat manusia, penghuni planet bumi, dan sebagai anggota masyarakat global.

Willard M. Kniep (1986) mengemukakan bahwa isi pendidikan global dirumuskan dari realitas sejarah dan kondisi saat ini sehingga menggambarkan dan menunjukan dunia sebagai masyarakat global. Kniep menyatakan terdapat empat unsur

kajian yang di anggap esensial dan mendasar bagi pendidikan global, yaitu (1) kajian tentang nilai manusia, (2) kajian tentang sistem global, (3)kajian tentang masalah-masalah dan isu isu global, dan (4) kajian tentang sejarah hubungan dan saling ketergantungan antar orang, budaya dan bangsa. Kniep juga mengemukakan bahwa terdapat empat kategori pemikiran isi pendidikan global yang dapat menjadi masukan untuk kurikulum, yaitu 1) isu-isu perdamaian dan keamanan, 2) isu- isu pembangunan, 3) isu- isu lingkungan, dan 4) isu- isu hak asasi manusia. Oleh karena itu, menurut Barbara Benham Tye dan Kenneth A Tye dalam Mulyanto (2010) terdapat elemen penting yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan global, yaitu:

1. Sebuah kurikulum yang menghubungkan pelajar dari segala umur dan pemilihan *subject matter* atau mata pelajaran untuk mempelajari manusia sebagai sebuah entitas yang saling berhubungan di dalam konstelasi ruang dan waktu.
2. Adanya sebuah kurikulum yang menghubungkan pelajar dari segala umur dan pemilihan *subject matter* atau mata pelajaran untuk mempelajari bumi sebagai rumah ekologis dan kosmis sebagai tempat kehidupan umat manusia.
3. Adalah sebuah kurikulum yang menghubungkan pelajar dari segala umur dan pemilihan *subject matter* atau mata pelajaran untuk mempelajari struktur sosial global sebagai salah satu tingkatan dalam organisasi sosial manusia.
4. Adalah sebuah kurikulum yang menghubungkan pelajar dari segala umur dan pemilihan *subject matter* atau mata pelajaran untuk mempelajari diri mereka sendiri sebagai bagian dari spesies manusia, penghuni planet bumi, dan partisipan di dalam sebuah aturan sosial

Pada dasarnya pembelajaran dalam pendidikan global juga mengacu pada prinsip *learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together*. (Delors, 1996: 85). Yang dimaksud dengan *learning to know*(belajar untuk tahu)di sini adalah mengkondisikan peserta didik untuk memiliki pemahaman tentang apa yang perlu diketahui, bagaimana mendapatkan ilmu pengetahuan, mengapa ilmu pengetahuan perlu diketahui, untuk apa dan siapa yang akan menggunakan ilmu pengetahuan itu. Peserta didik juga diarahkan untuk memiliki pengetahuan yang *fleksibel, adaptable, value added*, dan siap pakai.

Adapun yang dimaksud dengan *learning to do* (belajar untuk melakukan)adalah penekanan proses belajar agar peserta didik menghayati proses belajar tersebut secara *active learning*. Menurut Dewey pembelajaran dapat dilakukan dengan 1). belajar peserta didik dengan berpikir kreatif, 2). keterampilan proses, 3). *problem solving*

approach, 4). pendekatan inkuiri, 5). program sekolah yang harus terpadu dengan kehidupan masyarakat, dan 6). bimbingan sebagai bagian dari mengajar. Beberapa bentuk *Active Learning ;* Kegiatan *Active learning* dilakukan dengan kegiatan mandiri, peserta didik membaca sendiri bahan yang akan dibahas di kelas guru sebagai fasilitator untuk mengembangkan pengetahuan peserta didik melalui diskusi. Pembahasan (diskusi) di kelas dapat dilakukan dengan penugasan pembuatan artikel, melakukan *problem possing* dan *problem solving*, melakukan sesuatu yang bermakna, atau dengan kata lain adalah a*ctive learning*.

Prinsip berikutnya adalah*learning to be (*belajar untuk menjadi diri sendiri). Pada prinsip iniproses pembelajaran mengarah pada lahirnya manusia terdidik dengan sikap mandiri. Kemandirian belajar merupakan kunci terbentuknya rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri untuk berkembang secara mandiri. Sikap percaya diri akan lahir dari pemahaman dan pengenalan diri secara tepat. Belajar mandiri harus didorong melalui penumbuhan motivasi. Banyak pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan dalam melatih kemandirian peserta didik, misalnya; *pendekatan sinektik, problem soving, keterampilan proses, discovery, inquiry, kooperatif,* dan sebagainya.

Prinsip yang terakhir adalah *learning to live together*(belajar untuk hidup bersama). *Pada* prinsip ini,proses pembelajaran mendorong peserta didik untuk menghayati hubungan antar manusia secara intensif dan terus menerus untuk menghindarkan pertentangan ras/etnis, agama, suku, keyakinan politik, dan kepentingan ekonomi. Peningkatan , nilai kemanusiaan, moral, dan agama melandasi hubungan antar manusia. Pendekatan pembelajaran tidak semata-mata bersifat hafalan melainkan dengan pendekatan pembelajaran yang memungkinkan terintegrasikannya nilai-nilai kemanusiaan dalam kepribadian dan perilaku selama proses pembelajaran. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat diterapkan adalah dengan pendekatan *cooperative-integrated*.

Pada era globalisasi saat ini, prinsip pendidikan sebagai fondasi pembalajaran sangat diperlukan. Hal tersebut tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan makna dan tujuan pendidikan, namun juga sebagai fondasi pembelajaran dalam rangka memberikan hasil yang baik secara kognitif, keterampilan dan sikap. Di samping itu, proses pembelajaran diharapkan juga menjadi lebih efektif, yakni sebagai pencerminan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Keefektifan proses pembelajaran juga berkaitan dengan jalan, upaya, teknik dan strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran secara optimal,

tepat dan cepat (Nana Sudjana, 1996 : 52). Sekolah tidak hanya berkewajiban untuk memelihara nilai-nilai masyarakat, namun juga harus memberikan keaktifan kepada peserta didik untuk berpikir secara kritis dalam menghadapi masalah-masalah sosial, dan harus mengadakan usaha pemecahan masalah berkaitan dengan perubahan di era globalisasi dan masalah-masalah yang timbul secara global.

Dalam upaya menerapkan pendidikan global dan pembelajaran yang efektif, guru dapat memanfaatkan perkembangan teknologi yang terjadi di era globalisasi saat ini. Hal tersebut merupakan ciri dari pembelajaran berwawasan global dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat sehingga dapat mendukung proses pembelajaran. Pembelajaran yang sebelumnya lebih sering dilakukan secara*clasical*, hanya mengandalkan metode ceramah dengan media pembelajaran yang terbatas, saat ini pembelajaran dapat dilakukan dengan media berbasis teknologi baru, seperti internet, komputer, *infocus*, dan media audio visual lainnya baik kegiatan belajar yang berpusat pada guru maupun siswa. Apabila dulu guru menulis dengan sebatang kapur, sesekali membuat gambar sederhana atau menggunakan suara-suara dan sarana sederhana lainnya untuk mengkomunikasikan pengetahuan dan informasi, saat ini sudah ada media komputer yang dapat menghasilkan mendukung pembelajaran secara audio visual dengan lebih menarik sehingga mendorong siswa untuk lebih menaruh perhatian terhadap materi yang sedang disampaikan. Dengan demikian tulisan, film, suara, musik, gambar hidup yang apabila digabungkan dalam penyampaian materi merupakan suatu kesatuan dalam proses komunikasi pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar dalam pendidikan globalisasi ini sering disebut sebagai pengajaran interaktif multimedia. Oleh karena itu, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan berwawasan global juga harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pembelajaran interaktif dengan perangkat multimedia. Guru pun sebaiknya juga memiliki wawasan terhadap perkembangan teknologi sehingga dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal guna meningkatkan pengajaran menjadi lebih efektif.

Peningkatan sarana dan prasarana untuk pembelajaran sangat diperlukan. Tawaran pembelajaran menggunakan media multimedia tidak hanya pada sekolah negeri namun juga pada sekolah-sekolah swasta. Bahkan pada sekolah swasta yang diperuntukkan untuk masyarakat kelas menengah dan atas mampu menawarkan fasilitas lebih dengan biaya pendidikan yang cukup mahal. Sarana dan prasarana yang ditawarkan tersebut dianggap mendukung dan layak untuk kegiatan belajar mengajar untuk saat ini dimana semakin berkembangnya teknologi dan komunikasi. Bagaimana tanggapan orang

tua? Tidak sedikit dari orang tua siswa yang mengupayakan anak-anaknya untuk berani membayar lebih guna mendapatkan fasilitas yang memadai untuk belajar. Mereka berangapan bahwa fasilitas yang lengkap, pembelajaran yang berkelas internasional, penggunaan bahasa asing dalam lingkungan sekolah merupakan sarana pendukung yang dibutuhkan untuk pembelajaran di sekolah.

Di samping penggunaan sarana multimedia yang merupakan salah satu dari faktor pendukung dalam pendidikan global, penggunaan bahasa asing juga dianggap sebagai materi dan sarana pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa. Yang dimaksud materi di sini adalah bahasa Asing sebagai materi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa sebagai bekal untuk terjun ke masyarakat. Kemampuan berbahasa asing di sini merupakan kebutuhan yang harus dimiliki peserta didikdalam menghadapi globalisasi di bidang komunikasi, politik dan ekonomi. Sebagai contoh adanya pasar bebas saat ini dapat mengakibatkan tumbuhnyapersaingan antar tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing. Kebutuhan pasar untuk merekrut tenaga kerja yang terampil, kompeten dan mampu berbahasa asing sangat tinggi. Hal tersebut disebabkan semakin meluasnya kerjasama di bidang ekonomi baik dari pemerintah maupun perusahaan swasta dengan negara-negara lain secara bilateral, regional atau internasional. Kemudian bahasa asing sebagai sarana pendidikan di sini adalah penggunaann bahasa asing yang dilakukan secara intensif di sekolah dianggap menjadi penunjang pembelajaran ke arah penunjang keterampilan siswa. Penggunaan bahasa asing secara intensif tersebut bertujuan agar peserta didik semakin terbiasa dalam berkomunikasi, terutama dalam menyimak dan berbicara sebagai kemampuan berkomunikasi langsung secara verba. Akan tetapi bahasa asing sebagai sarana dalam pembelajaran pada umumnya ditawarkan oleh sekolah swasta dengan predikat sekolah *national plus* atau sekolah *international*. Pembelajaran secara bilingual atau multilingual tentu saja harus difasilitasi pula dengan tenaga pendidik yang kompeten, baik dari bidang yang diampunya maupun kemampuan berbahasa asingnya.

Dengan adanya kebutuhan untuk menghadapi permasalahan di era globalisasi, bekal lainnya yang diharapkan dapat dimiliki peserta didik adalah pribadi yang berkualitas dan sikap yang positif. Pembentukan pribadi dan sikap yang berkualitas ini bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan analisis, sistematis, bekerja sama, berwawasan nasional dan internasional, berintegritas tinggi, berprinsip, berkomitmen, berjiwa kepemimpinan, jujur, disiplin, kreatif dan saling menghormati. Peserta didik juga harus dibekali rasa nasionalisme yang tinggi agar dapat menyaring pengaruh-pengaruh

negatif yang timbul dari permasalahan global yang ada di masyarakat danperubahan yang terjadi akibat dari globalisasi.

Dari pemaparan tersebut di atas, maka dalam mengimplementasikan dan mencapai tujuan pendidikan global, peran tenaga pendidik adalah:

1. Memberikan bekal pengetahuan kepada siswa tentang pentingnya pengetahuan global dalam memahami maslah-masalah tertentu.
2. Meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik sebagai landasan dalam melakukan tindakan yang berdampak global.
3. Memberikan contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari, yang mempunyai pengaruh terhadap masalah global.

C. Perspektif Reformasi dan Kurikuler

Pendidikan global merupakan suatu proses pendidikan yang dirancang untuk menyiapkan peserta didik dengan kemampuan dasar intelektual dan tanggung jawab guna memasuki kehidupan yang bersifat kompetitif dan dengan derajat saling menggantungkan antar bangsa yang sangat tinggi. Pendidikan harus mengaitkan proses pendidikan yang berlangsung di sekolah dengan nilai-nilai yang selalu berubah di masyarakat global. Dengan demikian, sekolah harus memiliki orientasi nilai dimana penerapannya dalam masyarakat tersebut harus selalu dikaji berkaitan dengan masyarakat dunia.Implikasi dari pendidikan berwawasan global menurut perfektif reformasi tidak hanya bersifat perombakan kurikulum, tetapi juga merombak sistem, struktur dan proses pendidikan. Pendidikan berwawasan global harus merupakan kombinasi antara kebijakan yang mendasarkan pada mekanisme pasar.

Kebijakan pendidikan yang berada di antara kebijakan sosial dan mekanisme pasar memiliki arti bahwa pendidikan tidak semata-mata di tata dan diatur dengan menggunakan perangkat aturan sebagaimana yang berlaku sekarang ini, serba seragam, rinci dan instruktif. Akan tetapi pendidikan juga diatur layaknya suatu Mall, yakni adanya kebebasan pemilik toko untuk menentukan barang apa yang akan dijual, bagaimana akan dijual dan dengan harga berapa barang akan dijual. Pemerintah tidak perlu mengatur segala sesuatu dengan rinci, tetapi hanya menyiapkan standar umum yang mana pada aplikasinya diserahkan kepada pihak pelaksana. Selain itu, pendidikan global harus bersifat sistematik organik, dengan ciri-ciri fleksibel-adaptif dan kreatif-demokratis.

Bersifat sistemik-organik artinya bahwa sekolah merupakan sekumpulan proses

yang bersifat interaktif yang mana setiap interaksi harus dilihat sebagai satu bagian dari keseluruhan interaksi pendidikan yang ada.Fleksibel-adaptif, artinya bahwa pendidikan lebih ditekankan sebagai suatu proses pembelajaran daripada proses pengajaran. Peserta didik dirangsang untuk memiliki motivasi untuk mempelajari sesuatu yang harus dipelajari dan memiliki mental untuk terus mau belajar dan menggali ilmu pengetahuan. Materi yang dipelajari bersifat *integrated*dengan mengaitkan materi satu dengan yang lain secara padu dan terbuka serta berhubungan dengan kehidupan nyata. Kreatif-demokratis berarti pendidikan senantiasa menekankan pada suatu sikap mental untuk senantiasa menghadirkan suatu yang baru, inovasi dan orisinil. Tanpa demokrasi tidak akan ada proses kreatif, sebaliknya tanpa proses kreatif demokrasi tidak akan memiliki makna.

Disamping itu, berdasarkan persperktif kurikuler, pendidikan berwawasan global merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga terdidik kelas menengah dan professional dengan meningkatkan kemampuan individu dalam memahami masyarakatnya dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat dunia dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mempelajari budaya, sosial, politik dan ekonomi bangsa lain dengan titik berat memahami adanya saling ketergantungan.
2. Mempelajari barbagai cabang ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan lingkungan setempat.
3. Mengembangkan berbagai kemungkinan berbagai kemampuan dan keterampilan untuk bekerjasama guna mewujudkan kehidupan masyarakat dunia yang lebih baik.

D. Tantangan Pendidikan di Era Globalisasi

Tantangan pendidikan di era globalisasi ini diantaranya adalah:

1. Manusia dihadapkan pada persaingan di segala bidang yang amat tinggi sehingga merupakan tantangan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menggeser nilai-nilai lama, maka timbul berbagai faham dan ideologi baru.
3. Terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, akibatnya banyak bencana alam yang sangat mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan anak cucunya kelak. Pemahaman terhadap pelestarian alam perlu menjadi prioritas utama dalam pendidikan global.
4. Karena manusia yang cenderung hedonis maka marak terjadi pelanggaran serta

kenakalan remaja dari pergaulan bebas, minuman keras, mengkosumsi narkoba, pelecehan seksual dan lain-lain yang sering dipengaruhi oleh perkembangan informasi yang semakin terbuka baik dalam sosial media maupun jejaring internet. Bahkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di suatu negara yang menyuguhkan kemudahan, kenikmatan dan kemewahan dapat menggoda dan mempengaruhi kepribadian seseorang.

5. Banyak orang yang lari dari kenyataan akibat kalah dari persaingan di masyarakat sehingga mengarahakan pemikirannya untuk melakukan hal yang negatif.

E. Strategi Pengembangan Pendidikan Global

Untuk menghadapi tantangan pendidikan global, meningkatkan pengembangan pendidikan di era globalisasi, dan mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, maka strategi pengembangan pendidikan yang diperlukan, antara lain:

1. Mengedepankan model perencanaan pendidikan (partisipatif) yang berdasarkan pada *need assessment* dan karakteristik masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan merupakan tuntutan yang harus dipenuhi.
2. Peran pemerintah bukan sebagai penggerak, penentu dan penguasa dalam pendidikan, namun pemerintah hendaknya berperan sebagai katalisator dan fasilitator dengan memberikan keleluasaan kepada pelaksana pendidikan untuk mengembangkan pelaksaanaannyasesuai dengan kondisi di lapangan untuk mencapai tujuan pendidikan .
3. Sistem pendidikan yang saat ini diutamakan mengarahkan pada pembekalan *life skill*, pola pikir kreatif dan inovatif
4. Penguatan fokus pendidikan juga mengarah pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, kebutuhan *stakeholders*, kebutuhan pasar dan tuntutan persaingan.
5. Sistem pendidikan harus memperhatikan pembentukan sikap mulia terhadap diri sendiri, orang lain dan lingkungan dengan sikap yang bermoral dan beretos kerja.
6. Sistem pendidikan harus memperhatikan metode pembelajaran interaktif sehingga membentuk hubungan yang interaktif, dialogis dan terbuka dalam proses belajar. Pembelajaran diutamakan tetap mengedepankan kegiatan belajar yang berpusat pada siswa dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika secara proporsional.
7. Menanamkan rasa ingin belajar sehingga kelak menjadi masyarakat yang gemar belajar seumur hidup.
8. Pemanfaatan sumber luar sebagai potensi sumber daya dalam pembelajaran, seperti

lembaga-lembaga pendidikan yang ada, pranata-pranata kemasyarakatan, perusahaan/industri, dan lembaga lain yang sangat peduli pada pendidikan.

9. Memperkuat kolaborasi dan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah maun non pemerintah, bahkan baik dari lembaga di dalam negeri maupun dari luar negeri.
10. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai fasilitas dalam pembelajaran dan memperoleh pengetahuan sehingga dapat mengembangkan potensi diri dan lingkungan.

Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan di atas, maka guru sebagai tenaga pendidik juga perlu memperhatikan hal-hal di bawah ini:

1. Menguasai materi pelajaran dan ilmu mendidik. Hal ini bisa dilakukan dengan studi lanjut sesuai dengan spesialisasi, pelatihan, *workshop*, maupun studi banding ke institusi-institusi yang sudah maju.
2. Memperoleh pembinaan dan pelatihan tentang peningkatan motivasi belajar terhadap peserta didik. Harus ditanamkan pola pembelajaran yang berorientasi pada proses bukan hasil, sehingga peserta didik akan terbiasa untuk belajar maksimal dengan mementingkan pada substansi bukan formalitas. Profesi guru harus dihargai dengan maksimal.
3. Mengembangkan budaya baca bagi kalangan anak usia sekolah maupun masyarakat umumnya.
4. Memperoleh dukungan dan partisipasi komprehensif dari semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pendidikan. Perlu adanya kerjasama antar pengelola lembaga pendidikan, pemerintah, perusahaan dan masyarakat.

Daftar Pustaka

Bagian 1

Amien, A. M., (2005), *Pendidikan dari Persfektif Sains Baru: Belajar Merajut realitas*, Lembaga Penerbitan Unhas.

Callahan J. F., Clark, L.H., (1983), *Foundation of education*, Macmillan Publishing Co. Inc., New York.

Henderson, S. van P., Introduction to Philosophy of Education, The University of Chicago Press, Chicago.

Kneller, G., (Ed.), (1971), *Foundations of Education*, John Wiley and Sons, New York.

Noor, M., (Ed.), (1987), *Filsafat dan Teori Pendidikan: Jilid I Filsafat Pendidikan*, Sub Koordinator Mata kuliah filsafat dan Teori Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, IKIP Bandung.

Oesman O,. Alfian, (Penyunting) (1992), *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, BP 7 Pusat.

Power, Edward, J., (1982), *Philosophy of education: Studies in Philosophies, Schooling, and Educational Policies,* Prentice-Hall, Inc., Englewood Clifs, New Jersey.

Syaripudin, T. dan Kurniasih, (2008), *Pengantar Filsafat Pendidikan*, Bandung, Percikan Ilmu.

Syam, M. N., (1984), *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila,* Usaha Nasional, Surabaya.

Suparno, P., (1997), *Filsafat Konstrukstivisme dalam Pendidikan*, Kanisius, Yogyakarta.

Titus, H.H., *Living Issues in Philosophy*, American Book Company, New York.

Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2003 Tentang *"Sistem Pendidikan Nasional".*

Bagian 2

Arifin, Muzayyin., (2012), *Filsafat Pendidikan Islam*. Bumi Aksara, Jakarta.

Basri, Hasan., (2009), *Filsafat Pendidikan Islam.* Pustaka Setia, Bandung.

Hasbullah., (2011), *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan.* Rajawali Pers, Jakarta.

Nata, Abudin., (2005), *Filsafat Pendidikan Islam.* Gaya Media Pratama, Jakarta.

Ramayulis., (2015), *Dasar-Dasar Kependidikan.* Kalam Mulia, Jakarta.

Sabeni, Ahmad., (2009), *Ilmu Pendidikan Islam*. Pustaka Setia, Bandung.

Tafsir, Ahmad., (2010), *Filsafat Pendidikan Islami.* PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Umar Bukhari., (2010), *Ilmu Pendidikan Islam.* Amzah, Jakarta.

___________., (2010), *Ilmu Pendidikan Islam, Dengan Pendekatan Multidisipliner.* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

___________., (2006), *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam.* PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

__________., (2010), *Ilmu Pendidikan Islam.* Pustaka Setia, Bandung.

<u>Bagian 3</u>

Suriasumantri , Jujun S., (1981), *Filsafat Ilmu.* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Tirtarahardja, Umar dan La Susilo., (2012). *Pengantar Pendidikan*. Rineka Cipta, Jakarta.

Wahidin, Dadan., (2009). *Filsafat dan Ilmu*. Jakarta.

<u>Bagian 4</u>

Afifudin, Meresfon., (2005), *Undang-Undang guru dan dosen dalam upaya peningkata mutu pendidikan*, Insan Mandiri, Bandung.

Pidarta, Made., (2007), *Landasan Kependidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ruswendi, Uus., (2009), *Landassan pendidikan*, Insan Mandiri, Bandung.

<u>Bagaian 5</u>

Ainul, Yaqin M.,. (2005), *Pendidikan Multikultural*: *Cross-Cultural Understan untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta.

Azyumardi Azra., (2003), *Pendidikan Multikultural: Membangun Kembali Indonesia Bhineka Tunggal Ika*, Jakarta.

Choirul, Mahfud,. (2006), *Pendidikan Multikultural,* Yogyakarta.

Bagian 6

Baihaqi dan Sugiarmin., (2006), *Memahami dan Membantu Anak ADHD,* Refika Aditama, Bandung.

Delphie, Bandi,. (2006), *Pembelajaran Anak Tunagrahita: Suatu Pengantar dalam Pendidikan Inklusi,* Refika Aditama, Bandung.

Hallahan, Daniel P., dkk., (2009), *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education,* Cet 10, Pearson Education Inc., Boston.

Reid, Gavin., (2005), *Dyslexia and Inclusion; Classroom Approaches for Assesment, Teaching and Learning,* David Fulton Publisher, London.

Santrock ,John W., (2004), *Educational Psychology*, The McGraw Hill Inc., New York.

Smith, J. David., (2006), *Inklusif, Sekolah Ramah untuk Semua,* Nuansa, Bandung.

Stephens, Thomas M., dkk., (1982), *Teaching Mainstreamed Students,* John wiley & Sons, Canada.

http://dedekusn.com/pendidikan/pentingnya-pendidikan-inklusif/,28/07/2016

https://keluargasehat.wordpress.com/pendidikan-inklusif

http://en.wikipedia.org/wiki/Inclusion_28education29

Bagian 7

Al-Muchtar., (2007), *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, Imperial Bhakti Utama, Bandung. Sobur.

Hawadi, R. A., (2002), *Identifikasi Keberbakatan Intelektual Melalui Metode NonTes*, Grasindo, Jakarta.

Hallahan, Daniel P & Kauffman, James M., (1994) *Exceptional Children, Introduction to Education*, 5th edition , Prentice Hall International Inc., New Jersey.

Unggulan. UNS, Surakarta.

Munandar., (2009), *Psikologi Pendidikan Dan Konseling*, Bina Aksara, Bandung.

Munandar, Utami., (2009), *Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat*. Rineka Cipta, Jakarta.

Soleh, M., (1996), *Alternatif Pelayanan dan Pembelajaran Anak Berbakat di Sekolah*

Tirtonegoro, Sutratinah., (1984), *Anak Super Normal dan Program Pendidikannya*. Bina Aksara, Jakarta.

ING NGARSA SUNG TULADA, ING MADYA MANGUN KARSA, TUT WURI HANDAYANI. DI DEPAN, SEORANG PENDIDIK HARUS MEMBERI TELADAN YANG BAIK. DI TENGAH MURID, GURU HARUS MENCIPTAKAN PRAKARSA DAN IDE. DARI BELAKANG SEORANG GURU HARUS MEMBERIKAN DORONGAN.

KI HADJAR DEWANTARA